



**FRIEDRICH NAUMANN
FOUNDATION** For Freedom.

Indonesia



**LIBERALISME
KLASIK**
Perkenalan Singkat
Eamonn Butler

Kata Pengantar
Stephen Davies

Editor
Muhamad Iksan

Penerjemah
Juan Mahaganti

LIBERALISME KLASIK
PERKENALAN SINGKAT EAMONN BUTLER

**LIBERALISME KLASIK
PERKENALAN SINGKAT
EAMONN BUTLER**

Kata Pengantar :
Stephen Davies

Penerjemah :
Juan Mahaganti

Editor :
Muhamad Iksan

FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION INDONESIA

2019

LIBERALISME KLASIK: PERKENALAN SINGKAT

© **Eamonn Butler**

Diterjemahkan dari *Classical Liberalism: A Primer* berdasarkan izin penulisnya.

Pertama kali diterbitkan oleh Institute of Economic Affairs, London, 2015.

ISBN : 978-979-1157-50-6

Alih Bahasa: **Juan Mahaganti**

Editor: **Muhamad Iksan**

Supervisi Penerbitan: **Sinta Suryani**

Layout dan Kaver: **Fadly Noor M. Azizi**

Cetakan Pertama: Maret, 2019

Diterbitkan atas Kerjasama :

Friedrich Naumann Foundation Indonesia

Jl. Kertanegara 51, Jakarta Selatan 12110

Telp: (021) 7256012/13

Fax: (021) 72799539

Email: jakarta@fnst.org

indonesia.fnst.org

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan,

Jakarta Selatan 12940

Telp: (021) 5253004

DAFTAR ISI

Profil Penulis	xi
Ucapan Terima Kasih	xiii
Kata Pengantar oleh Stephen Davies	xv
Kata Pengantar Penerbit	xxi
Ringkasan	xxiii

PENGANTAR

Tujuan Buku	1
Uraian Isi Buku	1

APA ITU LIBERALISME KLASIK

Sepuluh Prinsip Liberalisme Klasik	4
--	---

LIBERALISME KLASIK: SEBUAH POHON SILSILAH

Leluhur Awal	17
Kebangkitan Liberalisme Klasik	20
Kesuksesan dan Penilaian Kembali	27
Kebangkitan Kembali Liberalisme Klasik Modern	29

LIBERALISME KLASIK DAN KEBEBASAN

Argumen untuk Kebebasan	33
Kebebasan Positif dan Negatif	40
Kekangan untuk Kebebasan	44

MORALITAS LIBERAL KLASIK

Pemaksaan dan Toleransi	45
Argumen Mendukung Toleransi	47

Toleransi dan Negara	5
----------------------------	---

POLITIK LIBERAL KLASIK

Asal Mula dan Tujuan dari Pemerintah	59
Mitos Keadilan Sosial	64
Pilihan Publik dan Kepentingan Pribadi	67
Legitimasi Pemerintah	72

MASYARAKAT LIBERAL KLASIK

Keteraturan Spontan	73
Keadilan dan Supremasi Hukum	77
Rasionalitas Keteraturan Alamiah	81
Masyarakat Sipil	83
Keteraturan Spontan dan Hak Alamiah	85

EKONOMI LIBERAL KLASIK

Keteraturan Spontan Pasar	87
'Mukjizat' Spontan dari Harga	87
Pasar Tanpa Pengendali	89
Aturan dan Properti (Kepemilikan)	90
Argumen Mendukung Kebebasan Ekonomi	92
Efek Destabilisasi Pemerintah	96
Perdagangan dan Proteksionisme	99

LIBERALISME KLASIK SAAT INI

Meredupnya dan Kebangkitan Kembali	101
Kelahiran Kembali Liberalisme Klasik	103
Arti dari Liberalisme Klasik	104
Internasionalisme Liberal Klasik	107
Impian Liberal Klasik	110

PARA PEMIKIR UTAMA LIBERAL KLASIK

John Locke (1632 – 1704), Filsuf dari Inggris	115
Bernard Mandeville (1670 – 1733), Satiris Kebangsaan Inggris-Belanda	115
Voltaire [François-Marie Arouet] (1694 – 1778), Penulis dari Perancis	116
Adam Ferguson (1723 – 1816), Teoritikus Sosial dari Skotlandia	116
Adam Smith (1723 – 1790), Filsuf dan Ekonom Skotlandia	117
Thomas Jefferson (1743 – 1826), Pemimpin Revolusioner Amerika	118
Frédéric Bastiat (1801 – 50), Teoritikus Politik Perancis	118
Richard Cobden (1804 – 1865), Pengusaha dan Politisi Inggris	119
John Stuart Mill (1806 – 73), Filsuf dan Reformis Inggris	119
Herbert Spencer (1820 – 1903), Antropolog dan Filsuf Inggris	120
Friederich A. Hayek (1899 – 1992), Ilmuwan Politik Anglo-Austria	121
Ayn Rand (1905 – 82), Novelis dan Moralis Kebangsaan Rusia-Amerika	122
Isaiah Berlin (1909 – 97), Filsuf Kebangsaan Latvia-Inggris	123
Milton Friedman (1912 – 2006), Ekonom Amerika	123
James M. Buchanan (1919 – 2013), Ekonom Amerika	124
Robert Nozick (1938 – 2002), Filsuf Amerika	125

KUTIPAN LIBERAL KLASIK

Magna Carta	127
Hak Alamiah	128
Pemerintahan Terbatas	129
Keteraturan Spontan	131
Tuntunan Kebaikan	132
Dibandingkan dengan Perencanaan dan Pengendalian	133
Keadilan dan Supremasi Hukum	134
Kebebasan Ekonomi	136
Kebebasan Pribadi	137
Kebebasan Politik	140

KRONOLOGI LIBERALISME KLASIK

Kronologi Liberalisme Klasik	143
------------------------------------	-----

BACAAN LEBIH LANJUT

Pengenalan	xxvii
Penjelasan Umum	xxviii
Karya Klasik	xxix
Tautan Laman Pilihan	xxxi

TENTANG IEA	xxvii
--------------------------	-------

TENTANG FNF	xxxi
--------------------------	------

PROFIL PENULIS

Eamonn Butler adalah direktur Adam Smith Institute, sebuah lembaga riset kebijakan terkemuka. Dr Butler memiliki gelar dalam bidang ekonomi dan psikologi, PhD bidang filsafat dan Doktor kehormatan bidang literatur. Pada tahun 1970-an dia bekerja di Washington untuk DPR AS, dan mengajar filsafat di Hillsdale College, Michigan, sebelum pulang ke Inggris untuk membantu pendirian Adam Smith Institute. Dia pernah memenangkan National Free Enterprise Award di Inggris.

Eamonn menulis berbagai buku tentang para ekonom pembaru seperti Milton Friedman, F.A. Hayek dan Ludwig von Mises, juga buku pengantar Ekonomi mazhab Austria dan *The Condensed Wealth of Nations*. Untuk IEA, Dia telah menulis pengantar tentang Adam Smith, Ludwig von Mises dan teori pilihan publik; karyanya *Foundations of a Free Society* memenangkan Piala Fisher tahun 2014. Dia adalah penulis bersama dari buku tentang sejarah upah dan pengendalian harga, dan seri buku tentang IQ. Publikasi populer terbarunya, *The Best Book on the Market*, *The Rotten State of Britain* dan *The Alternative Manifesto*, menarik perhatian luas, dan dia sering menjadi kontributor untuk media cetak dan elektronik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sekali lagi, saya berterima kasih kepada Madsen Pirie atas saran awal dan masukannya, dan rekan-rekan saya lainnya di Adam Smith Institute atas kesabarannya.

KATA PENGANTAR

OLEH STEPHEN DAVIES

Liberalisme klasik adalah salah satu filsafat politik dan sosial yang paling penting dalam sejarah. Dengan pasti, kita bisa katakan bahwa usaha dari mereka yang percaya pada ide inilah, yang begitu penting dalam mewujudkan agar dunia modern kita ini tercipta. Tanpa adanya kampanye, argumentasi, pemikiran dan analisa dari mereka yang menyatakan diri mereka sebagai liberal klasik, banyak fitur penting dari dunia modern kita ini, seperti pertumbuhan yang berkelanjutan, perlindungan privasi, kebebasan beragama dan penghapusan perbudakan, tidak akan pernah terwujud.

Meskipun dia penting, liberalisme klasik saat ini begitu kurang dimengerti, sering disalah-jelaskan (acap kali disengaja) dan disalah-kenali sebagai ide yang lain, yang paling sering disalah kaprah sebagai konservatisme. Kebingungan lebih khusus datang dari cara orang Amerika menggunakan istilah liberal untuk mengartikan 'sosial demokrat' yang artinya, bahwa dalam wilayah Negara-negara berbahasa Inggris para pengikut liberalisme tradisional harus menemukan label baru untuk ide mereka. (Ini tidak terjadi di benua Eropa daratan, di mana 'liberal' tetap mempertahankan arti tradisionalnya.) Libertarian menjadi kata yang dipakai luas tetapi karena berbagai alasan tetap tidak memuaskan.

Oleh karena itu, usaha Eamonn Buttler ini sangat disambut baik. Karyanya ini adalah sebuah pengantar yang begitu jelas dan

menjelaskan dengan baik tentang liberalisme klasik sebagai sebuah sistem pemikiran, dari mana datangnya, bagaimana keadaannya sekarang dan kemana dia akan mengarah. Salah satu fitur yang paling bernilai dari buku ini adalah caranya menjelaskan perbedaan dan berbagai perbedaan dalam liberalisme klasik yang walau demikian tetap mempertahankan keselarasannya dalam memandang berbagai pemikiran politik dan mempertanyakan kebijakan publik. (Hal yang sama tentu saja bisa dikatakan untuk sosialisme dan konservatisme.) Layak untuk dipikirkan tentang beberapa pertanyaan yang diangkat dan tentang cara bagaimana hal ini bisa diselidiki lebih lanjut ke depannya.

Sebagaimana yang dicatat dalam sejarah, liberalisme klasik jelas berakar dan bermula sebagai gerakan politik dalam babak sejarah Inggris dan cara berpikir tentang hukum dan pemerintahan yang bisa di lacak ke belakang sampai paling jauh abad ke-17, atau bahkan lebih awal lagi pada masa Magna Carta dan gerakan konstitusionalisme abad pertengahan. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan, ada juga sumbernya dari sejarah Eropa daratan, paling tidak di Perancis (walaupun F.A. Hayek menjelaskan negara ini sebagai “yang paling tidak memiliki harapan untuk liberalisme klasik”). Ini bisa dilacak kembali ke masa Pencerahan dan para pemikir seperti Kant, tetapi bisa ditarik lebih jauh ke belakang, ke zaman Renaisans, pemikir akhir abad pertengahan contohnya mereka yang dikenal sebagai Mazhab (atau aliran) Salamanca, dan kepada tradisi abad pertengahan tentang kekuasaan pemerintahan kerajaan konstitusional dan terbatas, dari jazirah Iberia ke Skandinavia dan Polandia-Lithuania. Bermulanya liberalisme klasik di Eropa meski demikian, tidak membuatnya sebagai pola berpikir ke-Eropa-

eropa-an. Dia tidak seharusnya dilihat sebagai ideologi “Barat”; tetapi sebagai cara pandang yang orientasinya universal dan bisa ditarik menjadi tradisi yang disukai dan cocok bagi seluruh budaya dan peradaban di dunia.

Sebagai tambahan dari ide penting yang buku ini mampu jelaskan dengan jelas, adalah bahwa liberalisme klasik juga bisa dikaitkan dengan beberapa ciri dan corak tertentu. Salah satu yang paling penting adalah optimisme, tentang kepercayaan bahwa kondisi umat manusia bisa perbaiki dan pada dua abad terakhir memang telah membaik. Salah satu yang terkait dengan ini adalah sifatnya yang berorientasi ke depan, yaitu menatap ke masa depan bukannya masa lalu. Kita juga bisa temukan bahwa liberalisme klasik berfokus pada individualitas dan pengaturan diri atau otonomi. Mungkin yang paling penting adalah ke-beradaban-nya dan pemikiran bahwa penentang terberatnya adalah sebagai teman diskusinya dan bukannya berusaha melukai atau mengatur mereka - sebuah kualitas yang kurang dipunyai oleh banyak wacana pemikiran saat ini.

Karya ini sangat berhasil dalam menggambarkan secara sederhana dan jelas tentang apa itu liberalisme klasik, dan juga menggunakan penalaran logika, buku ini mampu menjelaskan apa yang bukan termasuk sebagai liberalisme klasik. Sangat jelas bahwa dia berbeda dari sosialisme dan bentuk lain dari kolektivisme egalitarian seperti sosial demokrasi dan liberalisme sosial atau liberalisme ‘baru’. Dia juga tidak sama dengan konservatisme, karena pada umumnya lebih optimistik, lebih menaruh percaya pada akal sehat (bukannya kepercayaan atau tradisi), dan lebih kurang menghormati lembaga warisan tradisi. Satu hal yang jelas muncul saat membaca buku ini dan yang

bahkan lebih lagi ketika kita membaca lebih lanjut bacaan yang disarankan, adalah jauh daripada menjadi konservatif, liberalisme klasik adalah sebuah keyakinan radikal yang telah menciptakan sebuah perubahan yang besar dan luas dari kondisi dan cara hidup kebanyakan manusia di dunia, dan dalam usaha melakukannya, telah berhasil menyingkirkan banyak orde yang lama (hal ini dengan begitu jelasnya dijelaskan oleh contohnya Ludwig von Mises). Salah satu contohnya adalah sejarah perkaitan antara liberalisme klasik dan feminisme, di mana kebanyakan para feminis ‘gelombang pertama’ adalah pengikut keras liberalisme klasik dengan banyak contoh keadaan tersebut bisa ditemukan hingga hari ini.

Liberal klasik sebagai pergerakan dan liberalisme klasik sebagai sebuah badan pemikiran telah banyak berubah dan dikembangkan, tetapi tetap ada sisa-sisanya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam buku ini, dan tetap masih banyak yang harus diperbuat. Ketika para liberal klasik melupakan ini dan malah menjadi pembela keadaan yang saat ini, mereka akan kehilangan kegigihannya dan bagian penting dari identitas mereka. Sebagaimana yang diperjelas dalam buku ini dalam diskusinya dengan perkembangan intelektual terbaru dalam tradisi liberalisme klasik, pemikiran liberalisme klasik bukanlah statis tidak berubah sebagai sebuah badan pemikiran yang telah disempurnakan dengan sebuah kitab suci dan kesimpulan abadi yang hanya membutuhkan pemolesan dan komentar. Tetapi dia malah adalah pergerakan intelektual yang bergerak dan hidup yang mana pemikiran yang dijelaskan dalam buku ini secara terus menerus diaplikasikan dan dipikirkan ulang, dengan ide, analisa,

dan usulan baru yang tetap diperbincangkan dengan kepala hidra yang salah akan dipancung.

Di IEA kami tidak secara khusus mendukung filsafat politik tertentu, apalagi mendukung posisi pergerakan atau politik partai tertentu. Walau demikian, usaha berkelanjutan untuk memahami masalah sosial secara objektif dan secara efektif mengatasinya sehingga meminggirkan salah satu pendekatan dan terbuka untuk pendekatan lain. Liberalisme klasik adalah salah satu filsafat yang menyenangkan dan pergerakan yang datang dari cara berpikir dan memahami dunia yang cocok dan sesuai dengan ini, walaupun dia hanya salah satunya. Sehingga, buku ini adalah pengantar tambahan dalam daftar IEA dan akan menciptakan sumbangsih besar guna pemahaman yang lebih baik dari salah satu aliran filsafat yang paling berkembang dalam zaman modern.

STEPHEN DAVIES

Direktur Pendidikan

Institute of Economic Affairs (IEA)

Mei 2015

Pandangan terkandung dalam sambutan ini, sebagaimana semua publikasi IEA, adalah dari penulis dan bukan dari IEA (yang tidak memiliki cara pandang organisasi), dewan pengurus, anggota Dewan Penasihat Akademis atau staff senior. Kecuali untuk beberapa hal tertentu, seperti publikasi perkuliahan, semua tulisan IEA telah melewati tinjauan buta (tinjauan yang tanpa mengidentifikasi nama penulis) oleh paling kurang dua akademisi atau peneliti yang adalah pakar dibidangnya.

KATA PENGANTAR

PENERBIT

Kata “Liberalisme” sering kali dikaitkan dengan kebebasan tanpa aturan. Seiring dengan 20 tahun era Reformasi di Indonesia, demokrasi saat ini acapkali dikatakan terlalu “liberal” dengan berkaca pada berbagai kebebasan yang berkembang.

Dalam hal kebebasan berpendapat misalnya, argumen “terlalu liberal” disematkan di tengah beragamnya ujaran dan opini di media seiring dengan arus informasi yang semakin bergulir. Kata “liberal” dikonotasikan sebagai kebebasan berpendapat tanpa filter yang kemudian dapat memicu salah paham atau bahkan konflik. Begitu pula dalam hal ekonomi, kata “liberal” acapkali diasosiasikan dengan “kapitalisme” yang kemudian berujung dengan “membuat yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin”. Apakah benar begitu?

Buku “Liberalisme Klasik: Perkenalan Singkat” karya Eamonn Butler ini menjadi panduan lengkap bagaimana memaknai liberalisme klasik. Selain mendiskusikan prinsip-prinsip dasar, buku ini juga membahas dengan lengkap sejarah pemikiran liberalisme klasik dari berbagai aspek baik kebebasan individu maupun ekonomi. Seiring dengan perkembangan dari gagasan liberalisme itu sendiri, buku ini juga kemudian membedakan liberalisme klasik dengan liberalisme yang di Amerika Serikat dan juga beberapa gagasan lainnya.

Buku ini diharapkan dapat membuka ruang untuk berdiskusi mengenai apakah konotasi “liberal” yang masih sering ditemui itu

benar adanya. Sebagai bagian dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Friedrich Naumann Stiftung (FNS) Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang ditandatangani di Jakarta tanggal 16 Oktober 2018 dalam kerjasama penguatan *rule of law*, hak asasi manusia, demokrasi dan *good governance*, buku ini diharapkan pula dapat membumikan liberalisme klasik di Indonesia sehingga tidak menjadi gagasan utopia semata.

Selamat membaca.

Sinta Suryani

Program Officer FNF Indonesia

RINGKASAN

- Liberal klasik memberi prioritas dukungan terhadap kebebasan pribadi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pendukungnya mengakui bahwa orang-orang memiliki pertentangan pendapat, dan ketidaksetujuan tentang di mana letak batasan kebebasan, tetapi secara luas bersetuju bahwa kebebasan pribadi harus diperbesar dan penggunaan pemaksaan harus diperkecil
- Mereka melihat individu pribadi lebih penting dari pada kolektif dan menginginkan pemerintahan perwakilan dan terbatas yang mendapatkan legitimasinya dari rakyat. Pemerintah sendiri harus diikat oleh supremasi hukum, dan keadilan harus disalurkan lewat prinsip dan proses yang diterima.
- Liberal klasik tidak bersetuju tentang peran pasti dari negara, tetapi pada umumnya mengharapkan adanya pembatasan atas penggunaan pemaksaan, entah oleh individu atau pemerintah. Mereka mendukung agar pemerintah itu kecil dan terjaga dalam batas-batas aturan. *Masalah utama dalam politik bukanlah bagaimana memilih pemimpin, tetapi bagaimana mengekang mereka ketika mereka memperoleh kekuasaan.*
- Liberalisme klasik tidaklah sama dengan liberalisme Amerika, yang menghargai kebebasan sosial tetapi memberi banyak kekuasaan ekonomi kepada negara. Bukanlah pula ia ide yang

atomistik (terpecah): dia melihat individu sebagai anggota dari banyak kelompok yang saling berkaitan, dengan banyak keanggotaan dalam keluarga, moralitas, keagamaan dan lainnya. Institusi masyarakat sipil yang demikian adalah benteng terbaik dalam mencegah kekuasaan terpusat negara.

- Kebebasan berbicara dan toleransi bersama dilihat sebagai landasan penting bagi terciptanya kerjasama yang damai antara orang-orang merdeka. Liberal klasik berpendapat bahwa kerja sama seperti ini menumbuhkan keteraturan sosial spontan (seperti pasar, adat istiadat, budaya dan bahasa) yang tak terhingga kerumitannya, efisiensinya dan kemampuan adaptasinya dibandingkan dengan segala hal apa saja yang dirancang secara terpusat.
- Dalam bidang ekonomi, liberal klasik percaya bahwa kesejahteraan tidak diciptakan oleh pemerintah, tetapi oleh kerja sama dari pribadi-pribadi merdeka. Kemakmuran dihasilkan lewat individu-individu yang menemukan, menciptakan, menabung, berinvestasi, dan pastinya mempertukarkan barang dan jasanya secara sukarela, demi keuntungan bersama - keteraturan spontan dari ekonomi pasar bebas.
- Liberalisme klasik bisa ditarik sejarahnya dari Inggris *Anglo-Saxon* dan seterusnya, tetapi diambil paling banyak dari ide-ide para pemikir seperti John Locke (1632 - 1704), Adam Smith (1728 - 90) dan para pendiri Amerika Serikat. Pada zaman ini, disegarkan oleh para cendekiawan seperti F. A. Hayek (1899 - 1992) dan Milton Friedman (1912 - 2006).

- Para liberal klasik bisa berbeda dalam mengusulkan argumen tentang kebebasan. Ada yang melihat bahwa kebebasan itu adalah baik dalam konsepnya itu sendiri, yang lain percaya pada ide hak alamiah yang dimiliki oleh tiap individu. Ada yang percaya bahwa kekuasaan atas orang lain sumbernya hanya dari persetujuan yang dijadikan hukum dan menjadi bagian dari sebuah kontrak sosial. Banyak yang berpendapat bahwa kebebasan sosial dan politik hanyalah untuk sekedar membuat orang-orang menjadi lebih sejahtera.
- Liberal klasik juga mengajukan argumen yang berbeda tentang toleransi. Banyak yang percaya bahwa memaksa orang-orang untuk melakukan sesuatu diluar kehendaknya itu pemborosan dan merusak dan menghasilkan hasil yang buruk. Ada yang percaya bahwa tidak ada pembenaran dalam usaha mengatur pilihan gaya hidup orang lain, asalkan gaya hidup tersebut tidak melukai orang lain. Ada yang mengutip tentang keuntungan yang didapatkan dengan mengizinkan perbedaan ide dan opini.
- Liberalisme klasik **bukanlah** ide yang tetap, **tetapi** sebuah spektrum cara pandang permasalahan sosial, ekonomi, dan politik, yang didasarkan pada kepercayaan terhadap kebebasan dan penghindaran pemaksaan terhadap satu individu dan lainnya. Liberalisme klasik mengalami kebangkitan kembali dalam dekade-dekade terakhir, tetapi saat ini menghadapi pertanyaan yang baru dan mendesak - seperti *apakah kebebasan harus diperluas bagi mereka yang ingin menghancurkan kebebasan.*

PENGANTAR

Tujuan Buku

Buku pengantar ini mencoba untuk menyajikan pengenalan yang singkat terhadap prinsip, para tokoh dan perkembangan dari liberalisme klasik. Dia dirancang untuk para cendekiawan dan orang awam yang mampu mengerti konsep umum dari kebebasan sosial, politik dan ekonomi, tetapi juga menginginkan sebuah pemaparan sistematis dari unsur pentingnya.

Buku ini juga membawa liberalisme klasik sebagai sebuah pandangan dengan spektrum yang luas, yaitu semua yang percaya bahwa kebebasan pribadi dan pengerdilan kekerasan dianggap sebagai prioritas utama, yang mencakup wilayah pemikiran antara di satu sisi libertarianisme sampai kepada pandangan konservatif di sisi yang lain. Buku ini melihat liberal klasik sebagai gagasan yang percaya teguh pada kebebasan individu, tetapi percaya juga pada paling sedikit beberapa fungsi administratif pemerintah dan sistem peradilan yang diperlukan untuk mempertahankannya. Debat antara para liberal klasik dengan pandangan berbeda antara dua spektrum ini, adalah tentang sebagaimana besar dan luas peran pemerintah yang seharusnya.

Uraian Isi Buku

Bab 2 menguraikan tentang sepuluh prinsip yang menyatukan liberal klasik, apapun perbedaan diantara mereka. Selanjutnya Bab 3 menjelaskan tentang perkembangan sejarah liberalisme klasik,

dari akar *Anglo-Saxon*-nya, sampai pada Reformasi, Abad Pencerahan dan beberapa revolusi, sampai pada meredupnya dia pada abad sembilan-belas dan kebangkitannya kembali pada saat ini.

Bab 4 mengajukan beberapa argumen untuk kebebasan, menjelaskan pandangan yang berbeda dan kadang berselisih antara liberal klasik dari berbagai tradisi. Kemudian Bab 5 mempelajari bagaimana ide moralitas dari liberal klasik, dan pentingnya dia dalam meminimalisir pemaksaan, entah itu dari pribadi atau negara. Bab 6 menjelaskan tentang perdebatan sengit tentang peran dan batas negara yang seharusnya. Bab 7 menjelaskan mengapa liberal klasik percaya bahwa masyarakat itu sebagian besar bisa mengatur-diri dan menciptakan keuntungan bagi masyarakat luas tanpa perlunya kekuasaan terpusat untuk menjaganya. Bab 8 menjelaskan bagaimana hal ini juga adalah benar dalam ilmu ekonomi, terima kasih pada evolusi dari berbagai lembaga alamiah seperti pasar dan harga.

Bab 9 menjelaskan kebangkitan kembali pemikiran liberal klasik pada saat ini, dan beberapa aliran mazhab yang muncul dalam tradisi liberal klasik.

Buku ini ditutup dengan penjelasan tentang bagaimana kontribusi dari para pemikir kunci liberal klasik, beberapa kutipan penting tentang isu liberal klasik, sejarah perkembangan liberalisme klasik, dan bacaan lebih lanjut.

APA ITU LIBERALISME KLASIK

Hal yang paling menjelaskan liberal klasik adalah prioritas tertinggi yang mereka berikan bagi *kebebasan individu*. Umat manusia tentunya memiliki kepercayaan atas nilai kebaikan masing-masing - kejujuran, kesetiaan, keamanan, keluarga dan banyak lagi. Tetapi ketika datang pada kehidupan *sosial, politik, dan ekonomi*, liberal klasik percaya bahwa kita harus berusaha untuk memaksimalkan kebebasan yang dinikmati oleh individu.

Liberal klasik mempertahankan bahwa orang harus dibiarkan untuk menghidupkan kehidupan yang mereka pilih sendiri, dengan hanya kekangan minimum yang diperlukan dari pribadi atau kekuasaan yang lain. Mereka menerima bahwa kebebasan tidak akan pernah bisa mutlak, karena kebebasan seseorang bisa saja bertentangan dengan kebebasan orang lain: kita semua bisa memiliki kebebasan untuk bergerak, tetapi kita secara bersama tidak bisa berpindah ke satu titik pada saat yang bersamaan. Dan kebebasan tidak berarti bahwa anda bebas untuk mencuri, mengancam, memaksa, menyerang, atau membunuh orang lain, yang mana hal ini akan melanggar kebebasan *mereka*.

Jadi apa yang menjadi batas kebebasan individu? Liberalisme klasik tidak punya satu jawaban seragam. Dia bukanlah satu rangkaian aturan yang dogmatis. Liberal klasik tidak sepenuhnya bersepakat tentang dimana batasan tindakan pribadi (dan pemerintah) terletak. Tetapi secara luas mereka bersetuju bahwa jawabannya harus mencapai kebebasan individu yang maksimal,

dan bahwa setiap orang yang ingin mengikisnya harus dengan latar belakang alasan yang sangat kuat.

Sepuluh Prinsip Liberalisme Klasik

Agar dapat mengerti dengan lebih baik mengenai apa itu liberalisme klasik, kita bisa membuat daftar sepuluh prinsip liberalisme klasik yang kita bisa setuju bersama.

1. Praduga Kebebasan

Liberal klasik mempunyai sebuah *praduga yang mendukung kebebasan (freedom) individu* atau kemerdekaan (*liberty*) (kata *freedom* dan *liberty* saling bergantian digunakan dalam bahasa Inggris). Mereka ingin memaksimalkan kebebasan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi kita. Akan tetapi, mereka punya dasar yang berbeda dalam kesimpulannya.

Bagi banyak pengikut liberal klasik, mereka percaya bahwa kebebasan itu adalah baik *dalam kebebasan itu sendiri*. Mereka berargumen bahwa secara psikologi, jika diberikan pilihan, orang-orang secara umum lebih memilih untuk merdeka dari pada dipaksa. Bagi yang lain, pembela hak alamiah, berkata bahwa kebebasan adalah sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan atau Alam. Beberapa berpendapat bahwa kebebasan didasarkan pada *kontrak sosial* yang mana orang-orang dalam 'keadaan alamiah' akan bersetuju jika hal ini untuk menghindari kekacauan dan konflik.

Banyak yang menyarankan bahwa kebebasan adalah *prasyarat penting bagi kemajuan*. Beberapa lainnya mengajukan pandangan *humanis*, bahwa kebebasan adalah

bagian penting dari arti sebagai manusia: seseorang yang dikendalikan oleh orang lain bukanlah pribadi secara utuh, tetapi sekedar bidak. Yang terakhir, liberal klasik yang utilitarian menilai kebebasan sebagai cara terbaik untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Keutamaan Individu

Liberal klasik melihat individu sebagai hal yang lebih penting dari pada kolektif. Mereka tidak akan mengorbankan kebebasan individu untuk semacam keuntungan kolektif - paling tidak, tidak jika tanpa pembenaran yang sangat baik. Mereka punya beberapa alasan untuk ini.

Pandangan pertama - disebut *individualisme metodologis* - adalah bahwa kolektif tidak memiliki eksistensi melampaui individu yang membentuknya. Tentu saja, masyarakat lebih dari sekedar kumpulan individu, sebagaimana sebuah rumah lebih dari sekedar kumpulan batu bata. Tetapi *masyarakat* tidak memiliki pemikiran independennya sendiri; melainkan *individu*-lah yang berpikir, dan menilai dan memilih dan mengendalikan keadaan. Tidak ada yang namanya 'kepentingan umum' kolektif melampaui kepentingan individu yang membentuk masyarakat tersebut.

Dan, kedua, para individu-individu tersebut tidak bersepakat. Apa yang menjadi kepentingan satu orang bisa menjadi lawan dari kepentingan individu yang satu. Pada kenyataannya, mengorbankan kebebasan individu demi 'kolektif' adalah demi kepentingan sebagian kelompok tertentu, bukan bagi kepentingan semua orang.

Alasan lain adalah karena pengalaman. Sejarah dipenuhi dengan banyak contoh kengerian yang diberlakukan bagi beberapa masyarakat ketika kebebasan mereka dikorbankan karena salah berpikir tentang apa itu kebaikan kolektif oleh beberapa pemimpin. Bahkan pada sejarah yang barusan, anda hanya perlu melihat kekejaman Hitler, kelaparan dan pembantaian pada zaman Stalin, atau pembunuhan masal yang diperintahkan oleh Pol Pot.

Keempat, masyarakat amat sangat rumit dan dalam perubahan yang konstan. Tidak ada satupun otoritas yang mampu mengetahui apa yang terbaik bagi setiap orang dalam dunia yang kompleks, dan dinamis ini. Individu pribadi jauh lebih baik dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, dan haruslah dibebaskan untuk melakukannya.

3. Meminimalisasi Pemaksaan

Liberal klasik ingin meminimalkan pemaksaan. Mereka menginginkan sebuah dunia di mana setiap orang bisa hidup bersama dalam persetujuan yang damai, bukan dunia di mana seseorang menggunakan kekuatan memaksa atau ancaman untuk memanfaatkan atau memaksakan kehendaknya pada orang lain.

Oleh karenanya, liberal klasik memberikan monopoli atas penggunaan kekerasan kepada pemerintah dan otoritas yudisial (kehakiman). Tetapi mereka ingin untuk menjaganya bahkan hanya untuk kebutuhan yang paling minimum; mereka tahu betapa mudahnya kekuasaan bisa disalahgunakan.

Liberal klasik mempertahankan bahwa setiap penggunaan kekerasan untuk mengikis tindakan orang-orang harus, harus

dilandaskan pada *alasan pembenaran*. Beban pembuktian haruslah pada mereka yang ingin mengekang kebebasan, mereka yang harus menunjukkan alasan kenapa perlunya dan apa ada cukup keuntungan yang didapatkan dari hak mengekang ini.

Dan lebih umum lagi, liberal klasik percaya bahwa setiap individu harus mampu menjalani kehidupan sebagaimana yang mereka pilih, tanpa perlu meminta izin dari siapapun sebelum mereka melakukannya. Mungkin ada alasan yang baik untuk mengekang tindakan; tetapi adalah bagi individu yang ingin mengekanglah yang harus membangun argumen pembenarannya.

4. Toleransi

Liberal klasik percaya bahwa alasan utama - atau mungkin satu-satunya alasan yang baik - untuk mencampuri kebebasan orang lain adalah untuk mencegah orang agar tidak melukai atau mengancam orang lain. Mereka tidak percaya bahwa kita harus mengekang tindakan orang hanya karena kita tidak menyetujui atau merasa tindakan tersebut menyinggung. Sebagai contoh, liberal klasik membela kebebasan berpendapat, bahkan jika beberapa orang menggunakan kebebasan ini untuk menyatakan hal-hal yang orang lain bisa anggap menjengkelkan. Begitu pula, individu harus merdeka untuk berkumpul dalam kelompok seperti klub perkumpulan, serikat atau partai politik, bahkan jika orang lain menganggap tujuan dan aktifitas mereka tidak senonoh. Mereka harus merdeka untuk memperdagangkan barang dan jasa, bahkan untuk barang-barang yang tidak disetujui oleh orang lain. Dan

mereka harus bebas untuk hidup, dan mempercayai opini apa saja yang mereka sukai, dan mempraktekan agama apa saja yang mereka mau.

Liberal klasik melihat toleransi seperti ini bukan hanya saja secara hakiki baik. Mereka melihat toleransi dan saling menghormati sebagai landasan untuk terciptanya kerja sama yang damai dan terciptanya masyarakat yang saling menguntungkan dan berfungsi dengan baik. Perbedaan antara manusia adalah fakta dalam kehidupan sosial, dan akan selalu seperti itu. Liberal tidak percaya bahwa perbedaan tersebut bisa dihilangkan, dan sangat skeptis dengan usaha para Utopis yang mencoba untuk melakukannya. Oleh karena itu, toleransi akan selalu menjadi bagian penting dalam fungsi kehidupan sosial.

5. Pemerintahan Perwakilan dan Terbatas

Liberal klasik mengakui bahwa pemaksaan jenis tertentu bisa saja dibutuhkan untuk mencegah orang untuk melukai sesamanya, dan setuju bahwa hanya pihak berwenang yang punya kekuasaan ini. Tetapi mereka juga tahu bahwa kekuasaan tidak dijalankan oleh suatu bentuk 'negara' yang tanpa emosi tetapi oleh manusia biasa yang juga punya kekurangan seperti manusia lainnya. Mereka tahu bahwa kekuasaan cenderung untuk korup, dan bahwa para politis sering menyebut 'kepentingan publik' untuk membuat kebijakan yang sebenarnya adalah kepentingan mereka sendiri.

Ditambah lagi, ahli teori kontrak sosial seperti Filsuf Inggris John Locke (1632 - 1704) berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah datang dari masing-masing individu rakyatnya, dan bukan sebaliknya. Orang-orang menyerahkan

sebagian dari kebebasan mereka pada pemerintah guna memaksimalkan kebebasan mereka secara umum. Jadi pemerintah tidak memiliki kekuasaan yang sah melebihi kekuasaan yang dimiliki oleh individu itu sendiri; dan tujuan utama pemerintah adalah untuk mengembangkan kebebasan ini, bukan mengekangnya. Sebagaimana pemikir revolusi Amerika Thomas Paine (1737 - 1809) nyatakan, warga negara berhak untuk menggulingkan pemerintah mana saja yang melanggar kepercayaan yang diberikan pada mereka.

Tetapi revolusi adalah jalan keluar terakhir. Liberal klasik percaya bahwa demokrasi perwakilan (representatif) dan konstitusional adalah cara terbaik yang pernah ditemukan untuk menjaga agar para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (legislator) kita bisa akuntabel pada rakyatnya. *Pemilihan umum bukan hanya sekedar tentang memilih pemimpin yang baik, tetapi menyingkirkan yang buruk.* Dengan pemilih yang lebih siaga dan lebih mendapat informasi (berpengetahuan), maka para legislator bisa bekerja dengan baik. Walau demikian, demokrasi memiliki batasannya; dia bisa saja menjadi cara yang baik dalam membuat keputusan, tetapi hanya sedikit keputusan; biasanya lebih baik jika kita membiarkan individu membuat keputusan mereka sendiri.

6. Supremasi Hukum

Prinsip lain yang mengekang kekuasaan dan menciptakan keamanan bagi publik adalah supremasi hukum (kekuasaan hukum). Ini adalah ide bahwa kita harus diatur oleh hukum yang diketahui luas, bukannya oleh keputusan sepihak dari pejabat pemerintah - atau apa yang disebut oleh negarawan

Amerika John Adams (1785 - 1836) sebagai 'pemerintahan oleh hukum, dan bukan orang'.

Liberal klasik percaya bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang gender, ras, agama, bahasa, keluarga atau karakter tidak relevan lainnya. Dia harus berlaku bagi pejabat pemerintah sebagaimana itu berlaku bagi orang biasa; tidak ada yang boleh 'diatas hukum'.

Untuk menjaga supremasi hukum membutuhkan sistem peradilan, dengan pengadilan yang independen dan tidak bisa dikendalikan oleh individu atau kelompok atau pemerintah. Diperlukan adanya prinsip yudisial mendasar seperti *habeas corpus*, pengadilan oleh juri dan proses hukum untuk mencegah mereka yang berkuasa untuk menggunakan hukum untuk kepentingan mereka sendiri.

Kekuasaan (supremasi) hukum memiliki akibat membahagiakan lainnya - dia membuat hidup lebih bisa diprediksi, karena dia memampukan kita untuk mengantisipasi bagaimana orang-orang (termasuk para pejabat) yang akan - dan tidak akan - perbuat. Sehingga kita bisa membuat rencana jangka panjang tanpa perlu takut rencana ini akan dihancurkan oleh kezaliman pihak lain.

7. Keteraturan Spontan

Anda mungkin berpikir bahwa masyarakat yang besar jumlahnya dan kompleks membutuhkan pemerintahan yang besar dan berkuasa untuk menjalankannya; tetapi liberal klasik membantah ini. Mereka percaya bahwa pemerintah bukanlah dasar dari keteraturan sosial. Lembaga masyarakat yang kompleks yang saat ini kita lihat di sekeliling kita adalah

sebagian besar tidak terencana. Mereka adalah hasil dari *tindakan manusia*, bukan *rancangan manusia*.

Sebagai contoh, tidak ada otoritas atau perencanaan yang sadar yang dibutuhkan untuk menghasilkan bahasa, atau adat dan budaya, atau pasar untuk barang dan jasa. Institusi ini tumbuh begitu saja dan berubah sebagai hasil dari interaksi yang tak terhitung jumlahnya antara orang-orang bebas. Jika, setelah melewati berabad-abad, mereka terbukti berguna dan menguntungkan, mereka bertahan, jika tidak, mereka berubah atau ditinggalkan.

Ahli teori sosial dari Austria, F. A. Hayek (1899 - 1992) menyebutnya sebagai hasil keteraturan spontan. Keteraturan sosial bisa sangat begitu kompleks. Mereka berevolusi lewat cara individu-individu mengikuti tata cara bertindak - seperti tata bahasa - yang mereka bahkan tidak sadari sedang mereka taati, dan sangat jarang bisa mereka jelaskan. Adalah kebodohan besar, dari para politisi dan pejabat, untuk berasumsi bahwa pemikiran satu orang bisa mengerti keteraturan yang begitu kompleks ini, apalagi mengembangkannya.

8. Kepemilikan, Perdagangan dan Pasar

Liberal klasik percaya bahwa kesejahteraan/kekayaan tidaklah diciptakan oleh pemerintah, tetapi oleh kerjasama antara berbagai individu dalam keteraturan spontan mekanisme pasar. Kesejahteraan tercipta lewat individu merdeka yang menemukan, menciptakan, menabung, berinvestasi dan, tentu saja mempertukarkan barang dan jasa secara sukarela, untuk

keuntungan bersama - keteraturan spontan dari ekonomi pasar-bebas.

Keteraturan sosial penciptaan-kesejahteraan ini tumbuh dari sebuah aturan yang sederhana: penghormatan kepada kepemilikan pribadi dan kontrak, yang memungkinkan terciptanya spesialisasi (pembagian kerja) dan perdagangan. Kebebasan dan kepemilikan pribadi berhubungan sangat erat. Ekonomi pasar, dengan kesejahteraan yang diciptakannya, bergantung pada kebebasan orang, barang, jasa, modal dan ide untuk berpindah-pindah. Dan adanya kesejahteraan pribadi akan mempermudah bagi orang-orang untuk menolak pemerintah zalim yang eksploitatif. Liberal klasik tidak mengizinkan properti untuk didapatkan dengan paksaan. Sebaliknya, kebanyakan kepemilikan properti pribadi itu diciptakan - ternak dipelihara, rumah dibangun, inovasi dikembangkan. Barang pribadi tentu saja menguntungkan pemiliknya. Tetapi faktanya dia menguntungkan semua orang dan menciptakan kesejahteraan yang lebih luas.

9. Masyarakat Sipil

Liberal klasik percaya bahwa berserikat dan berkumpul secara sukarela adalah lebih baik dalam menyediakan kebutuhan individu dibandingkan dengan pemerintah. Dengan menekankan prioritas pada individu, tetapi mereka menyadari bahwa orang-orang tidaklah saling terisolasi, atomistik, bukanlah makhluk yang berpusat pada dirinya sendiri. Sebaliknya, manusia adalah *binatang* sosial dan hidup dalam keluarga dan kelompok dan komunitas yang dalam beberapa

bagian membentuk nilai-nilai mereka sendiri - perkumpulan, asosiasi, serikat, perkumpulan, agama, sekolah, komunitas *on-line* (daring), gerakan kampanye, kelompok *self-help* (komunitas mandiri), gerakan amal dan lembaga-lembaga lainnya yang kita sebut sebagai masyarakat sipil.

Lembaga-lembaga ini adalah bagian penting dari bagaimana orang-orang hidup terhubung satu dengan yang lain. Cara pandang, nilai dan tindakan kita dibentuk di dalamnya. Dan mereka menyediakan dasar untuk saling pengertian yang di dalamnya kerja sama bisa dibangun. Tentu saja kerja sama tidaklah mungkin terjadi tanpa adanya kebebasan untuk berkumpul seperti ini.

Masyarakat sipil juga bisa menjadi *buffer* (penyangga) antara individu dan pemerintah. Jika kita semua adalah individu yang terisolasi, maka kebebasan kita akan dengan mudah ditindas oleh pemerintahan yang jahat. Tetapi lingkaran kompleks yang saling berkaitan dari berbagai organisasi masyarakat sipil bukan saja menunjukkan bahwa ada alternatif dari tindakan pemerintah - contohnya amal pihak swasta, dan bukannya bantuan negara - tetapi juga bisa menyediakan bagi kita penyatuan kepentingan dan kekuatan yang bisa kita pakai untuk melawan.

10. Nilai Manusia yang Sama

Liberal klasik, akhirnya, ingin memanfaatkan nilai kemanusiaan kita yang sama untuk keuntungan kita bersama. Mereka percaya kepada prinsip dasar akan kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan pribadi dalam hukum. Hal ini, mereka percaya, adalah dasar bagi keteraturan spontan sosial

yang baik yang didasarkan pada rasa saling menghormati, toleransi, non-agresi, kerja sama dan pertukaran sukarela antara orang-orang yang bebas.

Secara politik, mereka menyetujui kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul, supremasi hukum dan - karena para penguasa tidak lebih suci dari pada kita semua - pembatasan kekuasaan pemerintah untuk mencegah mereka yang berkuasa untuk melakukan hal buruk.

Mereka tahu bahwa masyarakat yang baik tidak bisa hanya bersandar hanya pada kebaikan manusia. Tetapi bersandar pada kerja sama damai antara berbagai individu yang saling berbeda dan mementingkan diri. Sehingga mereka setuju dengan kebebasan dan persamaan didepan hukum, dengan sistem peradilan yang kuat dan bisa dipercaya yang mencegah kita untuk melukai sesama kita, tetapi tidak mencoba untuk mengatur kehidupan kita.

Secara ekonomi, liberal klasik mempercayai kebebasan memproduksi dan pertukaran, dan perpindahan bebas dari orang-orang, barang dan modal. Mereka membela kepemilikan properti dan mendukung agar pajak dijaga hanya untuk hal-hal yang diperlukan untuk menyediakan pertahanan umum dan 'barang-barang publik' lainnya yang tidak bisa disediakan oleh pasar.

Hal ini jauh dari penggambaran umum bahwa liberalisme klasik sebagai sekedar Negara kecil, *laissez-faire*, penjaga malam. Pengadilan saja, contohnya adalah lembaga besar yang kompleks yang membutuhkan usaha yang besar dan terus-menerus untuk dijaga. Liberal klasik tahu bahwa perlindungan

terhadap hidup, kebebasan, dan hak milik bukanlah pekerjaan kecil.

Kotak 1 Catatan tentang Liberalisme Amerika

Ketika orang Amerika mengatakan kata 'liberalisme', mereka membicarakan tentang sesuatu yang sangat berbeda dengan liberalisme klasik. Liberalisme klasik, yang juga dikenal sebagai 'liberalisme tua' atau 'liberalisme pengertian Eropa' berfokus pada kebebasan individu; meminimalkan pemaksaan; hak kepemilikan dan perdagangan bebas; dan pemerintah yang terbatas dan akuntabel yang melindungi dan memperluas kebebasan.

Liberalisme Amerika atau 'liberalisme baru' atau 'liberalisme modern' memiliki kepercayaan yang kuat terhadap kebebasan pribadi, tetapi menganggap bahwa kebebasan adalah lebih dari sekedar ketiadaan pemaksaan – tetapi bisa dijaga oleh pemerintah yang paternalistik dan intervensionis (bisa turut campur).

Liberal Amerika menganggap bahwa pemerintah memiliki tugas untuk melindungi rakyatnya dari dirinya sendiri dan dari ketidakadilan dari ketimpangan kekuasaan yang sering dipercaya sebagai hasil dari kepemilikan pribadi atas properti. Mereka memperjuangkan sebuah sistem kesejahteraan yang memelihara rakyat untuk mengompensasi orang miskin dan melindungi para pekerja dari pemberi kerja mereka (yang lebih berkuasa). Mereka skeptis terhadap gagasan bahwa kebebasan ekonomi menghasilkan kebaikan bagi orang banyak (seperti lapangan kerja yang tinggi) dan percaya bahwa Negara harus turut campur guna memperluas kesempatan, menyediakan barang publik dan menciptakan pasar yang melayani kepentingan publik.

Liberal klasik sangat-lah menaruh curiga terhadap kebijakan seperti ini. Mereka takut bahwa kekuasaan pemerintah akan sangat mudah bertumbuh melebihi kegunaannya; dan menjelaskan bahwa bahkan kebijakan yang didasarkan niat baik sering menghasilkan dampak yang melenceng dan tidak dikehendaki.

LIBERALISME KLASIK

SEBUAH POHON SILSILAH

Leluhur Awal

Beberapa jejak liberalisme klasik bisa ditarik ke belakang ke Filsuf Cina Lao-Tzu, yang mengajarkan pengekangan terhadap kekuasaan pemimpin. Dua puluh abad lalu, penguasa India Ashoka juga mengajak adanya kebebasan dan toleransi politik. Dan Islam mempercayai kebebasan ekonomi sejak awal berdirinya pada abad ke enam.

Tetapi mereka adalah sepupu jauh dari liberalisme klasik modern. Leluhur langsung adalah dari Eropa, tentu saja lebih khusus Inggris. Menurut pemikir dan politisi liberal klasik Daniel Hannan (1971 -), liberal klasik dimulai oleh bangsa *Anglo-Saxon*, yang sejak tahun 400 telah tinggal di tempat yang saat ini kita sebut sebagai Inggris.

Inggris Anglo-Saxon

Sebagai sebuah negara pulau, sulit untuk diserang, Inggris menikmati kestabilan yang lebih besar dibandingkan dengan Eropa Daratan, sehingga muncul sebuah sistem kepemilikan properti dan peradilan yang terjaga. Hal ini bukanlah sesuatu yang direncanakan oleh seseorang - tetapi adalah hasil perubahan bertahap dari penduduk Anglo-Saxon yang berpikiran merdeka dan menyuburkan pemikiran ini dan mengukuhkan hak-hak mereka dari para penjarah.

Nantinya, kebutuhan untuk hidup bersama dengan bangsa Viking, yang mulai menempati wilayah ini pada sekitar tahun 800, menuntun juga secara tidak disengaja kepada terciptanya bahasa dan pengaturan hukum yang sama. Tanpa adanya kekuasaan feodal khas Eropa daratan, dari perpaduan dua kebudayaan ini terciptalah *hukum rakyat* (common law) – *hukum negeri* (law of the land) yang berubah secara perlahan melalui interaksi antar individu, dan bukannya *hukum raja* (law of the princes) yang diatur oleh mereka yang berkuasa¹.

Common Law menjadi salah satu fondasi utama dari liberalism klasik saat ini. Karena dia bukanlah hukum monarki, tetapi ditentukan oleh rakyat sendiri. Hukum ini menghormati kepemilikan pribadi dan kontrak. Dia mengakui kebebasan didalam hukum. Tidak ada seorang pun yang harus meminta izin sebelum bertindak; segala hal yang tidak secara khusus dilarang adalah legal. Hukum menjadi urusan semua orang dan penegak hukum menjadi bertanggungjawab. Bahkan para raja dipilih oleh majelis tua-tua (yang disebut *Witan*), yang akan menuntut kesetiaan raja terhadap mereka – bukannya mengabdikan pada raja.

¹ *Common Law* adalah sistem hukum *Anglo-Saxon* yang berbeda dengan sistem *Civil Law* (sistem Eropa Kontinental) yang dianut Negara Eropa Daratan termasuk pengaruhnya ke Indonesia. Dalam sistem *Common Law*, keputusan hakim menjadi apa yang disebut sebagai “preseden” yaitu keputusan yang nantinya menjadi hukum dan menjadi pertimbangan oleh hakim lain ketika dia mengambil keputusan di masa depan. Berbeda dengan *Civil Law* (hukum sipil) yang mana hukum telah tertulis dan menjadi dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan. *Common Law* sendiri tidak memiliki terjemahan baku dalam Bahasa Indonesia, oleh karena itu dalam tulisan selanjutnya akan disebut sebagai *Common Law*.

Invasi dan Kelahiran Kembali

Semuanya berakhir secara tiba-tiba pada 1066, ketika bangsa Normandia menginvasi dan menjajah secara militer. Inggris kemudian diperintah oleh orang elit Eropa, yang bahasanya dan ke-otoriterannya berbeda dengan cara hidup orang-orang Inggris. Mereka menerapkan feodalisme, perhambaan, stratifikasi sosial dan sistem pembuatan hukum yang *top-down* (dari atas ke bawah) – hal yang jelas-jelas terbalik dari kebebasan dan pemerintahan terbatas yang dikenal oleh bangsa Anglo-Saxon.

Tetapi dalam beberapa generasi, para pemilik tanah bangsa Normandia menjadi semakin berbaur dengan penduduk lokal; sementara sang Raja John (1166-1216), mengurung diri dalam keraton Perancis-nya, menjadi semakin terpisah dari rakyatnya dan semakin korup; secara sepihak memanipulasi hukum untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Hasilnya, tahun 1216, para tuan tanah memaksa raja untuk menandatangani sebuah perjanjian besar – Magna Carta – tentang hak dan keistimewaan.

Sebagian besar isi perjanjian ini untuk menegaskan kembali *hak kepemilikan kuno*, dan melindungi mereka dari rongrongan kekuasaan – sejenis pengamanan hak atas kepemilikan yang bagi para liberal klasik saat ini anggap sebagai hal yang sangat penting.

Tetapi bagian kunci dari perjanjian ini meneguhkan *kebebasan kuno* – yang dimiliki oleh gereja, kota, dan masyarakat umum – dan prinsip-prinsip liberal klasik seperti pengadilan oleh Juri dan proses hukum yang jelas. Bahkan diatur bahwa raja, seperti rakyat biasa, diikat oleh ‘hukum negeri’. Pemerintah, dalam kata lain, menjadi subjek *kekuasaan hukum*.

Walaupun John mengingkari perjanjian ini, dia meninggal tidak lama setelahnya. Anaknya Henry III mewarisi tahta ketika masih anak-anak, dan kekuasaan perlahan berpindah dari kerajaan ke majelis para tuan tanah. Henry memberlakukan kembali perjanjian ini, secara sukarela, pada 1226. Tetapi pertentangan yang kemudian terjadi lagi dengan para tuan tanah, kebanyakan masalah pajak untuk perang, menuntun kepada satu lagi inisiatif liberal klasik di Inggris – terciptanya Parlemen.

Kebangkitan Liberalisme Klasik

Revolusi Budaya dan Keagamaan

Sejarawan Inggris, Lord Acton (1834 – 1902) menulis bahwa: ‘Kebebasan dibangun oleh konflik antar kekuasaan’. Di Eropa Daratan, Kekuasaan Kekaisaran Romawi dan para penguasa Feodal dan kerajaan penerusnya telah ditantang oleh kebangkitan Gereja Kekristenan. Secara tidak disengaja mereka membangun sebuah lembaga yang bebas, tetapi saling membatasi kekuasaan yang mereka berlakukan satu antara yang lain yang telah membuka suatu bentuk kesempatan untuk kebebasan pribadi yang lebih besar.

Ada dua momen sejarah di Eropa yang meneguhkan pentingnya kebebasan individu atas kekuasaan Negara. Bagian kunci dari revolusi budaya yang disebut Renaisans ini, kurang lebih terjadi antara abad lima belas dan tujuh belas, adalah diperkenalkannya mesin cetak di Eropa pada 1450. Penemuan sederhana ini menghilangkan monopoli kaum elit terhadap ilmu pengetahuan dan pembelajaran, menjadikan pengetahuan dapat digapai oleh bahkan orang biasa. Tidak perlu lagi orang biasa berkonsultasi kepada kekuasaan untuk meminta tuntunan dan

permisi: mereka punya informasi yang bisa mereka jadikan dasar atas pilihan mereka sendiri.

Reformasi Protestan, dimulai oleh Martin Luther pada 1517, lebih mendorong hal ini. Reformasi menantang kekuasaan Gereja Katolik, dan mengangkat rasa harga diri orang biasa dengan menegaskan bahwa mereka sendiri bisa memiliki akses langsung, personal, dan sama dengan orang lain, tanpa membutuhkan perantara para pemuka agama yang elitis.

Semua ini menjadi pendorong meningkatnya posisi individu dihadapan kemapanan lembaga kekuasaan. Di Negara di mana kebebasan yang lebih besar, di situlah kebanyakan kesenian, industri, dan pengetahuan berkembang, dan perdagangan juga berkembang.

Revolusi Politik

Secara politis, keadaan juga berubah. Pergerakan massa pro-kebebasan, *The Levellers*, menyebar di seluruh Inggris pada 1650-an. Dipimpin oleh John Lilburne (1614 – 57), yang menekankan bahwa hak rakyat adalah hak sejak lahir dan bukannya diberikan oleh pemerintah atau hukum. Ditangkap karena mencetak buku terlarang (pelanggarannya terhadap monopoli para pejabat), dia berdiri di Ruang Bintang yang terkenal, tetapi menolak untuk tunduk di depan para hakim (bersikeras bahwa mereka dan dia adalah setara) atau menerima tata cara peradilan mereka. Bahkan ketika sudah berada di alun-alun penghukuman dia tetapi mengkhotbahkan kebebasan dan persamaan hak, dan tentu saja dia dipenjarakan karena menentang otoritas – dan ini dialaminya berkali-kali.

Lilburne menjadi figur anti-kekuasaan yang terkenal. Dia berpetisi untuk mengakhiri monopoli Negara dan menjabarkan apa yang terkandung dalam *Bill of Rights* (Hukum Hak Asasi Inggris). Hal ini dikembangkan lebih lanjut oleh Richard Overton (s. 1610 – 63), juga dipenjarakan karena menolak mengakui kekuasaan kehakiman dari *House of Lords* (Dewan Tinggi Parlemen Inggris), dia menuntut adanya undang-undang dasar tertulis sebagai ‘kontrak sosial’ antara rakyat merdeka yang bagi dia itu adalah orang-orang pemilik propertinya sendiri yang tidak bisa dikangkangi haknya oleh siapapun.

Mengikis Kekuasaan Kerajaan

Setelah Perang Saudara Inggris (1642 – 51), raja yang berkuasa, Charles I, diseret ke pengadilan dan dihukum mati karena makar – sebuah pengakuan gamblang dari pembatasan kekuasaan pemerintah.

Tetapi hubungan kekuasaan antara raja dan Parlemen telah berbalik. Negara pulau Britania Raya (sebagaimana dia disebut saat itu) tidak membutuhkan tentara untuk melindungi dirinya dari berbagai invasi. Sehingga, tidak seperti Eropa Kontinental, raja tidak punya tentara yang bisa dipakai untuk menekan dan mengeksploitasi rakyatnya. Charles membutuhkan Parlemen untuk menyetujuinya ketika menaikkan pajak untuk perang dengan Negara asing.

Hal ini membuat raja yang telah cemburu terhadap parlemen menjadi frustrasi dan menciptakan banyak konflik. Diantara berbagai konflik ini, Charles membubarkan Parlemen, memberlakukan pajak yang berat tanpa persetujuan parlemen dan mencoba menangkap lima anggotanya yang terkemuka. Dia telah

melanggar kontrak dengan rakyatnya secara terbuka, yang dari kontrak ini hak rakyat dilindungi.

Revolusi Agung

Setelah jeda peralihan kekuasaan (1649-60) dari kediktatoran Oliver Cromwell, perimbangan kekuasaan ditunjukkan lagi ketika pewaris tahta Charles, Charles II harus membujuk Parlemen agar mengembalikannya menjadi raja. Ketika penerusnya, anak kedua Charles, James II, digulingkan, adalah Parlemen yang mengundang William (Pangeran Oranye dari Belanda) dan Mary untuk bertahta. Arah sumber kekuasaan, dari rakyat kepada raja, menjadi sangat kelihatan.

Pada 1689, William dan Mary menandatangani *Bill of Rights* (Hukum Hak Asasi), sebuah pengakuan terhadap hak dan kebebasan rakyat Britania dan membenaran terhadap penggulingan James II atas dasar bahwa dia telah melanggar hak-hak dan kebebasan ini. Ini adalah ajakan untuk penerapan sebuah sistem peradilan yang merdeka dari monarki, sebuah akhir dari pemungutan pajak tanpa persetujuan Parlemen, hak untuk mengajukan petisi pada pemerintah tanpa takut terhadap pembalasan, pemilu yang bebas, kebebasan mengeluarkan pendapat dalam Parlemen dan akhir dari 'penghukuman yang kejam dan tidak wajar'. Secara langsung, kejadian di atas akan menjadi inspirasi bagi salah satu inisiatif besar liberal klasik lainnya, *Bill of Rights* versi Amerika, seabad kemudian.

John Locke (1632-1704)

John Locke menggabungkan pemikiran liberalisme klasik yang lebih tua menjadi suatu batang tubuh pemikiran liberal klasik yang modern dan bisa dimengerti. Sebagian dari tujuannya untuk

menunjukkan bagaimana James II telah menelantarkan tahtanya sendiri dengan melanggar sebuah kontrak sosial. Setiap kekuasaan, jelasnya, datang dari rakyat, yang memberikannya dengan satu-satunya tujuan yaitu memperkuat keamanannya sendiri dan memperluas kemerdekaannya. Ketika kontrak ini dilanggar, individu rakyat memiliki segala hak untuk bangkit melawan penguasa.

Locke juga mengembangkan teori hak alamiah-nya, dengan argumen bahwa setiap manusia memiliki hak fitrah yang sudah ada mendahului pemerintah dan tidak bisa dikorbankan demi pemerintah. Pemerintah yang melanggar hak ini adalah pemerintah yang tidak sah.

Tetapi bagian penting dari ide Locke adalah kepemilikan pribadi, dan bukan sekedar kepemilikan fisik. Locke berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak atas hidupnya, badan dan kerjanya - *konsep kepemilikan diri*. Dari pemahaman penting ini, dia bernalar bahwa setiap orang juga berhak memiliki setiap barang yang mereka usahakan untuk tercipta – ‘dihasilkan dari kerja-nya’. Berdasarkan prinsip kepemilikan diri ini nantinya dianggap penting bahwa kepemilikan seperti ini harus diamankan oleh hukum.

Ide-ide ini akan menjadi bahan pengetahuan bagi para pemikir di balik Revolusi Amerika.

Zaman Pencerahan

Abad ke-delapan belas menjadi saksi dari kebangkitan pemikiran liberal klasik yang lainnya. Di Perancis, Montesquieu (1689 - 1755) mengembangkan ide bahwa dalam masyarakat bebas dan ekonomi bebas, seseorang harus bertingkah laku dalam cara yang menjaga

perdamaian dan kerjasama antara dia dan sesamanya - dan melakukannya tanpa memerlukan arahan dari otoritas manapun. Oleh karenanya dia mengusulkan sebuah sistem *check and balances* (saling menyeimbangkan) antara para pemegang kekuasaan pemerintahan - ide lainnya yang menjadi sumber pemikiran para pemikir Amerika.

Sementara itu, sebuah revolusi intelektual berkembang, yang menentang otoritarianisme gereja telah menuntun para pemikir seperti Voltaire (1694 - 1778) untuk mengajak ke arah penggunaan akal dan toleransi, kemajemukan agama dan keadilan yang manusiawi. Dalam bidang ekonomi juga, intelektual seperti Turgot (1727-1781) berargumen untuk penghapusan halangan perdagangan, menyederhanakan perpajakan dan pasar tenaga kerja dan pertanian yang lebih kompetitif.

Filsuf dan ekonom Skotlandia Adam Smith (1723-1790) menjelaskan, sejalan dengan Montesquieu, tentang bagaimana, dalam banyak kasus, interaksi yang bebas antara individu cenderung menghasilkan hasil yang secara umum lebih menguntungkan - sebuah efek yang dia sebut sebagai tangan tak nampak. Mementingkan diri bisa saja menjadi pendorong kehidupan berekonomi kita, tetapi kita harus menguntungkan pelanggan kita agar mendapatkan keuntungan bagi diri kita sendiri.

Smith bangkit menentang monopoli resmi pemerintah, halangan perdagangan, pajak yang tinggi dan kroniisme memiskinkan antara pemerintah dengan dunia usaha. Dia percaya bahwa pasar yang terbuka dan kompetitif memerdekakan masyarakat umum, terutama para pekerja miskin. Pemikirannya ini sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan dan menuntun

kepada suatu masa yang panjang dari penerapan perdagangan bebas dan pertumbuhan ekonomi.

Rechtsstaat

Sementara itu di Eropa daratan, para pemikir seperti filsuf Jerman Immanuel Kant (1724-1804) mengembangkan prinsip 'negara berkeadilan' atau *Rechtsstaat*, yang akan menjadi dasar pendirian Amerika dan Undang-Undang Dasar Perancis pada akhir abad kedelapan belas.

Kant berargumen bahwa sebuah Undang-Undang Dasar yang tertulis adalah cara untuk mengamankan kehidupan damai secara permanen antara berbagai individu yang majemuk, yang nantinya dia anggap sebagai dasar keadaan umat manusia yang bahagia dan sejahtera. Dia menentang ide Utopis bahwa pendidikan moral bisa menghilangkan pereadaan ini dan membuat tujuan setiap orang menjadi selaras. Negara adalah tentang memungkinkan setiap individu yang majemuk untuk dapat hidup bersama yang saling menguntungkan dan konstitusi (UUD) adalah apa yang menyatukan mereka bersama.

Dalam *Rechtsstaat*, lembaga masyarakat sipil – perkumpulan sukarela seperti klub, masyarakat dan lembaga keagamaan – akan punya peran yang sama dalam memajukan keharmonisan masyarakat. Kekuasaan pemerintah akan dikekang dengan pemisahan kekuasaan, dan para hakim dan politisi akan bertanggung jawab pada dan terikat oleh hukum. Hukum itu sendiri harus dibuat transparan, terjelaskan dan proporsional. Penggunaan pemaksaan akan sangat terbatas hanya pada sistem peradilan. Ujian bagi sebuah pemerintahan adalah

kemampuannya untuk menjaga keteraturan konstitusional yang berkeadilan.

Kesuksesan dan Penilaian Kembali

Sebuah Rumah Baru Bagi Liberalisme Klasik

Thomas Paine mengambil banyak dari ide-ide liberal klasik-nya Locke tentang hak alamiah dan kontrak sosial, dan bahwa pemerintah adalah kejahatan yang diperlukan yang bisa menjadi tidak bisa diterima bila tidak bisa dijaga. Pada Januari 1776 dia merangkai ide-ide ini dalam karya penggugah perang-nya, *Common Sense* (Akal Sehat/Nalar Wajar), menggugat Inggris sebagai pelanggar kontrak terhadap para penduduk Koloni Amerika.

Adalah hal alamiah oleh karenanya, setelah berbagai perselisihan, orang Amerika harus mencari kontrak liberal klasik yang baru antara diri mereka sendiri dengan pemerintah yang mereka ciptakan sendiri. Undang-Undang Dasar Amerika disuntikan dengan berbagai ide-ide Locke tentang hak alamiah yang tak terpisahkan, dan pemisahan kekuasaan pemerintah gayanya Montesquieu.

Abad Ke Sembilan Belas

Tetapi ide-ide radikal liberal klasik kembali pulang ke tanah Inggris. Tahun 1833, aktivis liberal klasik berhasil menghapuskan perbudakan di seluruh Kekaisaran Inggris, dan pada 1843 usaha reformasi mereka tercapai.

Juga di bidang sosial, Ekonom dan filsuf Inggris John Stuart Mill (1806 – 73) melahirkan prinsip ‘tanpa kekerasan’-nya –

bahwa setiap orang harus bebas untuk bertindak semaunya, jika dalam proses tindakannya tidak melukai siapapun. Dia juga berargumen tentang 'ruang pribadi' yang tidak bisa disentuh oleh Negara, dan, mengikuti pemikiran filsuf utilitarian Jeremy Bentham (1746 – 1832), dia berargumen bahwa kebebasan adalah cara terbaik untuk memaksimalkan keuntungan public, atau 'utilitas'.

Dalam bidang ekonomi, Liga Anti *Corn-Law* (Undang-undang di Inggris yang melarang impor bahan pangan pokok), yang berjuang untuk mengakhiri pajak proteksionis yang dikenakan terhadap impor gandum, berkembang menjadi Mazhab Manchester, di mana para tokoh terkemukanya seperti Richard Cobden (1804 – 65) dan John Bright (1811 – 89) mengkampanyekan untuk diberlakukannya kebijakan *laissez-faire* dalam perdagangan, industri, dan tenaga kerja.

Serangan Balik dan Kemunduran

Tetapi, laju industrialisasi yang cepat setelah pertengahan abad sembilan belas memunculkan tantangan bagi liberalisme klasik seperti kondisi kerja yang buruk, stratifikasi kelas, urbanisasi dan kemiskinan perkotaan. Semakin banyak orang-orang yang mendukung intervensi pemerintah untuk mengatur masalah-masalah ini.

Lalu pada abad ke-duapuluh, permusuhan dan saling mengancam di Eropa mendukung terciptanya budaya nasionalistik dan kepercayaan yang lebih besar terhadap peran Negara. Setelah ekspansi masa perang, pemerintah gagal untuk dikerdilkan. Pada 1913, sebelum Perang Dunia I, pengeluaran pemerintah hanyalah 17 persen dari PDB Perancis, 15 persen di Jerman dan 13 persen di

Inggris. Saat ini kurang lebih tiga kali lipat persentasi tersebut dari PDB, dan bahkan lebih dalam angka absolut.

Sementara itu, ketika ilmu alam (fisik) sedang membentuk dunia secara fisik, para ekonom dan sosiolog begitu genitnya berpikir bahwa mereka bisa membentuk masyarakat manusia secara ilmiah. Mereka melihat perencanaan terpusat lebih rasional dari pada ketakteraturan alamiah dari pasar, dengan berbagai eksternalitasnya yang mereka anggap lebih cenderung menciptakan monopoli dan pengangguran. Tidak lagi tanggung jawab pembuktian dibebankan kepada intervensionis, kini liberal klasik-lah yang harus membenarkan tuntutan mereka untuk meminta kebebasan.

Kebangkitan Kembali Liberalisme Klasik Modern

Masalah Kebijakan dan Jawaban dari Liberal Klasik

Tetapi kepercayaan terhadap para intervensionis adalah hasil salah kaprah. Ekonomi digerogeti dengan pengangguran dan inflasi (yang kadang kala, tanpa mampu mereka jelaskan, terjadi secara bersamaan), pertumbuhan ekonomi yang rendah dan krisis perumahan, energi, pinjaman, dan pasar valuta asing ketika pemerintah menetapkan harga atau memanipulasi permintaan dan penawaran. Negara Kesejahteraan menghadapi masalah ketergantungan dan kurangnya insentif. Tampaknya tidak ada cara untuk memperkecil ukuran pemerintah maupun tuntutan yang dia minta dari para pembayar pajak.

Walaupun mereka dalam posisi bertahan, liberal klasik dari berbagai latar belakang telah memikirkan masalah ini untuk jangka waktu yang lama. Mereka kembali ke prinsip liberal klasik lama dan memikirkannya kembali, mengembangkan argumen

baru dan termutakhir yang lebih cocok untuk zaman yang telah berubah. Nantinya, pada 1980-an, revolusi intelektual ini akan menjadi sumber informasi bagi kebijakan para pemimpin dunia seperti Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris.

Perkembangan Intelektual

Ekonom Mahzab (aliran) Austria, dimulai oleh Carl Menger (1840 – 1921), telah mengetahui bahwa ekonomi bukanlah sains tetapi tentang nilai dan tindakan individu. Ekonom Austria seperti Ludwig von Mises (1881 – 1973) dan F. A. Hayek (1899 – 1992) menyadari bahwa pengendalian oleh pemerintah mengacaukan sinyal ekonomi, menciptakan akibat yang tidak bisa diprediksi.

Sementara itu di Chicago, Frank Knight (1885 – 1972) juga menaruh individu di pusat pemikiran ekonominya, menekankan kembali bahwa masyarakat adalah kumpulan individu, tanpa kemampuan berpikir dan memilih-nya sendiri. Milton Friedman (1912 – 2006) berargumen bahwa pemerintah haruslah terbatas hanya pada penciptaan keadaan (seperti kestabilan moneter) dan individu didalamnya bisa membangun kehidupan sosial dan ekonominya sendiri. Ronald Coase (1910 – 2013) menemukan bahwa pasar bisa menyelesaikan masalah seperti polusi, sementara intervensi pemerintah hanya sekedar memperburuk keadaan.

Pada 1947 Hayek mengumpulkan para ekonom, sejarawan dan ilmuwan politik dalam sebuah konferensi untuk memperdebatkan beberapa tantangan penting yang dihadapi oleh liberalisme klasik pada era pasca-perang. *The Mont Pelerin Society* (Perkumpulan Mont Pelerin), sebagaimana nantinya dia disebut,

kemudian berkembang menjadi beberapa ratus anggota, termasuk pemenang hadiah Nobel dan tokoh berpengaruh lainnya. Kelompok ini sampai saat ini tetap menjadi pusat ide-ide dan debat liberal klasik.

Perkembangan pasca-perang lainnya adalah Mazhab Pilihan Publik, yang menjadi terkenal lewat James M. Buchanan (1919 – 2013) dan Gordon Tullock (1922 – 2014) di Universitas Virginia. Mereka berhasil menunjukkan bahwa, sementara ekonom arus utama (pada umumnya) membicarakan tentang *kegagalan pasar* dan mempergunakan analisa biaya-manfaat (*cost benefits analysis*) untuk menciptakan kebijakan yang ‘rasional’ demi ‘kepentingan publik’, mereka melupakan tentang *kegagalan pemerintah*. Hal ini ditunjukkan lewat ketidaksempurnaan proses politik atau kepentingan diri dari mereka yang terlibat dalam prosesnya.

Pemilihan umum, contohnya, bukanlah ujian bagi ‘kepentingan publik’ tetapi sebuah kontes kompetisi kepentingan; kekuasaan mayoritas 50%+1 membuatnya mudah untuk mengeksploitasi minoritas; politisi harus menyenangkan kelompok kepentingan agar terpilih, dan para pelobi menggunakan ini untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri; dan para pejabat yang melaksanakan kebijakan memiliki kepentingan diri mereka sendiri pula. Kesimpulannya, liberal klasik telah mengetahui, bahwa pembuatan keputusan pribadi pada umumnya lebih baik dari pada pembuatan keputusan politik – yang harus dibatasi pada hal yang memang hanya diperlukan demi melindungi kebebasan individual.

Perbedaan dalam Pemikiran Liberal Klasik

Liberal klasik memiliki berbagai jenis pandangan tentang peran Negara, masing-masing dengan pandangan yang berbeda dalam mengizinkan keterlibatan pemerintah dalam penyediaan kesejahteraan sosial dan barang publik, bagi yang lain, dengan pandangan yang lebih *libertarian*, yang akan membatasi peran ini menjadi sangat kecil. Tetapi pemerintahan yang kecil tidak berarti masyarakat yang kecil dan kacau.

Filsuf Amerika Robert Nozick (1938 – 2002), sebagai contoh, berpendapat bahwa Negara yang minimal, hanya untuk perlindungan keamanan saja. Negara seperti ini hanya menyediakan kerangka aturan yang aman di mana orang-orang bisa menciptakan surga kecil-nya masing-masing, berkumpul bersama dan membentuk komunitas, bekerja sama dan memutuskan kebebasan mana yang bisa mereka serahkan sebagai kompensasi dari layanan yang mereka terima dari kelompok yang mereka pilih. Liberal klasik yang kurang *libertarian* akan tidak bersetuju dengan ini; walaupun mereka akan merindukan suatu jenis masyarakat yang majemuk dan dinamis yang dicita-citakan oleh Nozick.

LIBERALISME KLASIK DAN KEBEBASAN

Argumen untuk Kebebasan

Ada rentang spektrum pilihan pemikiran yang lebar dalam pandangan liberal klasik tentang peran negara. Meski demikian, semua memberikan prioritas bagi kebebasan dalam kehidupan pribadi, ekonomi dan sosial, dan mempertahankan hak setiap orang atas kehidupan, kebebasan, kepemilikan pribadi dan mengejar kebahagiaan. Tetapi mereka memiliki alasan yang berbeda-beda dalam kepercayaan terhadap prinsip-prinsip ini.

Kebebasan sebagai Kebaikan itu Sendiri

Banyak yang melihat kebebasan sebagai baik, layak dikejar dalam kebebasan itu sendiri. Ketika diberikan pilihan, banyak orang memilih untuk menghidupi kehidupan mereka dalam caranya masing-masing, dari pada diatur oleh orang lain. Mereka menginginkan pilihan pribadi dan otonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa orang-orang menghargai nilai kebebasan; jadi dengan memperbesar kebebasan dan mengurangi pemaksaan, kita memajukan kesejahteraan individu, sehingga memajukan juga kesejahteraan masyarakat.

Hak Alamiah

Tema yang sering muncul di antara liberal klasik, dari John Locke sampai pada para pendiri negara Amerika seperti Thomas Jefferson (1743 - 1826) dan hingga saat ini, adalah pemikiran

bahwa setiap individu memiliki hak alamiah. Hak alamiah ini mereka lihat sebagai bagian penting dari kemanusiaan yang tidak bisa diserahkan dan dalam keberadaannya, ia tidak bergantung pada hukum atau pemerintah.

Hak alamiah kita, kata mereka, tidak datang dari hukum, adat, agama, kepercayaan, budaya atau pemerintah, tetapi hadir secara alamiah dalam diri manusia. Mereka bersifat universal dalam diri kita, dan tidak bisa dipisahkan - kita tidak bisa menjualnya, melepaskannya atau menolaknya karena mereka adalah bagian dari kemanusiaan kita.

Ada perbedaan pandangan tentang hak-hak inti ini, walaupun Locke berbicara bagi banyak orang ketika dia membuat daftar hak tersebut; hidup, kebebasan dan hak milik, orang punya hak untuk hidup, dan untuk berbuat apa yang dia pilih asalkan tidak melanggar hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain, dan untuk menikmati apa yang mereka ciptakan atau dapatkan lewat pemberian atau perdagangan - dan bukan lewat paksaan. Sebagai bagian penting dari diri kita, kita tidak bisa melepaskannya. Kita tidak bisa menjadikan diri kita budak, karena itu berarti pelanggaran hak kita sendiri, kita tidak bisa mencoba untuk memberikan hal yang tidak bisa kita berikan. Dan begitu pula tidak ada hukum yang bisa membuatnya diberikan atau diambil oleh orang lain.

Ide hak alamiah ini, yang dinikmati oleh setiap orang, menantang apa yang dianggap sebagai hak ilahiah para raja; dan para penghuni koloni Amerika mengutip bahwa usaha pemerintah Inggris untuk menindas hak dasar mereka, sebagai pembenaran untuk pemberontakan mereka terhadap tindakan Inggris ini.

Alur pemikiran ini mengangkat kebebasan diatas segalanya. Karena untuk adanya hak, pertama harus ada kebebasan, karena jika kita tidak bebas bertindak, kita tidak bisa mempraktekan hak kita yang lain (selain kebebasan berpikir, yang tidak bisa dicegah oleh siapapun). Kebebasan adalah kondisi penting yang memungkinkan kita mempraktekan hak kita, dan keadaan di mana hak ini dihormati.

Kontrak Sosial

Filsuf politik Inggris Thomas Hobbes (1588 - 1679) berargumen bahwa setiap apa yang disebut sebagai hak dan kebebasan akan menjadi nilai palsu di dalam dunia dimana kebrutalan tidak bisa dikekang; untuk hidup dalam damai, kita harus menerima adanya batasan dalam diri kita dan menciptakan hak-hak sipil dan tanggung jawab. Locke merunutkan metode kontrak sosialnya, dengan berargumen bahwa dalam dunia yang secara alamiah bebas, individunya merdeka, tidak ada yang punya hak untuk memerintah diatas orang lain, tetapi jika setiap orang bersetuju untuk menciptakan dan menghormati otoritas sipil yang bisa membatasi kekerasan, mereka bisa membuka kesempatan baru dan dengannya memperluas kebebasan mereka. Yang paling mutakhir belum lama ini, filsuf Amerika John Rawls (1921 - 2002), dengan pendekatan yang sama, berargumen bahwa, jika diberikan kesempatan untuk menciptakan masyarakat yang baru dan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dalam hidup, orang-orang akan memilih untuk membuat sebuah kontrak sosial yang hanya mengijinkan kesenjangan antara hasil yang didapatkan masing-masing, hanya jika kesenjangan tersebut menguntungkan mereka yang paling dirugikan.

Tidak ada diantara para pemikir kontrak sosial yang bisa menunjukkan bahwa pernah ada suatu saat dalam sejarah dimana ada individu bebas, merdeka yang memang benar-benar menandatangani sebuah perjanjian kontrak. Teori mereka murni sekedar 'eksperimen pikiran' untuk menjelaskan alasan-alasan yang mendukung adanya pemerintah.

Tetapi, hasilnya selalu tampaknya hanya untuk membenarkan pandangan mereka sendiri. Kontrak sosial-nya Hobbes, contohnya, menghendaki adanya sistem kerajaan yang kuat - hal yang digoyahkan oleh perang sipil Inggris - sementara para pemikir revolusioner Perancis Jean-Jacques Rousseau (1712 - 78), sebaliknya, mendasarkan kontrak sosialnya pada nilai kebaikan republikan. Bagi Locke, otoritas politik (pemerintah) tercipta hanya lewat izin dari mereka yang diperintah, yang oleh karenanya memiliki hak untuk memberontak jika 'kontrak' dilanggar - sehingga membenarkan penggulingan James II. Sistem-nya Rawls, di sisi lain, mencerminkan pandangan politik yang lebih egalitarian pada zamannya.

Pemberontakan Amerika mengambil ide pentingnya dari teori kontrak-nya Locke, dan *Bill of Rights* (undang-undang hak asasi manusia) Amerika sangat dasari oleh pandangan hak alamiah. Tetapi teori sosial kontrak tidaklah serta merta didasari pada adanya hak alamiah; pandangan Hobbes contohnya, adalah sekedar tawaran metode untuk mengurangi konflik.

Teori sosial kontrak mencoba untuk mengidentifikasi dasar rasionalisasi keberadaan pemerintah. Tetapi pada kenyataannya, hidup tidak seindah itu. Kita adalah makhluk sosial, tetapi kita bisa punya banyak pandangan yang bertentangan tentang apa itu yang termasuk masyarakat yang baik - sehingga tidak ada 'persetujuan

rasional' yang tampaknya bisa tercipta. Dan ketika setiap orang mencoba untuk menciptakan yang mereka anggap sebagai masyarakat 'rasional', hasilnya selalu malapetaka. Revolusi Perancis, didasarkan pada rancang bangun karya Rousseau, menunjukkan kepada Eropa bagaimana teror yang bisa tercipta dari pemikiran seperti ini.

Sejarah dan Kemajuan

Ada beberapa liberal klasik, seperti Mill dan ilmuwan politik kontemporer Amerika Francis Fukuyama (1952-) melihat kebebasan sebagai bagian dari perjalanan ke arah kemajuan - keuntungan ekonominya (memungkinkan individu-individu untuk berinovasi, bekerja sesuai pilihan mereka, mengumpulkan modal dan menciptakan kekayaan) dan keuntungan sipil-nya (keadilan, keamanan dan pemerintahan perwakilan) adalah begitu jelas sehingga akan tidak bisa dihindari kebebasan akan diterima oleh lebih banyak manusia. Mungkin ada benarnya; tetapi kita harus mengingat bahwa ada kecenderungan kuat pula ke arah yang sebaliknya.

Utilitas Publik

Ada pula liberal klasik lainnya, termasuk pemikir Pencerahan Skotlandia Adam Smith dan David Hume (1711-1776), yang menekankan tentang keuntungan publik secara umum yang dihasilkan oleh kebebasan. Kebebasan, jelas mereka, sangat memperluas pilihan yang dimiliki oleh individu, dan individu jauh lebih baik dalam melakukan penilaian mereka sendiri tentang tujuan dan cara yang tepat dibandingkan otoritas penguasa.

Sehingga, 'pilihan' memajukan kesejahteraan individu-individu dan, sebagai hasilnya, kesejahteraan masyarakat secara umum.

Para liberal klasik mula-mula ini tidak melihat adanya pertentangan antara kebebasan individu dengan kesejahteraan masyarakat 'seakan-akan oleh sebuah tangan tak nampak', kata Smith, yang satu menciptakan yang lain. Tetapi mereka tahu bahwa hubungan yang tepat adalah sangat kompleks, rentan dan tidak sempurna. Kita tidak bisa sekedar bersandar pada prinsip kasihilah sesamamu: kepentingan diri, sebuah emosi yang jauh lebih kuat, perlu disalurkan kearah yang produktif. Sehingga untuk menghindari saling melukai dan menjaga keharmonisan diperlukan tuntunan lewat peraturan etika, adat dan tradisi, juga sedikit pemaksaan lewat hukum dan sistem peradilan.

Bagi para pemikir ini, adalah kebebasan yang menciptakan utilitas (kegunaan) publik, bukan sebaliknya. Bentham, sebaliknya, berargumen bahwa hak asasi tidak berarti apa-apa jika tidak disokong oleh kekuatan hukum; hak alamiah adalah 'tidak masuk akal' dan hak alamiah yang tak bisa dipisahkan (direnggut dari pemiliknya) adalah 'lebih tidak masuk akal lagi'. Hal yang sama, pakar hukum Amerika Oliver Wendell Holmes Jr. (1841-1935) berargumen bahwa hak asasi seperti kebebasan berpendapat diciptakan oleh pemerintah, dan diizinkan hanya karena dia baik (menguntungkan) bagi masyarakat secara keseluruhan.

Banyak liberal klasik merasa *ngeri* dengan alur pemikiran seperti ini. Menurut pemikiran ini pemerintah bisa memutuskan hak kita semauanya; dan bahwa para penguasa kita memiliki hak khusus diatas kita, yaitu hak untuk memutuskan hak apa yang kita seharusnya miliki; dan bahwa tidak ada hak asasi kecuali apa yang

dipilih untuk diizinkan oleh kelompok mayoritas. Hal ini, khawatir mereka, membuat minoritas sama sekali tak terlindungi.

Ekspresi Individualitas

Mill, Smith dan Hume mengembangkan ide ini lebih lanjut, bahwa kebebasan membuat orang-orang bisa mengekspresikan kepribadian dan kemajemukan mereka. Bahwa hal ini menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan, membuka terciptanya spesialisasi (pembagian kerja) dan kesempatan. Tetapi yang lebih penting adalah dimensi moral. Orang-orang tidak bisa secara utuh menjadi manusia, atau bisa membuat penilaian, perasaan manusiawi atau tanggung jawab moral, jika orang lain yang mengendalikan semua tindakannya.

Individualisme Metodologis

Sebagaimana yang telah kita lihat, liberal klasik melihat individu sebagai lebih penting dari pada kolektif, karena kolektif tidak punya kehidupan melebihi kehidupan individu. Manusia mungkin saja makhluk sosial, tetapi mereka berpikir dan bertindak sebagai individual.

Orang-orang memperbincangkan tentang 'kepentingan publik', tetapi pada kenyataannya tidak ada perhitungan matematis yang bisa kita pakai untuk membandingkan pengorbanan kepentingan satu orang dibanding yang lainnya. Kerugian (contohnya, kekecewaan, marah atau derita) yang kita timpakan pada seseorang dan keuntungan (seperti kebahagiaan atau kesenangan) yang kita sebabkan pada orang lain adalah emosi manusia yang tidak bisa diukur. Jadi kita tidak bisa membenarkan

pengorbanan kebebasan seorang individu demi suatu perkiraan keuntungan yang tak bisa terukur dari suatu kelompok.

Adalah benar bahwa kehidupan kita sebagai makhluk sosial membentuk pola pandang dan nilai kita. Kita punya ikatan sosial dan insting yang mendorong kita untuk menolong dan menyenangkan orang-orang disekitar kita, lebih khusus mereka yang dekat dengan kita. Dan kita menerima lembaga sosial, adat istiadat, sikap-sikap dan peraturan moral yang pada umumnya menguntungkan kita, karena hal-hal ini memungkinkan kita untuk memprediksi dengan tingkat keakuratan tertentu bagaimana orang lain akan bersikap, sehingga memungkinkan kita untuk membuat perencanaan dan keputusan yang lebih baik. Tetapi lembaga-lembaga dan keteraturan-keteraturan ini adalah akibat tak disengaja dari tindakan-tindakan individual; adalah sebuah kepongahan untuk membayangkan bahwa kita bisa secara sadar mengendalikan tindakan berbagai individu dan berpikir bahwa hal ini bisa menghasilkan hasil yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kebebasan Positif dan Negatif

Kebebasan liberal klasik adalah secara esensial negatif. Maksudnya adalah tentang tidak dikekang oleh ancaman, paksaan atau campur tangan orang lain - lebih khusus, orang lain atau lembaga-lembaga seperti pemerintah, yang mereka ciptakan. Kebebasan jenis ini bukanlah tentang suatu bentuk pembatasan secara fisik - seperti ketidakmampuan kita untuk melompat 5 meter ke udara, sebagaimana yang dinyatakan oleh filsuf Isaiah Berlin (1909 - 1997).

Tetapi beberapa pemikir mendukung pendekatan positif terhadap kebebasan. Untuk secara utuh merdeka, menurut mereka, kita harus memiliki kekuatan dan sumberdaya untuk menjalankan kebebasan kita. Jika anda terlalu miskin untuk memiliki Rolls-Royce, anda sulit untuk 'bebas' memilikinya. Dan lebih gamblang lagi, jika anda seorang pecandu anda tidak bebas, untuk bebas, tindakan anda mesti bukan sekedar tindakan anda, tetapi juga harus tindakan yang dipikirkan dan dipertimbangkan.

Tentu saja, kita semua ingin mengurangi keduanya; keterbatasan fisika dan manusiawi yang mengekang kebebasan bertindak. Oleh karenanya kita menciptakan obat-obatan yang meredakan nyeri sendir dan mesin yang memungkinkan kita terbang. Tetapi liberal klasik sangat berhati-hati dalam menerima ide kebebasan positif. Sebagai awal, sebagaimana yang dijelaskan Hayek, jangan kita mencampuradukan antara kebebasan dan kemampuan. Anda tentu saja bebas untuk memiliki sebuah mobil Rolls-Royce - tidak ada orang atau hukum yang menghalangi anda - tetapi anda mungkin tidak punya kemampuan (daya beli) untuk melakukannya. Anda mungkin bebas untuk melompat 5 meter ke udara - tidak ada orang yang akan mencoba menghentikan anda - tetapi anda mungkin tidak punya cukup kemampuan otot untuk mencapainya.

Liberal klasik juga khawatir bahwa pendekatan kebebasan positif menaruh terlalu banyak kepercayaan pada rasionalitas dan objektivitas dari suatu otoritas manusia. Terlalu sering, beberapa pemerintahan atau kelompok elit mengklaim bahwa, seperti mereka yang pikirannya sedang dipengaruhi oleh obat-obatan, kita-kita ini tidak bisa 'sepenuhnya' melihat apa yang terbaik untuk kepentingan kita - dan mereka (pemerintah) yang harus

memutuskannya untuk kita. Hal ini adalah menganggap enteng publik, yang pada umumnya punya daya tangkap yang lebih baik tentang apa kepentingan mereka ketimbang siapapun pejabat yang sebenarnya jauh dari kehidupan sehari-hari anggota publik tersebut; hal ini juga telah digunakan untuk membenarkan berbagai jenis proyek perancangan sosial yang tentu saja terbukti berujung malapetaka.

Hak dan Kebebasan

Ada perbedaan yang sangat tipis antara hak dan kebebasan, dan mungkin paling baik ditunjukkan dengan cara melihat lawan kata dari keduanya. Lawan dari kebebasan adalah perbudakan - dikekang oleh orang lain. Lawan dari hak adalah kewajiban - ikatan wajib atau klaim terhadap orang lain. Oleh karenanya kita menyebut kebebasan nurani, karena tidak ada orang yang bisa mencegah anda untuk berpikir untuk diri anda sendiri dan karena pikiran bebas anda tidak menimbulkan kewajiban terhadap orang lain. Tetapi kita menyebut hak untuk hidup, karena keberadaan fisik membebankan sebuah tanggungjawab legal atau moral kepada orang lain untuk menghormatinya dan tidak mencederai atau mengakhiri hidup tersebut. Demikian juga, anda bebas untuk memperoleh properti melalui perdagangan yang damai dengan orang lain, dan anda punya hak untuk mendapatkan dan menikmati properti tersebut tanpa dicuri oleh orang lain.

Liberal klasik cenderung berpikir bahwa hak ada sebelum pemerintah - hukum yang ditetapkan pemerintah bisa membantu memperkuat dan menjaganya, tetapi tidak ada pemerintah yang bisa membatalkannya, tidak peduli walau seberapa besar kelompok mayoritas yang ingin membatalkannya. Sebagaimana

kata Mill, kita harus punya hak untuk berbicara secara bebas, bahkan jika semua orang tidak bersetuju dengan kita; hak bukanlah subyek dari sekedar angka.

Meski demikian, adalah sulit secara pasti menentukan seharusnya berapa jumlah tepat dari hak-hak ini. Liberal klasik adalah pendukung setia hak kepemilikan properti, tetapi, mengambil contoh dari ekonom Amerika Milton Friedman (1912 - 2006), apakah kepemilikan sebidang tanah berarti berhak melarang saya untuk menerbangkan pesawat udara jauh diwilayah langitnya? (Atau saat ini, kita bisa contohkan, perusahaan melakukan pengeboran dibawahnya?) Pada kenyataannya hak-hak ini harus dimurnikan lewat perdebatan publik dan didefinisikan lewat pengadilan.

Beberapa hak dengan jelas lebih utama dari hak-hak lain. Sebagaimana Mill jelaskan, hak anda untuk melenggangkan tinju berhenti dihidungku; sedangkan hak anda untuk mengeluarkan pendapat tidak cukup luas untuk membiarkan anda membahayakan keamanan orang lain dengan teriakan bohong "kebakaran!" di tengah kerumunan dalam teater. Tetapi sekali lagi, sebagaimana Hayek tanyakan, apakah hak kepemilikan atas sebuah sumur di tengah padang gurun berarti anda bisa menolak memberi air bagi seorang yang sedang sekarat kehausan - atau apakah itu melanggar hak mereka untuk hidup? Tampaknya ini adalah masalah opini masing-masing; tetapi liberal klasik melihat adanya bahaya yang besar dengan membiarkan 'hak' kita diputuskan oleh pandangan kaum mayoritas.

Kekangan untuk Kebebasan

Pertanyaan inti bagi liberal klasik, dengan demikian, adalah hal apa, jika ada, yang membenarkan membatasi kebebasan tindakan seseorang - dan pertanyaan lebih lanjut siapa yang memutuskan, dan bagaimana.

Ini akan mudah dijawab jika kita bisa mengukur jumlah total kepentingan orang-orang dan memutuskan atas dasar apa kita menghasilkan nilai yang tertinggi. Tetapi nilai yang dipegang manusia bersifat pribadi dan subjektif - dan tidak bisa dijumlahkan dengan cara seperti ini. Kita memberikan pemerintah monopoli akan kekuasaan adalah agar mereka bisa membuat dan memaksakan keputusan seperti ini. Kita tidak bisa secara aman membiarkan proses ini seutuhnya ditangan pejabat negara karena mereka juga memiliki kepentingan subjektif yang tidak bisa tidak akan mengkontaminasi keputusan mereka.

Apa yang disetujui bersama oleh liberal klasik adalah bahwa beban pembuktian haruslah pada mereka yang ingin mengintervensi kebebasan. Tidak boleh ada penggunaan pemaksaan untuk mengekang kebebasan seseorang kecuali jika telah bisa dibenarkan secara jelas dan rasional. Jika tidak, kita harus membiarkan orang-orang menjalankan kehidupan mereka sendiri. Mereka bisa saja berbuat salah, tetapi meski demikian adalah lebih baik kita memiliki hak dan kebebasan kita dari pada harus bersandar pada belas kasihan para politisi yang jauh, kurang informasi, mementingkan diri dan berpikiran dangkal.

MORALITAS LIBERAL KLASIK

Pemaksaan dan Toleransi

Liberal klasik bersetuju bahwa pemaksaan pada umumnya tidak diinginkan. Mengizinkan orang-orang untuk memberlakukan kehendak mereka terhadap orang lain lewat agresi, pengancaman, intimidasi atau kekerasan tidaklah bisa menghasilkan masyarakat yang baik. Tidak peduli apakah itu oleh individu atau pemerintah yang menggunakan pemaksaan, jika kita bisa menghindarinya, kita harus menghindarinya.

Tetapi, akan selalu ada konflik diantara para orang-orang merdeka. Mereka akan tidak bersetuju tentang hal kepemilikan, dan tindakan satu orang bisa merugikan yang lain. Sehingga dengan maksud untuk mempertahankan kedamaian dan mengurangi kekerasan, kita memerlukan sistem peradilan yang tidak berpihak yang menyelesaikan perselisihan dan mencegah agresi. Tetapi kita tidak bisa berharap bahwa orang-orang akan secara sukarela menghormati dan menuruti keputusan peradilan ini; untuk menjaga perdamaian, tidak bisa tidak, kita perlu memerlukan penggunaan beberapa kekuatan memaksa yang sangat tidak disukai oleh para liberal klasik.

Liberal klasik meyelesaikan dilema ini dengan memberikan monopoli pemaksaan kepada negara - sebuah lembaga yang sangat mereka cemaskan, tetapi yang mereka harapkan akan lebih kurang bersemangat dalam menggunakan pemaksaan dibandingkan dengan jika orang biasa dibiarkan menjalankan pemaksaan itu sendiri.

Mencederai, Bukan Tidak Menyetujui

Jadi keadilan membutuhkan pemaksaan; tetapi pemaksaan memerlukan pembenaran. Dan bagi liberal klasik, penggunaan yang tepat dari pemaksaan yang terlembaga ini mereka izinkan hanya untuk hal yang sangat khusus; untuk mencegah orang mencederai atau mengancam orang lain - itu saja, dan untuk meminimalkan penggunaan kekerasan dan koersi pada umumnya. Tetapi untuk dibenarkan oleh liberal klasik, dia haruslah bahaya yang memang nyata, atau ancaman bahaya nyata bagi orang lain. Liberal klasik berpegang teguh bahwa pemaksaan tidaklah boleh digunakan terhadap individu hanya karena kita tidak menyetujui keadaan atau tindakan mereka.

Kita bisa saja jijik terhadap agama orang lain, menolak pandangan politik mereka, menajiskan cara hidup mereka, mengutuk cara hidup mereka, menolak tingkah laku dan tabiat mereka. Kita bisa terkejut dengan ide dan opini mereka. Kita bisa saja bahkan khawatir bahwa mereka bisa merusak kesehatan mereka sendiri dengan obat-obatan atau merusak masa depan mereka karena sikap anti sosial mereka. Tetapi tidak ada satupun hal diatas yang bisa menjadi alasan sah untuk penggunaan kekuasaan demi membuat mereka bertindak secara berbeda. Liberal Klasik percaya bahwa kepercayaan, sikap, cara hidup atau pilihan moral orang tidak layak mendapatkan larangan menggunakan kekuatan memaksa negara. Kita bebas untuk mencoba menolong mereka - contohnya mengatasi kecanduan narkoba - tetapi jika tindakan mereka tidak memakan korban selain diri mereka sendiri, kita tidak bisa dibenarkan menggunakan kekerasan.

Tetapi liberal klasik sangat skeptis dengan argumen bahwa orang-orang harus 'dididik' agar membuat pilihan yang 'berarti' atau 'tepat'. Tentu saja, orang-orang yang mendapatkan informasi yang lebih baik - seperti resiko yang didapatkan dari penggunaan narkoba, atau jumlah kalori dalam makanan - membuat pilihan yang lebih baik. Tetapi liberal klasik percaya bahwa kebanyakan orang mendapatkan informasi lebih baik dibandingkan apa yang dibayangkan para intervensionis (orang atau pemerintah yang mencampuri urusan orang lain dan memaksakan kehendaknya). Mereka tentu saja lebih mengetahui tentang tujuan, kesempatan dan keadaan pribadi mereka sendiri dibandingkan politisi manapun. Dan tidak peduli seberapa banyak informasi yang mereka punya, pilihan akhir mereka tetaplah urusan pertimbangan pribadi mereka sendiri, dan bukan sesuatu yang obyektif 'benar' atau 'tidak benar'. Liberal klasik khawatir bahwa terlalu sering argumen 'mendidik' digunakan oleh para intervensionis sebagai cara untuk memaksakan nilai mereka sendiri terhadap pilihan orang lain.

Argumen Mendukung Toleransi

Liberal klasik punya banyak alasan, apakah itu moral atau praktis, untuk menekankan pentingnya toleransi.

Biaya dan Bahaya

Pertama adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk mencoba membujuk orang lain merubah kepercayaan dan tata cara yang mereka puja. Biayanya bisa saja finansial, seperti besarnya biaya untuk mengumpulkan bala tentara, pertahanan dan pajak yang harus dibayar selama masa perang salib pada abad pertengahan.

Atau bisa saja ada biaya manusia, seperti penyiksaan terhadap orang Kristen mula-mula oleh pemerintahan Romawi, penyiksaan umat Protestan pada zaman Reformasi, dan pembunuhan orang-orang Muslim oleh Kristen Serbia pada tahun 1990-an.

Seperti yang dijelaskan oleh filsuf Perancis Montesquieu (1689-1755), akan lebih besar kemungkinan terciptanya perdamaian jika kepercayaan agama bukanlah urusan politik. Dan tentu saja perbedaan politik telah memakan korban jiwa manusia yang besar juga. Hanya dalam satu abad, kita telah melihat pembantaian dalam dua perang dunia, pembersihan Stalin di Uni Soviet, revolusi budaya-nya Mao, pembunuhan masal para penentang rezim Khmer Merah, dan banyak lagi.

Apakah ada hal yang dihasilkan dari semua biaya ini? Dan ketika orang tentu saja diteror, adalah hampir tidak mungkin merubah kepercayaan yang telah mendalam. Dan bagaimana kita bisa tahu jika kita memang berhasil? Sebagaimana kata ratu Elizabeth I (1533 - 1603) dari Inggris, kita tidak bisa 'membuat jendela untuk mengintip jiwa manusia'. Dan tidak layak juga kita mencobanya, seperti kata Jefferson, karena tidak ada yang dirugikan dan dicerderai dengan adanya perbedaan agama maka: 'Kekuasaan pemerintah terhadap hal seperti ini hanya mencederai orang lain. Adalah sama sekali tidak melukai saya jika tetangga saya berkata bahwa dia punya dua puluh Tuhan, atau tidak ada Tuhan. Hal ini tidak merampok kantong saya maupun mematahkan kaki saya.'

Kepentingan yang Beragam

Argumen kedua liberal klasik untuk toleransi adalah bahwa kita tidak bisa membenarkan penggunaan kekerasan untuk merubah

kepercayaan, gaya hidup atau moralitas orang lain, ketika kita juga tidak bisa bersetuju dengan apa yang bisa dan tidak bisa diterima, yang bisa dan tidak bisa ditoleransi. Sebagaimana argumen Kant, ketika orang-orang tidak bersetuju tentang apa yang bisa ditoleransi, kita sebenarnya hanya perlu mencoba membenarkan pandangan kita terhadap orang lain, dan bukannya mencoba memaksakannya kepada mereka.

Isaiah Berlin, menjelaskan bahwa masing-masing individu memiliki nilai yang berbeda – seperti keamanan, otonomi, keluarga, kekayaan dan kenyamanan – dan masing-masing menaruhnya dalam prioritas yang berbeda-beda pula. Sehingga adalah sangat-sangat rasional bagi mereka untuk memilih cara hidup yang berbeda-beda. Sama sekali tidak ada cara yang objektif dalam memutuskan apakah nilai seseorang itu lebih pantas atau kurang pantas, atau apakah perbedaan ranking nilai tersebut lebih baik atau buruk. Bahwa adalah sekedar masalah perbedaan opini apakah kekayaan lebih diinginkan dari pada kenyamanan, atau keluarga lebih penting dari pada keamanan. Dalam dunia dimana tujuan masing-masing orang sebegitu majemuk-nya, tidak ada yang bisa membuat satu pilihan yang baik bagi semua orang.

Daripada mencoba memaksakan pandang kita terhadap orang lain, liberal klasik berkata bahwa kita harus menerima bahwa orang lain adalah makhluk moral, yang membuat pilihan yang juga sama layak mendapatkan rasa hormat. Kita mungkin tidak selalu bisa menyukai mereka tetapi kita harus menghormati mereka, dan mereka sebaliknya harus menghormati pilihan yang kita ambil.

Keuntungan dari Keberagaman

John Stuart Mill berargumen bahwa satu-satunya pembenaran untuk tindakan turut campur terhadap orang lain adalah untuk mencegah mereka mencederai atau ancaman pencederaan; tetapi perbedaan opini sama sekali tidak mencederai orang-orang yang bertoleransi. Bahkan sebenarnya, Mill berpikir bahwa ada banyak alasan positif mengapa kita seharusnya harus menyambut baik perbedaan opini seperti ini, dan bukannya menyensor-nya. Individualitas, originalitas, inovasi, dan keragaman ide, menurut dia, mempercepat kemajuan umat manusia.

Dan jika ada yang mengekspresikan opini yang jelas-jelas salah di pandangan orang lain, dia tetap membawa dampak menguntungkan. Bisa saja, setelah dipertimbangkan, hal tersebut ternyata benar, atau mengandung beberapa unsur kebenaran dan kebijaksanaan yang membantu memajukan pengetahuan publik. Bahkan walaupun kelihatannya salah total, tetap saja dia bisa menyediakan tantangan yang berguna bagi opini yang sudah ada, yang, bila hanya diterima begitu saja, akan berubah menjadi dogma kosong. Sebagaimana selidik Oliver Wendell Holmes, ujian terbaik bagi kebenaran adalah sebuah pasar ide-ide.

Keberagaman dan Perkembangan Moral

Argumen lebih lanjut untuk mendukung toleransi adalah perkembangan moral individu. Filsuf dan diplomat asal Prussia Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835), contohnya, berargumen bahwa tujuan tertinggi dari insan manusia adalah mengembangkan diri: jadi setiap orang harus punya kebebasan sebesar mungkin dan berbagai pengalaman yang bisa diambil darinya. Negara sebaiknya hanya sekedar mengambil peran

penjaga-malam, melindungi kita dari pelanggaran hak, tetapi tidak turut campur dalam usaha pengembangan diri kita.

Mill punya pandangan moral yang hampir sama. Turut campur dalam tindakan orang lain, dia berargumen, menghambat perkembangan mereka sebagai makhluk moral. Mereka tidak akan pernah bisa belajar dan berkembang dari usaha mengambil tanggungjawab dari pilihan mereka kecuali jika mereka membuat pilihan mereka sendiri. Kita tidak bisa menghormati mereka sebagai manusia yang terpuji dan bermoral jika orang lain yang menuntun setiap tindakan mereka; mereka akan lebih mirip robot dari pada manusia.

Hasil yang Melenceng

Hal lainnya adalah kebijakan yang intoleran pada umumnya tidak pernah berhasil, atau memiliki dampak yang tidak diinginkan, atau sebenarnya mencapai kebalikannya dari apa yang pembuatnya inginkan.

Contoh nyata yang kedua diatas adalah akibat tidak diinginkan dari era Pelarangan Minuman Keras di Amerika Serikat (1920 - 33). Dilatarbelakangi sebagian besar oleh ketidaksetujuan moral terhadap alkohol dan budaya saloon (tempat minuman keras dihidangkan), Pelarangan membuat perdagangan miras berpindah menjadi bisnis bawah tanah, membuat mereka yang mau menjualnya menjadi pelanggar hukum. Hasilnya adalah meningkatnya kekerasan antar geng, korupsi diantara para polisi dan pejabat publik, dan meluasnya rasa tidak hormat terhadap hukum yang tidak bisa ditegakkan dengan benar.

Pelarangan lainnya terhadap pilihan gaya hidup telah memiliki dampak yang sama, seperti munculnya kartel narkoba,

perang wilayah dan perdagangan manusia. Dan menjadi lebih sulit untuk mengatasi masalah sebenarnya yang diciptakan dari aktifitas-aktifitas ini (seperti penyakit meluar seksual dan kecanduan), justru karena mereka telah terdorong menjadi usaha bawah tanah, diluar jangkauan pihak berwajib. Orang biasa yang taat hukum berubah menjadi kriminal, harus berurusan dengan kriminal, dan diletakan dalam keadaan berbahaya karena tidak adanya pengendalian kualitas atau perlindungan konsumen yang sebenarnya bisa mereka dapatkan dalam pasar yang legal. Sementara itu, sumber daya untuk penegakan hukum ini sebenarnya adalah pengalihan dari kegiatan lain yang bisa dipakai untuk mencegah hal-hal yang memang bisa mencelakakan orang.

Ketiga, ada banyak contoh dari kebijakan tidak liberal yang menghasilkan dampak sebaliknya dari yang diinginkan. Sebagai contoh, usaha untuk mencegah diskriminasi di tempat kerja dan memastikan bahwa kemampuan secara benar diakui telah menuntun kepada 'diskriminasi positif', dengan orang-orang dipekerjakan untuk memenuhi kuota, dan bukannya karena kemampuan. Sistem pendidikan di negara bagian AS yang dirancang untuk mencegah keompok agama atau politik memenangkan pikiran para orang muda, telah berubah menjadi monopoli di mana tidak ada atau hanya sedikit jalan keluar dari cara berpikir ortodoks yang sudah mapan. Hal yang sama, penindasan agama atau politik hanya menjadi tumpukan kekesalan yang nantinya membuncah menjadi tindakan kekerasan terhadap para penindas. Dan lebih buruk, dogma politik dari sebuah negara yang terlalu kuat, seperti Uni Soviet yang telah runtuh, telah mengekang kemajuan pribadi, sosial, dan ilmu pengetahuan selama berpuluh-puluh tahun.

Lereng yang Licin

Ketika kita menggunakan kekuatan memaksa dari negara untuk menindas ide-ide, sikap dan tingkah laku yang tidak kita setuju, maka tidak ada titik untuk berhenti yang jelas. Mill mengingatkan tentang 'tirani opini orang banyak', yang dia maksud bahwa walaupun semua orang berpikir bahwa pandangan atau tindakan tertentu harus ditekan, hal ini bukanlah pembenaran untuk melakukannya. Harus tetap ada 'ruang pribadi' dari tindakan dan opini yang tidak bisa negara turut campur didalamnya.

Sebagian karena orang-orang cenderung membuat keputusan secara lebih baik bagi dirinya sendiri dibandingkan para legislator atau pejabat negara yang jauh - lagi pula, mereka lebih mengerti keadaan mereka secara pasti. Alasan lain adalah karena akan menjadi lebih mudah bagi mayoritas untuk beranggapan bahwa mereka punya hak untuk turut campur dalam kehidupan orang lain, hanya karena jumlah mereka lebih banyak. Tetapi kepercayaan seperti ini mengizinkan mayoritas, dipersenjatai dengan alat pemaksaan negara, secara lebih jauh memperluas turut campur mereka dan menginjak kebebasan fundamental orang lain.

Dan hal ini adalah lereng yang licin. Intervensi dalam satu bagian kehidupan orang lain akan digunakan sebagai pembenaran intervensi yang lain. Sering kali, intervensi negara gagal atau mencapai hasil yang salah, yang kemudian dilihat sebagai argumen untuk campur tangan yang lebih lagi. Ketidakefektifan dan hasil yang tidak diinginkan dari kebijakan anti narkoba, contohnya, digunakan sebagai alasan untuk usaha pemberantasan yang lebih keras lagi, namun terkadang justru meningkatkan resiko untuk mengedarkan dan menggunakan narkoba lebih tinggi.

Menarik Garis Batas

Jadi di mana harus kita tarik garis batasnya? Dimana batas campur tangan negara? Tindakan mana yang dibolehkan, dan mana yang tidak? Hak apa yang harus dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya sendiri, contohnya? Atau lebih umum, haruskah pelawak dan kartunis memiliki hak kebebasan berekspresi untuk menghina agama, jika tindakan tersebut bisa memancing kekerasan yang mana orang tidak bersalah bisa dilukai?

Tidak ada jawaban jelas dari pertanyaan seperti itu; masing-masing orang punya opinininya sendiri. Mempersempit pilihan jawaban adalah tugas paling penting bagi para liberal klasik. Mereka menginginkan kekuasaan memaksa dari negara untuk difokuskan sejeles mungkin, sehingga bisa mencegah dan menghukum tindakan yang memang benar-benar membahayakan. Di mana batasan jelasnya harus menjadi bahan diskusi dan debat publik; tidak bijak jika kita membiarkan pemimpin politik untuk memutuskannya bagi kita. Tetapi banyak tindakan yang bisa mengakibatkan hanya kesusahan kecil bagi orang lain harus menjadi bahan perdebatan dan persuasi dan bukannya untuk penggunaan tangan besi pemerintah.

Toleransi dan Negara

Kebudayaan Yunani kuno tidak memiliki perdebatan tentang hal ini. Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), contohnya, percaya bahwa jika suatu hal itu baik, maka pemerintah harus memaksakannya. Dan sampai hari ini, banyak orang percaya bahwa hukum harus melarang hal-hal yang kita anggap imoral.

Mill menerima bahwa banyak tindakan imoral berpotensi merusak, yang memang oleh karenanya kita anggap itu sebagai

imoral. Tetapi ada tindakan lain yang bisa kita sebut imoral bisa saja tidak merusak bagi orang lain: yang dianggap sebagai korban bahkan menganggapnya sebagai menguntungkan, seperti bunuh diri dengan bantuan, contohnya. Menggunakan kekuatan memaksa negara untuk melawan tindakan tidak berbahaya seperti ini hanya akan mengurangi kesejahteraan manusia.

Semua liberal klasik skeptis terhadap kekuasaan pemerintah, dan mereka yang dalam spektrum lebih ke arah libertarian percaya bahwa negara akan lebih mungkin merusak kebebasan kita dari pada mengembangkannya. Sehingga berdasarkan aturan tak-melukai-nya Mill: jika kita mulai melarang hal-hal yang tidak mengakibatkan atau menjadi ancaman yang kelihatan, kita bisa pada akhirnya melarang segala hal. Bagi Locke atau Jefferson, negara ada hanya untuk melindungi warga negaranya dan mengembangkan kebebasan: mendikte cara hidup seseorang, atau mempromosikan agama atau kode etik tertentu, bukanlah bagian dari urusan-nya. Itulah kenapa Amandemen Pertama Amerika menyerukan bukan hanya sekedar toleransi agama, tetapi kebebasan agama.

Risiko dan Penggunaan Pemaksaan

Tetapi para intervensionis berargumen bahwa setiap tindakan apapun paling tidak punya potensi akibat yang membahayakan orang lain, jadi setiap kasus harus diputuskan kasus per kasus. Di banyak negara, contohnya, merokok dilarang di ruang tertutup seperti restoran dan bioskop. Pembeneran biasanya bukanlah karena ini mecederai perokoknya, tetapi mereka yang menderita dampak dari menghisap asap sebagai perokok pasif. Yang terbaru, merokok telah dilarang di taman publik, dimana resiko merokok

pasif sangat kecil; tetapi sekarang argumennya bahwa di taman, anak-anak bisa saja melihat orang-orang merokok dan bisa mencoba untuk menirunya, hasilnya mereka mengalami masalah kesehatan.

Mungkin saja ada risiko; tetapi liberal klasik mempertanyakan apakah risiko seperti ini cukup serius sehingga menjamin penggunaan kekuatan memaksa untuk mencegahnya – atau mungkin risiko ini sangat kecil sehingga kekangan memaksa (atau denda dan hukuman lainnya) tidak mungkin bisa dibenarkan. Karena jika bahkan risiko sangat kecil kepada orang lain bisa dilihat sebagai alasan yang baik bagi negara untuk turut campur, maka sama sekali tidak ada tindakan manusia yang bisa terlindung dari campur tangan sepihak otoritas pemerintah. Tidak akan ada lagi 'ruang pribadi': dan kebebasan individu dan supremasi hukum akan lenyap.

Toleransi haruslah dilakukan dengan kesadaran. Dia hadir karena suatu alasan; yaitu, bahwa menghormati orang lain sebagai makhluk moral, dan menghormati kebebasan mereka, adalah fondasi dari kerja sama damai dalam masyarakat bebas. Tetapi terlalu sering politisi dan pejabat kita tidak sadar ketika mereka telah melampaui batas yang penting ini. Publik juga, ketika masalah muncul, sering kali mengundang pemerintah untuk 'berbuat sesuatu', bahkan ketika campur tangan negara akan menjadi suatu serangan yang tidak bisa dibenarkan terhadap kebebasan individu. Dan kita juga sering terlampaui mau untuk memaksakan orang 'demi kebaikan mereka sendiri' - yang pada kenyataannya kita memaksakan mereka hanya agar sesuai dengan nilai dan praduga kita.

Walaupun saat ini kita tidak lagi memaksakan orang lain demi kebaikan rohani mereka', tulis filsuf dan antropolog Inggris Herbert Spencer (1820 - 1903), 'kita tetap merasa terpanggil untuk memaksa mereka demi kebaikan jasmani: tanpa melihat bahwa hal ini sama tidak bergunanya dan tidak pasti seperti alasan yang satunya'. Hal ini hanya salah satu alasan mengapa liberal klasik menginginkan pembatasan kekuasaan pemerintah.

POLITIK LIBERAL KLASIK

Asal Mula dan Tujuan dari Pemerintah

Para liberal klasik percaya bahwa pemerintah ada hanya untuk melindungi hak orang-orang, dan untuk memperluas kesempatan dan kebebasan dengan meminimalisir pemaksaan dan mengizinkan terciptanya perdamaian. Jika ada yang menggunakan pemaksaan, maka itu hanyalah oleh pemerintah, dan hanya boleh digunakan untuk maksud diatas.

Cita-cita para liberal klasik, dengan kata lain, adalah *pemerintahan terbatas* – dibatasi dalam kekuasaan dan cakupannya, dan tentu saja dalam legitimasinya. Tentang kekuasaan, mereka sangat sadar tentang bagaimana kekuasaan pemerintah bisa membahayakan kebebasan, sehingga perlu membatasinya. Dalam cakupannya, mereka menghendaki agar pemerintahan yang sah tidaklah didasarkan atas penaklukan dan kekuatan, tetapi atas dasar persetujuan dengan individu yang beragam – yang mana tujuannya tunggal didirikannya untuk mengembangkan hak, kebebasan dan kesempatan. Sehubungan dengan *legitimasi*, Locke menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari individu-individu yang menerima dikekannya tingkah laku mereka sebagai gantinya mendapatkan hak-hak sipil. Karenanya, otoritas pemerintah tidak boleh melebihi otoritas yang diberikan oleh individu-individu ini. Sebagai contoh, pemerintah tidak boleh mengambil hak yang tak terpisahkan seperti hidup dan kebebasan.

Alasan lain yang baik untuk membatasi pemerintah adalah sifat manusia yang tidak sempurna. Orang-orang dalam pemerintahan adalah orang biasa; mungkin mereka tidak lebih bijak atau lebih mementingkan diri dibandingkan orang lain. Tetapi mereka mendapatkan kekuasaan koersif yang besar, termasuk untuk mendenda dan memenjarakan kita. Malah adalah tidak bijak untuk membiarkan mereka menggunakan kekuasaan ini semaunya; tetapi harus dikendalikan dan dibatasi. Liberal klasik tidak mempercayai kekuasaan mutlak, bahkan jika dia didukung oleh mayoritas orang banyak.

Fungsi Pemerintah

Tetapi apakah ini pandangan yang terlalu sempit tentang pemerintah? Liberal klasik sering digambarkan sebagai penganut faham *laissez-faire* atau *Negara penjaga malam* yang kecil dan tidak bekerja. Dan para pengkritik mengatakan bahwa jika setiap orang setuju bahwa pemerintah harus ada, mereka akan tidak akan bersetuju dengan para liberal klasik, dan tetap menjadi anarkis.

Pemerintah modern saat ini jangkauannya dan kekuasaannya telah memampui apa yang bisa diterima oleh para liberal klasik awal. Bahkan liberal klasik saat ini sering menerima bahwa pemerintah mungkin punya fungsi yang berguna melampaui prinsipnya Mill tentang hukum tanpa-kekerasan dan mengembangkan kebebasan warga Negara. Milton Friedman terkenal sering membela *pajak pendapatan negatif* untuk redistribusi pendapatan dari yang kaya ke yang miskin dan *voucher pendidikan* yang dibiayai oleh Negara, dirancang untuk memberikan bagi keluarga miskin akses terhadap pendidikan.

Adam Smith sendiri mengatakan bahwa, selain melindungi masyarakat lewat pertahanan keamanan dan sistem peradilan, pemerintah juga seharusnya menyediakan pekerjaan umum seperti jembatan dan pelabuhan, dan memberi bantuan untuk pendidikan masyarakat.

Tetapi, sementara bisa saja ada hal-hal berguna yang bisa dilakukan secara kolektif, pertanyaannya di sini adalah di mana kita menentukan garis batasnya. Menjawab ini dipersulit dengan fakta bahwa sering kali sulit untuk memutuskan secara pasti kapan ketika hal pemaksaan telah dilakukan atau bisa menjadi ancaman, atau apa keuntungan pasti yang bisa didapatkan dari sebuah intervensi dari pemerintah.

Mill, sebagai contoh, walaupun dia membela hak kebebasan mengutarakan pendapat, menganggap bahwa prinsip tanpa kekerasannya bisa membenarkan sensor. Dia juga menyarankan berbagai tanggung jawab individu untuk menolong orang lain – seperti bersaksi di pengadilan, dan memastikan bahwa anak-anak anda disekolahkan dengan benar. Dia melihat juga kegunaan pemerintah dalam mengatur perdagangan, jam kerja, upah dan tunjangan kerja. Dia mendukung undang-undang kesejahteraan yang menyediakan kerja bagi mereka yang mampu kerja dan menyediakan standar hidup minimum bagi orang lain. Dia berpikir bahwa pemerintah harus membuat infrastruktur seperti jalan dan kebersihan. Dan mengusulkan subsidi bagi penelitian ilmiah dan kesenian. Bahkan keuntungan publik yang kecil, pikir dia, akan membenarkan intervensi seperti ini. Banyak liberal klasik yang akan tidak bersetuju dengan ini.

Yang lebih terkini, bahkan dalam bukunya tentang kekuasaan pemerintah yang berlebihan (*The Road to Serfdom*²), F. A. Hayek juga membuat daftar beberapa fungsi yang dia pikir pemerintah bisa secara sah lakukan. Termasuk didalamnya menyediakan orang-orang dengan jumlah minimum dari makanan, perumahan dan sandang yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kemampuan kerja; sebuah sistem asuransi sosial yang komprehensif yang melindungi ketika ditimpa masa sulit; membantu yang mengalami bencana alam, yang mana individu tidak bersiap untuk ini; dan kebijakan ekonomi untuk memerangi siklus bisnis dan pengangguran yang diciptakannya.

Banyak liberal klasik khawatir bahwa sifat mengalah seperti ini adalah suatu ujung kecil dari pangkal sangat besar. Sebagaimana Hayek sendiri keluhkan, 'keadaan darurat selalu menjadi alasan di mana perlindungan terhadap kebebasan individu dilanggar' – dan ketika kita membiarkan Negara menyediakan bantuan darurat, makanan, tempat pengungsian, pakaian, pendidikan dan pelayanan kesehatan, adalah tidak mudah untuk menarik garis pembeda antara apa yang dianggap sebagai kebutuhan bagi sedikit orang dan kenyamanan bagi banyak yang lain. Dengan kata lain, tidak ada *batas* yang jelas untuk intervensi pemerintah seperti ini.

Adam Smith mencoba memecahkan masalah ini dengan mengatakan bahwa intervensi-nya – jembatan, pelabuhan dan mendukung pendidikan – hanyalah sekedar infrastruktur yang mengijinkan umat manusia untuk saling bekerja sama dengan

² Buku ini telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Ancaman Kolektivisme* Terjemahan Freedom Institute dan FNF Indonesia for freedom pada tahun 2011.

sesamanya secara ekonomi dan sosial. Oleh karenanya intervensi ini *mendukung* kebebasan dan bukannya mengancamnya. Hayek juga, melihat intervensi-nya sebagai sekedar untuk mencoba menjaga agar orang-orang mampu menjaga dirinya; jadi sekali lagi, idenya untuk menyediakan hanya hal-hal yang memungkinkan para individu merdeka untuk hidup, bekerja dan bekerja sama.

Walau demikian, *apapun* aktifitas pemerintah, tidak peduli seberapa baik, tetap membutuhkan pelanggaran terhadap kebebasan dan hak orang lain – lebih khusus, mengambil properti mereka, dalam bentuk pajak, untuk membayar aktifitas-aktifitas ini. Beberapa liberal klasik, berargumen bahwa properti (hak milik) adalah salah satu alasan kenapa pemerintah ada untuk *lindungi*, dan merasa bahwa alasan di atas sulit diterima. Yang lain hanya sekedar menginginkan kepastian bahwa bantuan publik – entah bagaimana itu didefinisikan – dari pemerintah harus berargumen cukup kuat untuk membenarkan campur tangan terhadap hak dan kebebasan individu.

Bahaya yang nyata disini adalah ‘*mission creep*’ – pemerintah mulai dengan beberapa hal kecil yang jelas adalah tanggung jawab kolektif, dan kemudian memperluas kekuasaan dan fungsinya tanpa ada batasan yang jelas kedepannya. Liberal klasik mungkin yang paling berkualifikasi dan mampu menarik garis batas ini dibandingkan yang lain, karena mereka yang mengerti pentingnya *batas kekuasaan* pemerintah dan bahaya dari betapa cepatnya kekuasaan pemerintah berkembang. Dan mereka juga mengerti mengapa, walaupun pemerintah bisa memiliki peran dalam memastikan bahwa beberapa hal seperti bantuan darurat *tersedia*, tetapi ini tidak boleh *disediakan* hanya oleh pemerintah sendiri. Mereka juga mengerti mengapa, walaupun pemerintah bisa

mengatur pasar, tetapi dia tidak boleh menjadi *wasit* dan tidak menjadi *pemain* dalam pasar; dan mengapa bantuan yang disediakan pemerintah bagi orang-orang dan kelompok tertentu yang membutuhkan *tidak* boleh membesar menjadi program redistribusi pendapatan untuk jangka panjang atau dalam skala besar.

Mitos Keadilan Sosial

‘Liberal baru’, sebaliknya, berpikir bahwa redistribusi pendapatan adalah apa yang *seharusnya* dilakukan pemerintah. Mereka melihat ketimpangan dan kemiskinan sebagai hasil ketimpangan kekuasaan dan hukum kepemilikan yang tidak adil yang menguntungkan pemberi kerja dan orang kaya tetapi merugikan pekerja dan yang miskin. Untuk mengembangkan ‘keadilan sosial’, oleh karenanya, pemerintah harus memperbaiki keseimbangan kekuasaan dan mengalihkan kekayaan dan pendapatan dari yang berada ke yang berkekurangan.

Liberal klasik berpikir bahwa ini adalah penyalahgunaan yang vulgar dari kata ‘Keadilan’. Bagi mereka, keadilan adalah *keadilan komutatif*, penyelesaian perselisihan antara berbagai individu dan membela hak dan kebebasan individu dengan menghukum mereka yang melanggarnya. Keadilan tentang mengekang ancaman dan kekerasan, dan memberikan kompensasi bagi mereka yang dibuat menderita oleh pemaksaan. Keadilan adalah tata kelakuan yang diharapkan, dan memiliki hak untuk mengharapkan suatu tingkah laku, dari satu orang ke orang yang lain.

Keadilan yang sebenarnya, oleh karenanya, berfokus hanya pada bagaimana orang-orang berperilaku satu terhadap yang lain. Dicurai bukanlah keadilan, kena flu adalah *kesialan* tetapi bukan

ketidak-adilan, karena tidak ada yang bertindak secara tidak adil. *Keadilan distributif* atau sosial, di sisi lain, adalah agak berbeda. Keadilan jenis ini adalah tentang mendistribusikan benda-benda antara anggota dari masing-masing kelompok yang berbeda. Keadilan ini berusaha untuk merubah distribusi – umumnya kearah tercapainya kesetaraan – bahkan jika distribusi yang sebenarnya ada adalah sekedar hasil dari peristiwa, dan tidak ada yang berbuat jahat atau bertindak tidak adil.

Jika, sebagai contoh, 100.000 orang masing-masing membayar untuk menonton seorang penyanyi terkenal di stadion, mereka mengakhiri malam tersebut menjadi sedikit lebih miskin dan penyanyi menjadi lebih sangat kaya. Tetapi tidak ada orang yang melakukan pelanggaran, dan tidak ada yang dipaksakan. Liberal klasik tentu saja akan bertanya; bagaimana bisa hasil distribusi kekayaan seperti ini menjadi *tidak adil*? Dan mereka menunjukkan bahwa untuk mengembalikan keadaan menjadi setara akan *membutuhkan pemaksaan* – mengambil kekayaan yang baru didapatkan penyanyi secara paksa untuk dikembalikan kepada penonton. Tentu saja, seperti kata Nozick, hal ini akan membutuhkan *pemaksaan yang tetap dan berulang* untuk menjaga kesetaraan tetap sama di masa depan.

Muncul juga masalah praktikal. Kesetaraan sempurna dari pendapatan adalah tidak mungkin; mengapa orang mau bekerja keras, atau bekerja, jika mereka dibayar sama dengan mereka yang tidak? Jadi ‘keadilan sosial’ lebih berfokus pada redistribusi berdasarkan *kebutuhan*, atau berdasar pada *nilai* yang dikontribusikan seseorang terhadap masyarakat. Tetapi siapa yang memutuskan siapa yang membutuhkan, dan nilai siapa yang terbesar. Apakah seseorang menjadi miskin karena kemalasannya,

lebih ‘kurang membutuhkan’ dari pada seseorang yang rumah dan bisnisnya dihancurkan oleh sebuah angin topan? Apakah seorang perawat berkontribusi lebih banyak dari pada seorang pemain biola? Tidak ada cara objektif untuk menilai: keputusannya sepenuhnya subjektif. Tetapi, dibalik penilaian sepihak ini, para pembela ‘keadilan sosial’ merampas hak milik dan kebebasan orang lain.

Bukan hanya itu, tetapi ‘keadilan sosial’ memperlakukan orang-orang secara berbeda: masing-masing orang membayar pajak dengan jumlah yang tidak sama, atau menerima bantuan pemerintah yang tidak sama, bergantung pada seberapa kaya atau miskin mereka. Hal ini melanggar prinsip supremasi hukum – prinsip bahwa hukum harus memperlakukan semua orang setara dan tidak ada yang dibantu atau dicerderai oleh putusan sepihak yang berkuasa.

Liberal klasik, oleh karenanya, menolak apapun jenis redistribusi komprehensif dari kekayaan atau pendapatan. Mereka mungkin mendukung beberapa bantuan darurat sementara yang diorganisasi Negara; tetapi mereka menolak bahwa setiap orang memiliki *hak* atas bantuan jangka panjang pemerintah – karena itu berarti bahwa orang lain memiliki *kewajiban* untuk membantu mereka, dengan paksaan jika perlu, walalupun mereka tidak bersalah terhadap keadaan kurang menguntungkan dari sesama warga negeranya.

Hal ini tidak berarti bahwa orang miskin mendapatkan keadaan lebih buruk dalam masyarakat liberal klasik. Masyarakat merdeka cenderung menjadi masyarakat yang lebih kaya, dan adalah lebih baik menjadi orang miskin di Negara kaya dari pada di Negara miskin. Orang-orang di Negara kaya juga cenderung

lebih banyak berkontribusi lewat pemberian amal dan usaha filantropis; walaupun mereka tidak punya tanggung jawab hukum untuk menolong orang lain yang membutuhkan, mereka punya sumber daya untuk mendukung kewajiban moral yang mereka rasakan terhadap orang lain.

Pilihan Publik dan Kepentingan Pribadi

Liberal klasik dalam segala keadaan sangat menaruh curiga terhadap bagaimana keputusan politik dalam hal-hal yang menyangkut redistribusi, dibuat. Keraguan mereka ini telah dijelaskan lewat berbagai hasil penelitian Aliran Pilihan Publik, yang menggunakan konsep ilmu ekonomi terhadap proses pembuatan keputusan politik, dan menemukan bawah proses ini sangat mengkhawatirkan.

‘Ekonom kesejahteraan’ dari aliran arus utama dalam ilmu ekonomi telah dari dulu membicarakan tentang *kegagalan pasar* dan perlunya tindakan pemerintah untuk memperbaikinya. Apa yang mereka lupakan bahwa ada juga yang disebut *kegagalan pemerintah*. Politisi dan pejabat bukanlah malaikat: mereka punya kepentingan diri dalam sistem demokrasi, sebanyak kepentingan diri yang ada di sektor swasta.

Pemilihan umum, sebagai contoh, adalah medan pertempuran dari berbagai kepentingan, yang mana mayoritas memutuskan apa yang harus dilakukan. Ini adalah ancaman besar bagi minoritas – seperti lelucon lama tentang demokrasi sebagai dua serigala dan satu domba yang memutuskan apa yang harus dihidangkan untuk makan malam. Hal ini diperparah dengan pemilihan yang didominasi oleh berbagai kelompok lobi, yang secara membabi-butanya berkampanye untuk memenangkan

pemilihan untuk kepentingan mereka yang sangat terkonsentrasi pada hanya beberapa pihak. Sering, kelompok kepentingan menciptakan koalisi dukungan untuk membuat daya tawar-nya menjadi lebih tinggi. Politisi, sementara itu, harus merayu koalisi yang memiliki kepentingan ini agar dapat memenangkan suara – lagi pula, bahkan politisi yang paling pro-rakyat pun harus terpilih dahulu agar dia dapat melakukan sesuatu. Mereka yang kalah, tentunya adalah para ‘mayoritas yang diam’ – masyarakat secara umum, yang kepentingan mereka lebih tersebar.

Demikian juga keputusan legislatif juga tidaklah lebih baik. Demi mencapai kepentingan mereka, para anggota legislator melibatkan rekan-rekan sesama anggota mereka dalam lingkaran ‘aku akan menyumbang suaraku untuk kepentinganmu, dan kamu akan memberikan suaramu untuk kepentinganku’. Beberapa Undang-Undang disahkan tanpa ada yang benar-benar menginginkannya, dan masyarakat luas yang tak terwakili lebih tereksplorasi. Dan ketika Undang-Undang ini diterapkan, para birokrat juga punya kepentingannya sendiri – mungkin memperbesar wilayah dan kerumitan kegiatan mereka sehingga lebih memperluas lagi kemaharajaan birokrasi mereka.

Liberalisme Klasik dan Demokrasi

Liberal klasik adalah pendukung demokrasi (demokrat), tetapi bukan *demokrat yang skeptis*. Mereka menerima bahwa ada beberapa fungsi minimum yang membutuhkan kegiatan kolektif. Mereka percaya bahwa masyarakat umum-lah, bukan beberapa elit penguasa, yang seharusnya membuat keputusan tentang apa fungsi-fungsi tersebut dan bagaimana mencapainya. Dan mereka menyarankan agar pemerintahan perwakilan adalah mungkin cara

terbaik untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut.

Tetapi mereka tahu bahwa proses demokrasi jauh dari sempurna. Demokrasi bukanlah proses yang *menyelaraskan berbagai perbedaan kepentingan* (sebagaimana yang dilakukan oleh pasar), tetapi suatu proses dimana kita *memilih antara berbagai konflik kepentingan* – sebuah pilihan yang mana hanya satu pihak bisa menang. Demokrasi dihantui oleh kepentingan-diri para pemilih, para perwakilan dan pejabat; demokrasi juga bisa menghasilkan hasil yang sangat irasional; dan terlalu sering menuntun pada kelompok minoritas dieksploitasi, dan kebebasan mereka dirampas, semua atas nama ‘demokrasi’.

Atas alasan ini, liberal klasik bersikeras bahwa proses pembuatan keputusan demokratis harus dibatasi oleh aturan-aturan tertentu, dan harus fokus, dengan ketepatan, dan untuk isu-isu yang tidak bisa diputuskan dengan cara lain. Demokrasi perwakilan tentu saja bentuk pemerintahan terbaik yang pernah ada, yang telah membuat lebih banyak orang (dan hampir semua yang mendapat kekuasaan) yang berargumen bahwa harus lebih banyak keputusan dibuat lewat proses demokratis. Tetapi itu berarti memutuskannya lewat proses *politik*; dan politik tidak selalu menjadi hal yang baik. Lebih banyak hal yang diputuskan secara politis, akan menjadi lebih mudah hak dan kebebasan individu digerus, dan kelompok minoritas dieksploitasi dan ditekan oleh mereka yang mendapatkan kekuasaan memaksa Negara.

Bagi liberal klasik, sebaliknya, hak dan kebebasan adalah bagi setiap orang; bukanlah berdasarkan jumlah dan mayoritas. Demokrasi perwakilan yang sebenarnya tidak sama seperti

kediktatoran perwakilan, dan tidak boleh dibiarkan berubah menjadi demikian. Keberhasilan dalam pemilihan umum tidak memberi izin bagi mayoritas yang menang untuk mengancam orang lain semauanya.

Selain membatasi proses demokrasi – politik – untuk memutuskan hal-hal yang harus dan hanya bisa diputuskan secara kolektif, liberal klasik juga berusaha untuk melindungi hak dan kebebasan setiap individu dengan memberlakukan pembatasan dalam hal bagaimana proses ini dilaksanakan dan bagaimana keputusan dibuat.

Konstitusi dan Kebebasan

Konstitusi (Undang-Undang Dasar) adalah salah satu cara menetapkan pembatasan-pembatasan tersebut, dan memberikan kekuasaan yang tidak bisa dibatalkan dengan mudah oleh mereka yang menjadi mayoritas atau berkuasa. Hal ini tidak selalu berhasil: bahkan Negara-negara yang memang punya konstitusi liberal yang kuat tidaklah kebal dari membesarnya ukuran pemerintah dan dari pengikisan hak dan kebebasan individu oleh mayoritas. Kebebasan konstitusional adalah hal yang sulit dilindungi jika masyarakat luas kehilangan pengertian tentang pentingnya kebebasan ini dan niat untuk melindunginya.

Tetapi liberal klasik pada umumnya percaya bahwa dengan membuat kekangan konstitusional memberi kita kemungkinan terbaik untuk melindungi hak dan kebebasan individu.

Melalui aturan-aturan seperti *pemisahan kekuasaan* dan *check and balances (kesetimbangan kekuasaan)* – sebagai contohnya, pemerintahan multi-kameral, sistem federal dan *judicial review* – kita bisa mencoba untuk mencegah kelompok

berkepentingan untuk menaklukkan semua proses pembuatan keputusan pemerintahan.

Dan sebuah konstitusi liberal klasik bukan hanya memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan terbatas dan terpisah-pisah. Tetapi juga memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang, sehingga tidak ada kelompok kepentingan tertentu – termasuk politisi dan pejabat pemerintah – yang bisa mendapat perlakuan khusus.

Konstitusi seperti ini bisa membuat garis batas dari kekuasaan Negara dengan menetapkan hak-hak dasar individu, yang tidak bisa dikuasai oleh Negara (karena warga negaranya tidak bisa memberikan kepada Negara otoritas untuk mencederai hak orang lain karena mereka sendiri tidak punyai hak ini). Tetapi walaupun *Undang-undang Hak Asasi* mungkin berguna untuk mengingatkan setiap orang tentang hak dasarnya seperti hidup, kebebasan, kepemilikan dan kebebasan membuat kontrak, berpikir dan mengeluarkan pendapat, tetapi adalah hal yang tidak mungkin untuk membuat daftar semua hak satu-persatu. Sebagaimana dikatakan Hobbes, kita semua harus bebas melakukan segala hal ‘yang tidak diatur oleh hukum’ – tetapi sebuah sistem hukum yang mencoba membuat daftar tentang apa saja yang *bisa* kita perbuat, dan bukannya sedikit hal yang *tidak boleh*, akan menjadi panjang, rumit, memiliki cacat dan sangat mengekang.

Melainkan, harus ada sebuah anggapan umum bahwa setiap orang bebas untuk mengejar kehendaknya dengan cara apapun yang damai, yang diatur hanya oleh sedikit pengecualian yang tercantum dalam hukum. Tidak perlu menuliskan satu persatu kebebasan yang sangat banyak, yang kebanyakan bersifat implisit dalam anggapan umum tentang kebebasan.

Legitimasi Pemerintah

Sebagaimana yang ditulis oleh penulis dan politisi Swiss-Perancis Benjamin Constant (1767 – 1830), konstitusi tidak diadakan untuk memberi kuasa bagi pemimpin kita, tetapi mengekang mereka. Tidak ada diantara kita yang berhak untuk menguasai orang lain; tetapi hal ini harus didasarkan persetujuan. Dan jika pemerintah kehilangan persetujuan dari rakyat, dia kehilangan semua otoritas, dan kekuasaan memaksanya tidak lagi sah.

Ini akan membuat pemerintah menjadi dibatasi, sebagaimana yang Frank Knight ingatkan; kita tidak akan pernah bisa bersetuju tentang setiap bentuk pemusatan kekuasaan yang besar. Tetapi pemerintah juga dikekang oleh ancaman penggulingan – dan ini hal yang baik, menurut Locke dan Paine.

Meski demikian, mengingat adanya kekuatan memaksa yang mereka miliki, bahkan pemerintah yang paling lalim bisa bertahan dalam waktu yang lama. Pemilihan umum, dengan semua cacatnya, adalah cara yang lebih damai dalam menyingkirkan pemerintah. Seperti konstitusi, mereka ada bukan untuk memilih pemimpin, tetapi mengekang mereka. Katup pengaman ini sangat penting; sebagaimana liberal klasik bersikeras, individu tidak boleh menjadi subjek sebuah keputusan sepihak dari orang lain, bahkan oleh pemerintah yang sangat populer.

MASYARAKAT LIBERAL KLASIK

Karena liberal klasik begitu berhati-hati terhadap kekuasaan pemerintah, adalah wajar untuk bertanya kepada mereka tentang bagaimana masyarakat akan diatur. Sebenarnya, mereka punya penjelasan lengkap tentang bagaimana masyarakat mengatur dirinya sendiri, tanpa memerlukan kekuasaan terpusat – ide *keteraturan spontan*.

Keteraturan Spontan

Keteraturan spontan adalah ide lama. Tepatnya berakar jauh sejak filsuf Perancis Montesquieu (1689 – 1755), yang menjelaskan bagaimana individu yang mementingkan diri bisa secara tidak sengaja menciptakan kebaikan keteraturan sosial; cendekiawan Pencerahan Skotlandia Adam Ferguson (1723 – 1816) mengutarakan bahwa lembaga sosial sebagai ‘hasil tindakan manusia, dan bukan rancangan manusia’ – sebuah ide yang Adam Smith gambarkan sebagai ‘tangan tak nampak’.

Lebih mutakhir, Hayek memperbarui ide ini. Dia menulis bahwa kita cenderung membagi dunia ke dalam yang *alamiah* dan *buatan* – membayangkan *alamiah* sebagai liar, irasional, tak berstruktur dan tak beraturan, dan *buatan (artifisial)* sebagai terencana, rasional, terstruktur, dan metodologis – dan berasumsi bahwa yang kedua lebih baik dari yang pertama di atas.

Tetapi, kata Hayek, ada kategori ketiga yaitu keteraturan, tetapi tidak terencana dan tak disengaja. Contohnya, formasi V dari angsa yang bermigrasi, atau koloni lebah dan rayap yang

kompleks. Struktur sosial ini dirancang tidak secara sadar oleh makhluk yang terlibat, tetapi dengan dampak keteraturan dari tingkah laku individu.

Keteraturan spontan seperti ini ditemukan juga dalam masyarakat manusia. Kita punya *bahasa*, sebagai contoh: bahasa dan tata bahasa kita yang rumit adalah dengan sendirinya berkembang karena dia berguna. (Adalah hal yang menarik bahwa Esperanto, bahasa pan-Eropa yang sengaja dirancang, tidak pernah terpakai, sementara bahasa yang lain yang muncul secara spontan di Eropa tetap hidup dan bertumbuh).

Common law (hukum yang didasarkan pada keputusan hakim sebagai hukum, dan bukannya hukum yang diciptakan oleh pembuat hukum, atau *civil law*), juga tidak pernah secara sengaja diciptakan, tidak seperti Hukum Napoleon; *common law* sekedar muncul dari ribuan keputusan dari berbagai kasus hukum. *Pasar*, *harga*, dan *uang* juga dikembangkan karena mereka berguna, bukan karena satu orang secara sadar menciptakannya.

Kesimpulannya keteraturan sosial tidak membutuhkan pemerintah, atau perencanaan, untuk berfungsi, efisien atau bahkan rasional. Mereka muncul lewat interaksi bebas antara individu-individu, masing-masing mengejar tujuan pribadinya sendiri tetapi menghormati hak dan kebebasan orang lain. Tentu saja intervensi pemerintah lebih mungkin malah merubah keteraturan ini menjadi kekacauan.

Evolusi Keteraturan Spontan

Keteraturan sosial berevolusi. Bahasa, *common law*, moralitas, adat-istiadat dan pasar semua berubah dan beradaptasi berdasarkan kebutuhan zaman. Keteraturan seperti ini swa-

organisir dan pada umumnya swa-regulatif – membutuhkan aturan yang luas untuk membuat mereka tetap bekerja, tetapi tidak membutuhkan satu orang pun untuk merancang dan merencanakan mereka.

Mereka mungkin tidak beradaptasi secara sempurna setiap saat, tetapi yang beradaptasi akan bertahan hidup dan berkembang menjadi lebih baik dari yang lain. Dan kemajuan evolusioner bersifat *trial-and-error* (percobaan) seperti ini akan berkembang lebih cepat ketika individu bebas untuk menghasilkan ide mereka sendiri secara berlimpah dari pada ketika hanya ide penguasa yang berlaku.

Pertimbangkan, sebagai contoh, kerumunan di sebuah stasiun kereta api yang sibuk. Semuanya bergegas antara kereta yang berbeda dan pintu keluar-masuk yang berbeda. Entah bagaimana, setiap orang mencapai tujuannya tanpa saling menabrak satu dengan yang lain. Ini karena masing-masing menyesuaikan arah dengan mempertimbangkan orang lain yang ada disekitarnya. Rute jalan sebenarnya mereka pasti tidaklah lurus, tetapi pada umumnya mereka dengan cepat mencapainya tanpa terjadi kecelakaan. Cara yang lain adalah – mengarahkan ribuan orang ini dengan menanyakan tujuan masing-masing lalu menarik garis rute paling efisien melewati stasion – dan ini akan menjadi mimpi buruk dalam mengaturnya. Tetapi untunglah masalah ini bisa diatasi dengan sendirinya, secara spontan.

Peraturan dan Keteraturan

Masalah yang dijelaskan diatas diselesaikan dengan sendirinya karena kita beradaptasi dengan orang lain dengan cara yang bisa diprediksi – dalam kasus stasiun di atas, mencoba menghindari

tabrakan dengan kemampuan terpendam kita berusaha mengindikasikan kemana orang lain mengarah dan menyesuaikan dengan petunjuk yang ditunjukkan oleh orang lain juga. Keteraturan tingkah laku seperti ini, atau 'tata kelakuan', menghasilkan hasil yang menguntungkan secara spontan. Jika, kebalikannya, kita semua bertindak tanpa bisa ditebak, ini akan menghasilkan kebingungan dan konflik.

Dalam sebuah keteraturan spontan di kehidupan nyata, 'peraturan' ini mungkin tidak tertulis dan mungkin sangat kompleks. Lebah, contohnya, tidak mempunyai struktur komando yang tertulis, tetapi mereka menyokong kehidupan 50.000 anggota koloni, atau yang lebih sederhana hanya dengan sebuah struktur kerja setiap anggota.

Menyangkut keteraturan manusia, anak sekolah bisa menunjukkan bahwa aturan tatabahasa, atas mana sebuah bahasa tersusun, adalah sangat sulit dijelaskan, walaupun kita menggunakannya di luar kepala setiap hari. Hal yang sama dalam aturan peradilan, atau *fair play*, atau moralitas; kita bisa merasakan aturan ini tanpa perlu dijelaskan, walaupun kita tidak selalu dijelaskan tentang apa mereka.

Dan kemudian peraturan yang memungkinkan keteraturan ini telah berubah karena mereka berguna dan bisa menyesuaikan, bukan karena kita secara sadar merancanginya. Mereka memberi batasan atas tindakan kita, membuatnya menjadi lebih bisa diprediksi, sehingga mempermudah kehidupan bermasyarakat. Peraturan seperti hak kepemilikan, tradisi, adat istiadat, moralitas, kejujuran, rasa hormat dan tabiat adalah perapian yang didalamnya terkandung api kebebasan pribadi. Tidak ada yang *menemukannya*, tetapi mereka mengandung 'kebijaksanaan' tidak

sadar tentang bagaimana bertingkah laku demi berlangsungnya interaksi sosial yang berjalan lancar.

Keadilan dan Supremasi Hukum

Keteraturan spontan, karenanya, bersandar pada tingkah laku individu yang bisa ditebak dan tidak akan terlaksana tanpanya. Dan dasar dari keteraturan sosial dan politik kita, kata liberal klasik, adalah *supremasi keadilan*.

Seperti tata bahasa, supremasi keadilan tidaklah secara sadar dirancang, tetapi berubah secara perlahan karena mereka berguna; dan secara luas kita mengikutinya walaupun tidak selalu kita bisa menjelaskannya secara tepat. Kita tentu saja mencoba untuk menuliskannya dan membakukannya dalam buku hukum. Tetapi itu bukanlah bahwa kita *menciptakan* supremasi keadilan ini; kita hanya mencoba *menemukannya kembali*.

Legislator (pembuat hukum) bisa memberlakukan 'hukum', tetapi bisa saja itu bukan hukum yang adil. Sebagai contoh, mungkin saja hukum ini *berlaku mundur* (menghukum orang untuk tindakan yang belum pelanggaran pada saat itu), atau *tak bisa diterapkan* (tidak mungkin untuk dituruti), atau *tidak bisa dimengerti* (kontradiktif atau terlalu rumit untuk dimengerti), atau *diterapkan secara tidak adil* – semuanya menentang ide tentang keadilan yang tumbuh di dalam dan bersama diri kita, atau sebagaimana yang disebut oleh beberapa liberal klasik akan dikatakan sebagai pelanggaran terhadap *hukum alamiah*. Aturan hukum seperti ini oleh karenanya tidak layak disebut sebagai 'hukum'.

Supremasi Hukum

Liberal klasik percaya bahwa keteraturan sosial yang spontan, kooperatif, bisa diprediksi, tanpa kekerasan, stabil, dan adil, muncul hanya dengan mengikuti aturan yang *umum* (tanpa banyaknya pengecualian yang membingungkan), *universal* (berlaku bagi semua orang) dan *stabil* (tidak sering berubah sampai orang menjadi bingung tentang aturan tersebut).

Karena kebanyakan kita tidak bisa menjelaskan aturan tata bahasa, apa lagi aturan kehidupan sosial, maka adalah masuk akal untuk membuatnya menjadi sederhana. Dengan memiliki aturan yang *umum* dan *stabil*, maka semua orang tahu apa yang diharapkan dari mereka, membuat tindakan kita lebih bisa diprediksi, dan memungkinkan kita untuk lebih yakin dalam membuat perencanaan. Demikian juga dengan peraturan yang berlaku umum (*universal*) – dengan keuntungan pentingnya yaitu *universalitas*-nya membuat menjadi tidak mungkin bagi orang atau kelompok tertentu lebih diutamakan atau malah dieksploitasi.

Inilah *supremasi hukum*, kebalikan dari supremasi (kekuasaan) sepihak dari mereka yang berkuasa. Liberal klasik menekankan bahwa ini mencegah politisi, polisi, pengadilan dan pejabat lain untuk menyalahgunakan kekuasaan memaksa mereka. Hal ini membebaskan kita dari banyak kejahatan manusiawi; penangkapan dan penahanan sepihak, pemenjaraan tanpa peradilan, hukuman ganda (dihukum lebih dari satu kali untuk kesalahan yang sama), peradilan yang tak adil, peradilan yang bias, pemilihan yang curang dan peraturan hukum yang tak adil.

Melindungi Supremasi Hukum

Walaupun liberal klasik percaya pada pemerintahan *terbatas*, mereka melihat bahwa mempertahankan supremasi hukum bukanlah tugas *kecil*. Dia membutuhkan mekanisme untuk memastikan bahwa pemilihan dan penunjukan pejabat adalah terbuka dan adil, dan bahwa hakim harus independen, dan sifat umum dan universal dari hukum harus diteliti. Yang ini membutuhkan penggunaan sumber daya untuk sistem peradilan: keadilan tidak ditegakkan, contohnya, jika membutuhkan bertahun-tahun untuk sebuah kasus dibawa ke pengadilan karena birokrasi persidangan yang berlebihan, atau polisi dan hakim dibayar rendah sehingga mereka malah bersandar pada menerima suap.

Konstitusi bisa membantu melindungi keadilan alamiah ini: konstitusi bisa memberlakukan *proses sah* dari sebuah sistem legal, memastikan perlakuan setara, dan dia bisa mendefinisikan sebuah *ruang pribadi* yang tidak bisa diganggu oleh legislasi dan kekuasaan pejabat. Tradisi *common law* adalah salah satu benteng kebebasan: setiap kasus dibuka dan dipertimbangkan dalam sidang, dan darinya kita bertumbuh dalam pemahaman tentang apa itu aturan hukum sebenarnya. Perlindungan ketiga adalah *kebebasan berbicara (berekspresi)*: jika orang-orang bisa secara terbuka mengkritisi hukum dan jalannya administrasi peradilan, maka akan lebih banyak pikiran dicurahkan pada pembuatan hukum, dan orang-orang bisa secara aktif menolak hukum yang tidak adil dan proses legal yang tidak adil.

Ancaman terhadap Supremasi Hukum

Hal ini jauh dari pikiran banyak legislator saat ini. Mereka ingin agar pengadilan tunduk kepada pejabat yang dipilih oleh mayoritas, yang, kata mereka, lebih bersentuhan langsung dengan permasalahan masyarakat dibandingkan para hakim. Mereka mengabaikan batasan konstitusi, dengan alasan bahwa mereka lebih mengerti keadaan saat ini dari para penulis konstitusi yang hidup berdasawarsa atau berabad-abad lalu. Mereka melihat hak bukan sebagai alamiah dan tidak bisa dilanggar, tetapi sebagai keistimewaan yang diberikan kepada kita oleh legislator. Dan mereka percaya bahwa legislasi (produk hukum) harus mendukung 'kebaikan publik' bahkan jika ini mengorbankan kebebasan individu.

Tetapi hampir semua legislasi, bahkan yang sangat tidak adil dan menjajah, bisa dijadikan alasan sebagai demi 'kebaikan publik' – yang, mau tidak mau, didefinisikan oleh para legislator sendiri. Dan, jauh dari tak bersentuhan, liberal klasik melihat pengadilan sebagai pelindung yang penting bagi hak dan kebebasan individu, mencegah pandangan jangka-pendek-isme dan kepentingan diri para legislator, membatalkan produk hukum yang tak adil dan memastikan bahwa hukum yang adil dipatuhi, bahkan oleh mereka yang berkuasa.

Atas alasan ini Hayek sangat mendukung *common law*, yang tumbuh berkembang lewat perselisihan yang diperadukan dalam pengadilan, sebagai jaminan yang lebih baik bagi keadilan dibandingkan dengan hukum yang dihasilkan oleh para politisi – dan kebanyakan liberal klasik akan bersetuju dengan ini. Bagi mereka, supremasi hukum membutuhkan aturan hukum ini yang berlaku adil dan seragam bagi setiap orang. *Common law* pada

umumnya sesuai dengan penjelasan ini, tetapi terlalu sering hukum yang dibuat oleh para politisi menguntungkan (atau merugikan) kelompok tertentu – salah satu alasan kenapa liberal klasik sangat skeptis dengan pembuatan hukum seperti ini.

Rasionalitas Keteraturan Alamiah

Walaupun banyak orang membayangkan bahwa masyarakat tanpa arahan terpusat pasti liar dan tidak rasional, liberal klasik percaya bahwa keteraturan spontan sebenarnya *lebih* rasional. Keteraturan spontan mampu memproses dan menggunakan lebih banyak informasi dibandingkan masyarakat yang terpusat, menuntun kepada pembuatan keputusan yang lebih baik, penyesuaian yang lebih cepat terhadap perubahan keadaan, dan kemajuan yang lebih cepat. (Sebagai ilustrasi, kenanglah kembali keterbelakangan ekonomi dari blok Soviet dulu yang terpusat, bandingkan dengan tetangganya di Barat yang lebih kurang terpusat).

Alasannya, menurut F. A. Hayek, yang karyanya menjelaskan pemikiran ini, bahwa kebanyakan pengetahuan yang dibutuhkan untuk kemajuan masyarakat adalah *pengetahuan yang tersebar*. Dalam bentuk setempat, pribadi, terbagi-bagi, terpisah, dan tidak bisa disentralisasi.

Orang biasa punya pengertian yang lebih banyak tentang keadaannya sendiri dibandingkan yang bisa dimiliki oleh kekuasaan terpusat. Mereka juga punya keahlian khusus, dan lebih banyak pengertian pribadi tentang pasar mereka sendiri dan kebutuhan dan nilai pelanggan mereka. Dan banyak dari pertukaran informasi di pasar yang mereka proses sudah akan menjadi kadaluarsa sebelum sampai ke badan perencanaan pusat.

Beberapa mungkin bisa berargumen bahwa aplikasi daring seperti Uber, dan supercomputer canggih, memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan secara cepat dari perubahan data pasar seperti fluktuasi permintaan dan kesediaan taxi pada tempat dan waktu tertentu. Adalah benar bahwa skala yang mana informasi bisa secara efisien dikumpulkan dan digunakan akan berubah dari waktu ke waktu dan dari penggunaan ke penggunaan berikutnya. Tetapi, sebuah proses persaingan dibutuhkan untuk menemukan cara terbaik untuk mengumpulkan, menginterpretasikan dan menggunakan informasi dengan teknologi yang ada saat ini. Dan informasi ini diproses dan digunakan dengan cara berbeda oleh orang yang berbeda dalam rantai proses – Uber atau perusahaan taxi, pengemudi, dan kostumer. Perencanaan terpusat tidak bisa meniru hal ini.

Dalam keadaan apapun, masalahnya bukanlah *penghitungan* tetapi *pengertian*. Data yang ada tentu saja tidak bisa secara *lebih baik* diproses oleh sebuah otoritas pemerintah yang terpusat. Tidak ada otoritas pemerintah yang bisa meramalkan permintaan pelanggan taxi (dengan perubahan yang selalu ada karena hal-hal seperti keadaan darurat dalam keluarga, keadaan cuaca atau halangan pada transportasi publik). Juga tidak bisa diharapkan perencana terpusat memiliki pengetahuan mendalam yang sama yang dimiliki oleh pengemudi taksi atas hal-hal seperti cuaca setempat, penutupan jalan sementara dan jalan lain untuk melewatinya, acara masyarakat setempat yang menciptakan kerumunan, dan faktor lainnya yang tak terhitung jumlahnya yang mempengaruhi pasar.

Juga, pemasok lokal punya lebih banyak kepentingan mendadak untuk beradaptasi dengan cepat terhadap permintaan

masyarakat sekitarnya dibandingkan para perencana pusat. Motivasi mereka mendorong kemajuan: dengan ribuan pemasok semua bersaing mendapatkan kesepakatan bisnis, inovasi akan lebih cepat dibandingkan jika dilakukan hanya oleh badan perencanaan terpusat. Dan adalah lebih baik jika inovasi seharusnya dilakukan oleh individu: jika inovasi mereka gagal, bisa ditinggalkan dengan hanya sedikit kerugian yang bersifat terbatas; sementara jika inovasi berskala satu Negara oleh badan perencanaan terpusat, bisa berisiko bencana bagi seluruh ekonomi.

Bukanlah bahwa masyarakat spontan itu tidak terencana. Sebaliknya, dia bersandar pada perencanaan oleh jutaan individu, masing-masing dengan pengetahuan khususnya sendiri-sendiri, bukannya oleh satu badan perencanaan. Masyarakat seperti ini, didasarkan pada sejumlah besar pengetahuan individu yang tersebar, yang begitu kompleks sehingga tidak ada satu otak perencanaan yang bisa mengerti. Ini menjelaskan, sebagian, kecurigaan liberal klasik terhadap kekuasaan pemerintah, lebih khusus usaha untuk merencanakan masyarakat secara besar-besaran. Jika kita tidak bisa mengerti sepenuhnya tentang lembaga sosial kita, kita akan tidak mungkin mendesain ulang masyarakat ini dengan berhasil.

Masyarakat Sipil

Liberal klasik tidak membayangkan bahwa orang-orang yang membentuk masyarakat spontan sebagai terisolasi, *atomistik* (walaupun ada petunjuk akan pandangan ini diantara para pemikir awal teori kontrak sosial, dan lebih barusan dalam pemikiran ekonomi tentang *harapan rasional* dan *homo ekonomikus* yang

rasional dan mementingkan diri). Mereka tahu bahwa orang-orang dalam dunia nyata tidaklah saling terlepas dan mekanistik.

Sebaliknya, lewat pilihan lahiriah, individu adalah anggota dari berbagai kelompok yang berbeda dan tumpang-tindih, antara keluarga, moral, agama, budaya, dan kesetiaan yang berbeda-beda. Nilai mereka dipengaruhi oleh kesetiaan mereka, dan mereka bersandar pada kesetiaan balik dari sesama anggota mereka. Mereka akan kurang suka mengejar ambisi mereka lewat proses politik dibandingkan lewat institusi *masyarakat sipil* - lembaga amal, serikat, kelompok pengembangan diri, kampanye, agama, dan kelompok lainnya.

Pendukung komunis dan fasis sangat kritis terhadap masyarakat sipil karena mereka ini yang menjauhkan kesetiaan orang-orang dari Negara. Liberal klasik mendukung ide masyarakat sipil justru karena alasan ini. Bagi mereka, masyarakat sipil memungkinkan individu untuk mengejar tujuan mereka sendiri tanpa harus menghamba pada otoritas politik yang terpusat dan berkuasa. Tentu saja, orang yang berbeda bisa mengejar tujuan yang bertentangan, tanpa harus mengorbankan ambisi mereka kepada pandangan mayoritas. Lebih lagi, akan berkurang juga alasan bagi pemerintah untuk mengambil lebih banyak kekuasaan jika masyarakat sipil lebih kuat. Sektor usaha amal yang kuat, sebagai contoh, berarti akan berkurang kebutuhan terhadap sistem Negara kesejahteraan – sebuah kelegaan bagi liberal klasik, karena mereka takut terhadap bertumbuhnya dan kemungkinan penyalahgunaan oleh kekuasaan terpusat. Dan adalah lebih rasional jika sebuah tugas dikerjakan secara lokal dan dengan berbagai cara yang berbeda-beda, dari pada diusahakan oleh otoritas terpusat dan jauh.

Beberapa liberal klasik menyambut masyarakat sipil sebagai pembebas kita, bukan hanya dari bahaya pemusatan yang berlebihan, tetapi dari bahaya individualisme yang berlebihan juga. Sebagai contoh, pemikir dan sejarawan Perancis Alexis de Tocqueville (1805 – 59) mengkritisi individualisme Amerika sebagai pengikis nilai kewarganegaraan dan pengekangan diri, pencipta kemungkinan tirani oleh massa, yang disokong oleh kekuasaan Negara.

Keteraturan Spontan dan Hak Alamiah

Perlu dicatat bahwa adanya konflik antara ide keteraturan spontan dan hak alamiah. Jika masyarakat berkembang secara spontan, maka tidak ada kontrak sosial antara individu merdeka dan terpisah yang diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara masyarakat terbentuk. Masyarakat bukanlah hasil dari negosiasi rasional, tetapi sepenuhnya hasil dari evolusi tidak disengaja antara individu yang beradaptasi terhadap tindakan masing-masing.

Bagi banyak liberal klasik, ini mewakili pendekatan yang lebih tidak radikal dan konservatif terhadap masalah sosial dibandingkan dengan pendekatan hak alamiah. Salah satu kritik terhadap pandangan hak alamiah adalah dia bisa menghasilkan sesuatu yang hampir mendekati anarki, karena mungkin hanya sangat sedikit individu terpisah, yang saling waspada menjaga hak alamiah mereka, yang akan saling bersetuju, sehingga tidak menyisakan peran sama sekali untuk pemerintah. Pendekatan keteraturan spontan, sebaliknya, menyarankan bahwa kita bisa dan akan bersetuju dalam banyak hal – bahkan jika persetujuan tersebut terjadi secara tidak sadar dan jarang bisa dimengerti.

EKONOMI LIBERAL KLASIK

Keteraturan Spontan Pasar

Bersama dengan kebebasan sosial dan politik, liberal klasik juga membela kebebasan *ekonomi*. Mereka percaya bahwa orang-orang harus bebas menemukan, menciptakan, menabung, mengumpulkan properti (kepemilikan) dan menukarkan sesuatu secara sukarela dengan orang lain.

Tetapi mereka juga percaya bahwa kebebasan ekonomi cara terbaik menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena kebebasan ekonomi memungkinkan orang untuk menyesuaikan diri secara spontan terhadap kebutuhan orang lain dan bekerja sama untuk kebaikan bersama – menciptakan dan menyebarkan nilai dalam sepanjang prosesnya.

Aturan yang menciptakan keteraturan spontan ini adalah kepemilikan (properti), kontrak, kejujuran, dan keadilan. Dengan aturan ini, terciptalah keteraturan ekonomi dengan skala dan kerumitan yang luar biasa besar yang meliputi seluruh dunia – jauh lebih besar dan lebih kompleks dari yang sebuah badan pemerintah bisa mengerti.

‘Mukjizat’ Spontan dari Harga

Apa yang menjaga kegiatan ekonomi dari jutaan orang sehingga terjadi dengan penyesuaian yang luar biasa lancar, apa yang Hayek sebut sebagai ‘mukjizat’ sistem pasar. Tidak ada manusia yang menciptakan hal ini – dia muncul secara spontan, tetapi dia

menuntun kepada penciptaan nilai dan menyebarkan kesejahteraan diantara masyarakat manusia.

Harga hanyalah sekedar *biaya* (rate) yang orang rela pertukarkan dengan sesuatu dengan orang lain. Biasanya mereka digambarkan dalam bentuk uang – tetapi ini bisa terjadi hanya karena uang telah menjadi barang yang berguna yang bisa dipertukarkan dengan barang lain. Dalam kata-kata Milton Friedman, uang menyelamatkan tukang pangkas yang kelaparan dari masalah mencari pembuat roti yang membutuhkan gunting rambut – membuat pertukaran menjadi lebih mudah dan lancar.

Perlu dicatat bahwa harga tidak mengukur *nilai*. Nilai, seperti keindahan, ada dalam pikiran masing-masing orang, dan orang menilai sesuatu secara berbeda. Itulah kenapa kita berdagang. Ketika tukang pangkas yang kelaparan menilai roti lebih berharga dari pada uang yang dimintakan oleh tukang roti, tukang roti menilai uang lebih tinggi dari roti. Satu *harga* dipertukarkan, tetapi masing-masing *menilai*-nya secara berbeda, dan masing-masing menganggap diri mereka menjadi lebih baik dengan pertukaran.

Harga sebagai Sarana Telekomunikasi

Tetapi, harga juga menunjukkan adanya *kelangkaan*. Harga yang lebih tinggi menunjukkan di mana permintaan sesuatu melebihi penawaran, yaitu keadaan di mana pelanggan bersedia membayar lebih. Dan mereka mengundang pemasok untuk memuaskan permintaan dengan mempertinggi produksi mereka untuk mendapatkan imbalan yang lebih tinggi. Harga yang jatuh, sama halnya, bisa mengindikasikan bahwa permintaan melemah dan pemasok harus memotong jumlah produksi. Dengan cara ini,

harga memberi indikasi kemana sumber daya bisa menciptakan nilai tertinggi, dan menarik mereka ke arah penggunaan dan menjauh dari pemborosan, di mana lebih sedikit nilai terpakai.

Penyesuaian yang menguntungkan ini menyebar dari pasar ke pasar. Contoh yang diberikan Hayek, bayangkan bahwa sebuah usaha manufaktur menemukan produk baru dari bahan timah. Mereka akan meminta lebih banyak timah, dan mereka akan bersedia untuk membayar lebih tinggi untuk mendapatkannya. Harga yang lebih tinggi ini akan mengundang perusahaan tambang untuk menghasilkan lebih banyak timah, dan makelar timah untuk menyediakannya. Tetapi pada saat yang sama, pengguna timah yang ada sekarang akan mulai mencari bahan pengganti timah yang lebih murah. Ini akan menaikkan harga bahan pengganti ini dan membuat pengguna dari bahan pengganti ini untuk mencari bahan pengganti lain. Seluruh rangkaian penyesuaian ini menyebar, seperti riak di kolam – semua berkat apa yang Hayek sebut sebagai ‘sistem telekomunikasi yang luas’ dari harga, secara terus-menerus memberi petunjuk bagi orang-orang kemana usaha dan sumber daya mereka akan menghasilkan nilai tertinggi.

Pasar Tanpa Pengendali

Tidak seperti diagram ‘*equilibrium*’ (keseimbangan) khas buku teks ilmu ekonomi, yang menunjukkan bahwa pasar selalu dalam keseimbangan yang tetap, liberal klasik melihat pasar sebagai *proses* dinamis, seperti aliran sungai, tidak pernah berhenti di satu tempat. Bukannya membayangkan ‘ekonomi’ sebagai sesuatu yang abstrak, *sistem* mekanis, liberal klasik melihat fenomena pasar sebagai *hasil* tak terencana, tak terduga, dari penyesuaian yang

tetap, dan bersamaan dari jutaan individu manusia, masing-masing dengan tujuan dan nilai-nya *masing-masing*.

Keteraturan spontan ekonomi ini, seperti yang lain, adalah hasil dari aturan tingkah laku yang bisa diprediksi di antara individu yang terlibat didalamnya. Dia dimotivasi oleh mementingkan diri dan mencari untung, tetapi diatur oleh berbagai faktor seperti persaingan, kontrak, hak pemilikan dan keadilan, prinsip yang liberal klasik percaya harus dijunjung tinggi oleh Negara untuk menjaga agar keteraturan pasar bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.

Aturan dan Properti (Kepemilikan)

Hak pemilikan properti menjadi fundamental agar beroperasinya keteraturan yang menguntungkan ini. Orang-orang dengan pemilikan yang dilindungi bisa menukarkan sesuatu dari propertinya dengan orang lain yang menilainya secara lebih tinggi – menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan lebih penting lagi, kepemilikan yang dilindungi berarti bahwa orang-orang bisa memproduksi apa yang paling unggul untuk mereka produksi dan mempertukarkannya dengan barang yang paling baik diproduksi oleh orang lain. Pengkhususan ini, atau *pembagian kerja*, membuat kita semua lebih produktif dibandingkan jika kita mencoba membuat segala hal secara amatiran oleh diri kita sendiri.

Perlindungan hak kepemilikan juga memungkinkan orang-orang untuk *menumpuk modal*, berinvestasi pada peralatan dan perlengkapan yang memungkinkan mereka untuk memproduksi lebih banyak, lebih cepat, dan lebih baik. Dan hak kepemilikan ini memampukan orang-orang untuk menahan eksploitasi oleh

kelompok mayoritas politis; tentu saja, hak kepemilikan ini menyediakan orang-orang dengan sumber daya untuk berdiri menentang kesewenang-wenangan pemerintah.

Peraturan Kepemilikan

Hak kepemilikan memungkinkan orang-orang untuk memiliki dan menggunakan properti-nya, untuk tidak mengizinkan orang lain untuk menggunakannya, untuk mendapatkan uang darinya (contohnya dengan menyewakannya) dan memberikannya kepada orang lain dengan menjual atau sebagai hadiah. Hak ini diberlakukan oleh sistem peradilan.

Tetapi untuk kepemilikan seseorang menjadi sah, properti harus didapatkan tanpa pemaksaan. Dia bisa didapatkan lewat perdagangan atau pemberian. Atau mungkin dengan mengambil sesuatu yang tidak dimiliki atau diinginkan oleh orang lain, seperti sepenggal tanah terbiar – proses yang tanpa *mencederai* orang lain, bahkan jika pemilik yang baru mendapatkan keuntungan dengan menggunakannya.

Properti bukan saja tanah, bangunan dan properti yang bisa dipindahkan. Tetapi juga termasuk kepemilikan tidak tampak yang rumit seperti saham dan obligasi, atau hak intelektual seperti hak paten dan hak cipta musik – dan tentu saja hak kepemilikan yang kita semua punya atas hidup dan kebebasan kita. Hak kepemilikan properti bisa dipegang oleh individu, organisasi, pemerintah, atau tidak oleh siapapun (ikan di laut, contohnya) – walaupun liberal klasik percaya bahwa kepemilikan pribadi pada umumnya mengatur properti lebih baik dari pada kepemilikan pemerintah, dan yang tidak dimiliki oleh siapapun berisiko terkena dampak ‘tragedi kepemilikan bersama’ yang mana sumber daya digunakan

secara berlebihan karena tidak ada pemilik yang berkepentingan untuk menjaganya.

Aturan kepemilikan bisa saja kompleks, tetapi mereka memampukan banyak orang untuk bekerja sama secara damai lewat pembagian kerja dan pertukaran sukarela. Peraturan ini telah berevolusi karena mereka membuat kerjasama menguntungkan tersebut menjadi mungkin.

Ketika orang-orang memiliki hak kepemilikan yang jelas dan bisa diterapkan, mereka akan lebih mungkin untuk menjaga dan menginvestasikan dalam properti yang bersifat sebagai sumber daya, dan menjaganya agar berguna secara produktif. Hal ini jelas menguntungkan pemilik; tetapi dia menguntungkan semua orang pula. Ini berarti buah dari investasi ini bisa tersedia untuk diperdagangkan. Perdagangan ini nantinya, mendukung spesialisasi (pembagian kerja), produktifitas, dan penyebaran nilai. Bandingkan ini dengan negara yang pecah perang dan tak berhukum di mana para petani tidak merasa ada gunanya untuk menanam dan menjaga tanaman mereka yang akan dicuri atau dihancurkan oleh gerombolan pencuri atau tentara.

Argumen Mendukung Kebebasan Ekonomi

Tidak seperti pendekatan ekonomi tradisional, liberal klasik tidak membangun *model* yang menjelaskan segalanya untuk menjelaskan fenomena ekonomi. Bagi mereka, fenomena ekonomi seperti harga, adalah *hasil* yang tidak bisa ditebak dari penyesuaian kompleks serentak dari jutaan individu. Tetapi itu tidak berarti bahwa hal ini berlangsung acak dan irasional. Sebaliknya, proses pasar mengandung banyak sekali

'kebijaksanaan' yang terakumulasi lewat proses *trial dan error* dalam jangka waktu yang panjang.

Informasi yang Bersifat Personal dan Tersebar

Faktanya, ada lebih banyak kebijaksanaan dan perencanaan dalam keadaan pasar dari pada perancangan dan perencanaan ekonomi dalam bentuk apapun, karena keteraturan dalam ekonomi bebas memiliki informasi yang lebih banyak – dan lebih *relevan* – untuk dipakai.

Semua dari jutaan individu ini memiliki lebih banyak pengetahuan yang lebih baik tentang keadaan sekitar mereka, nilai mereka, dan prioritas dari pelanggan dan pemasok mereka, dibandingkan sang pengatur ekonomi yang nun jauh.

Para perencana ini bahkan sama sekali tidak mengumpulkan informasi. Bukan hanya bahwa informasi ini begitu luas skalanya, terpecah dan terbagi-bagi, tetapi juga *personal* (pribadi). Keahlian, pengalaman, pengertian akan pasar, rasa tentang apa yang diinginkan pelanggan – ini semua adalah pengetahuan penting yang mendorong kehidupan ekonomi, tetapi yang tidak bisa disalurkan oleh perencana pusat. Haruskah kita membuat minyak goreng atau anggur? Ini bukanlah sekedar masalah perhitungan aritmatika. Satu-satunya alasan kita mengeluarkan usaha untuk menghasilkan sesuatu untuk mengkonsumsinya, dan apa yang orang lain ingin konsumsi bergantung pada kebutuhan dan nilainya – perasaan yang tidak bisa dihitung dengan penjumlahan atau pembagian, yang sangat subjektif, dan bisa berubah setiap saat bergantung pada berbagai faktor yang tak terhitung jumlahnya dan yang tidak bisa ditebak.

Tetapi keteraturan ekonomi spontan *bukanlah* tidak terencana. Sebaliknya, dia adalah hasil dari *perencanaan berkesinambungan* oleh jutaan individu, masing-masing menggunakan pengetahuan yang terpecah, terpisah, dan pribadi demi mengantisipasi keinginan dan kebutuhan orang lain dan merencanakan bagaimana mengarahkan sumber daya untuk memuaskan keinginan tersebut.

Persaingan

Kebebasan ekonomi berhasil karena, tanpa adanya pemaksaan, satu-satunya cara untuk memuaskan kepentingan diri kita adalah dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan orang lain. Liberal klasik melihat persaingan terbuka sebagai penggerak utamanya, karena ketika pelanggan memiliki pilihan dari pemasok yang mana dan produk apa yang dia akan pilih, pemasok akan saling bersaing untuk melayani kebutuhan tersebut dengan cara yang memakan biaya paling efektif. Persaingan yang sebenarnya bukanlah model ‘persaingan sempurna’ khas buku teks pelajaran ekonomi yang dingin dengan pemasok yang identik. Melainkan sesuatu yang dinamis dan proses yang manusiawi dimana pemasok yang tersebut berjuang untuk mengkhaskan tawaran mereka sehingga menarik pelanggan yang berbeda-beda dengan pilihan yang berbeda-beda pula.

‘Ketidak-sempurnaan’ inilah yang membuat pasar dinamis dan mendorong inovasi, efisiensi dan perbaikan. *Kelangkaan* dan keinginan yang tidak terpenuhi – ditunjukkan lewat naiknya harga – yang mendorong produsen untuk masuk ke pasar dan memenuhinya. Dan *Surplus* yang memberitahukan produsen bahwa sumber daya produktif sedang diboroskan. Dan variasi

serta ketersediaan berbagai macam barang yang ditawarkan yang memungkinkan perbedaan – dan bahkan pertentangan – selera dari pelanggan yang harus ditawarkan.

Utilitas Publik

Ekonomi bebas mendamaikan orang-orang dengan berbagai nilai kepercayaan yang berbeda. Pembeli dan penjual bisa bebas bekerja sama satu dengan yang lain persis karena mereka berbeda dalam mereka menilai suatu barang atau jasa tertentu. Melalui perantara uang, kita bahkan bisa berdagang dengan orang di belahan bumi yang lain, yang nilai, agama, moralitas dan cara pandangnya bisa sepenuhnya berbeda dengan kita. Dan mungkin saja, bahwa saling ketergantungan ekonomi global dari berbagai orang-orang yang berbeda dari seluruh dunia adalah daya pendorong terciptanya perdamaian yang paling kuat yang pernah ada dalam sejarah umat manusia.

Mungkin memang mementingkan diri yang memotivasi individu, tetapi lewat hak milik, pembagian kerja (spesialisasi), pasar dan pertukaran (perdagangan); mementingkan diri ini dipakai untuk keuntungan masyarakat umum. Barang-barang bisa diproduksi dengan biaya paling efektif; pelanggan dilayani dengan baik dengan tekanan untuk meningkatkan kualitas dan tekanan untuk menekan biaya; barang baru diciptakan dan nilai ditingkatkan; keinginan dipenuhi; pilihan diperluas; perbedaan antar sesama dan individualitas dihormati.

Dan bahkan jika individu dimotivasi oleh keinginan beramal, mereka akan punya kepentingan yang sama untuk menjaga sistem ini, yang mengizinkan mereka untuk memaksimalkan nilai dari apa yang mereka ciptakan dan menyebarkannya ke orang lain.

Efek Destabilisasi Pemerintah

Kebebasan ekonomi begitu penting bagi kita, dan bukan hanya karena kegiatan ekonomi memakan sebagian besar waktu kita tetapi karena ia juga penting bagi kebebasan sosial dan politik kita. Sebagai contoh, kebebasan berekspresi dipertaruhkan jika mereka yang berkuasa telah mengendalikan Koran, TV, radio, dan media daring. Kebebasan berserikat dan berkumpul akan terancam jika otoritas politik yang memiliki semua aula berkumpul. Kita tidak bisa menikmati hasil kerja kita jika negara yang mengatur semua kantor dan pabrik. Oleh karenanya liberal klasik melihat kebebasan ekonomi dan kepemilikan pribadi adalah benteng penting melawan kekuasaan negara yang berlebihan.

Ketika dulu negara-negara seperti Inggris dan AS menjadi kaya, pemerintah mereka lebih kecil dari apa yang ada sekarang ini. Saat ini, hampir semua negara memiliki pemerintah yang besar yang membutuhkan pajak tinggi untuk mempertahankannya. Liberal klasik melihat ini sebagai serangan terhadap hak kepemilikan. Pajak yang sedang-sedang saja mungkin tidak bisa dihindari untuk menyediakan fungsi penting pemerintahan seperti pertahanan dan peradilan. Tetapi pajak yang tinggi mengurangi niat untuk bekerja dan menabung, mematikan dinamisme kreatifitas pasar, dan mengalihkan sumber daya dari penggunaan dengan nilai yang tinggi ke arah yang dipilih oleh otoritas politik (yang sering tidak dipilih secara demokratis).

Regulasi, juga, mungkin diperlukan untuk menjaga pasar tetap bebas – contohnya menjaga kompetisi terbuka dan melawan eksploitasi. Tetapi sekali lagi, dengan mengekang persetujuan dagang, regulasi bisa menghilangkan nilai yang diciptakan oleh pertukaran sukarela. Dan dalam semua kasus, banyak regulasi

diciptakan untuk melayani kepentingan politik dan kelompok, bukan masyarakat umum.

Liberal klasik menyimpulkan bahwa intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi biasanya menimbulkan kekacauan. Karena pajak tidak populer, pemerintah berhutang – mengambil uang generasi dari masa depan, tanpa izin mereka. Mereka membiarkan nilai mata uang mereka berkurang; tetapi *inflasi* tersebut mendestabilisasi sistem pasar, mengacaukan pesan yang diberikan oleh pergantian harga karena tenggelam dalam keriuhan kenaikan harga, membuat lebih sulit bagi orang-orang untuk melihat ke mana seharusnya usaha dan sumber daya mereka membawa nilai yang paling tinggi. Dan pemerintah sering tergoda untuk memanipulasi nilai uang dan tingkat suku bunga dengan harapan bisa menstimulasi terciptanya musim ekonomi berjaya – sebuah pelencengan dari realitas pasar yang pasti berakhir dengan pecahnya gelembung ekonomi, pengangguran dan resesi. Liberal klasik akan lebih memilih untuk melarang intervensi merusak seperti ini.

Kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan tanpa negara

Liberal klasik juga skeptis dengan keterlibatan pemerintah dalam menyediakan layanan seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan – yang menghabiskan kebanyakan anggaran pemerintah di negara maju.

Bantuan kesejahteraan pemerintah, sebagai contohnya, bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan tetapi bisa saja menciptakan kebalikannya, neraca keadilan memihak ke pengangguran (yang disubsidi) dari pada mereka yang bekerja (yang dipajaki). Kebanyakan para pemikir liberal klasik terkemuka

mendukung paling tidak adanya penyediaan bantuan kesejahteraan minimum yang disediakan negara, tetapi mereka percaya bahwa dukungan seperti ini paling baik disediakan lewat mekanisme pasar. Sebagai contoh, mereka akan lebih mendukung orang-orang mengasuransikan diri mereka terhadap risiko pengangguran, masa sakit dan disabilitas, dengan lembaga amal menggantikan pemerintah – membantu pada masa sulit, atau dengan negara membayar premi bagi mereka yang tidak mampu membayarnya. Hal ini, kata mereka, akan sangat mengurangi pemborosan. Dan akan menciptakan lebih banyak insentif positif, dan lebih sedikit insentif yang menyeleweng, dibandingkan dengan sistem bantuan pemerintah saat ini, yang sering menciptakan ketergantungan (baik diantara penerima bantuan maupun diantara birokrasi negara yang mengatur sistem ini).

Bantuan kesehatan, juga, sering disediakan negara atau sangat diregulasi, membuat orang-orang tanpa pilihan untuk memilih asuransi atau penyedia jasa. Karena kompetisi bekerja dengan baik di pasar lainnya, liberal klasik bertanya mengapa tidak diterapkan juga bagi rumah sakit, menjaga harga rendah dan kualitas menjadi tinggi – sehingga yang miskin, yang saat ini mendapati layanan kesehatan sulit atau tidak bisa dijangkau, akan menjadi yang paling diuntungkan. Dan usaha asuransi yang memang benar-benar bersaing akan membuat orang-orang sadar tentang potensi biaya dari gaya hidup tidak sehat, tanpa perlu adanya intimidasi dari pemerintah.

Pendidikan seringkali menjadi monopoli negara, menyingkirkan penyedia alternatif lain – dan tentu saja ide alternatif, yang hanya menjadi bahaya bagi masyarakat yang seharusnya bebas. Sehingga liberal klasik mendukung kompetisi

antar sekolah, yang sekali lagi akan membantu yang miskin, yang paling banyak terjebak di sekolah 'kualitas buruk'. Beberapa liberal klasik, seperti Mill, percaya bahwa pendidikan dasar haruslah wajib, walaupun yang lain yakin bahwa tidak perlu demikian, karena menyekolahkan anak adalah salah satu prioritas tertinggi orang tua bagi anaknya; dan bahwa lembaga amal sekali lagi bisa menyelesaikan kesulitan ini.

Perdagangan dan Proteksionisme

Liberal klasik bersikukuh bahwa perdagangan internasional harus sebebaskan perdagangan dalam negeri. Hal ini memungkinkan antar negara berspesialisasi dalam hal di mana mereka paling unggul; dan ini membuat pelanggan bisa menikmati barang-barang dari berbagai penjuru dunia. Dalam sejarah, negara-negara yang terbuka untuk perdagangan, seperti Hong Kong, berkembang paling cepat; dan terbukanya perdagangan di China dan India akhir-akhir ini telah mengangkat miliaran orang dari kemiskinan.

Perdagangan internasional, menurut liberal klasik, memperluas kerjasama, toleransi dan ide antar negara. Tetapi, dimotivasi oleh kepentingan politik, terlalu banyak negara mencoba melindungi produsen dalam negerinya dengan kuota impor dan tariff. Hal ini menghalangi para warga negara yang bisa mengimpor untuk menikmati hasil kerja mereka, dan berarti lebih sedikit pilihan bagi konsumen, lebih sedikit spesialisasi, lebih sedikit sumber daya digunakan secara efisien, dan hilangnya nilai. Ini juga menuntut pada pembalasan dari negara yang dihalangi menjual, perang dagang dan ketegangan internasional. Tetapi ini terjadi hanya karena pemerintah yang terlalu usil mengganggu kebebasan kegiatan ekonomi.

LIBERALISME KLASIK SAAT INI

Meredupnya dan Kebangkitan Kembali

Mundurnya Liberalisme Klasik

Liberalisme klasik berjaya pada abad tujuh belas dan delapan belas; dan keadaan inilah yang menyebabkan masa kejayaan dan kemajuan perdagangan bebas dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada abad ke sembilan belas. Tetapi pada akhir abad ke sembilan belas, ide-ide lain mulai muncul. Industrialisasi, salah satu hasil dari kebebasan ekonomi, membawa masalah sosial - kekacauan dalam keluarga, perpindahan yang cepat ke perkotaan, dan perasaan tentang adanya ketimpangan yang lebih tinggi karena orang-orang yang tinggal dalam jarak yang lebih berdekatan.

Memasuki abad dua puluh, masyarakat industrial menjadi ladang subur bertumbuhnya sosialisme, komunisme dan nantinya nasional sosialisme, dilengkapi dengan militerisme yang bersanding dengan ideologi yang gandrung terhadap sentralisasi. Tetapi bukannya menentang sentralisme setelah konflik besar (perang dunia I), pemenang pasca-perang menyimpulkan bahwa struktur kendali terpusat bisa membantu mereka 'memenangkan perdamaian' sebagaimana struktur kendali terpusat mampu 'memenangkan peperangan'.

Muncul juga saat itu rasa percaya diri yang besar dalam hal pengetahuan ekonomi. Ekonom percaya bahwa mereka memiliki

pengetahuan, dan alat untuk mengendalikan lapangan kerja dan hasil produksi, dan bahwa perencanaan terpusat akan terbukti jauh lebih adidaya dibandingkan apa yang dianggap sebagai 'irasionalitas' pasar.

Mengurai Konsensus

Walaupun pada saat itu tampaknya pandangan ini sedang jaya-jayanya, tetapi tidak butuh waktu lama untuk pandangan ini menghancurkan dirinya sendiri. Berkembangnya transportasi dan komunikasi menunjukkan kelemahan dalam tatanan ekonomi, sosial dan politik dari blok komunis. Jerman Barat mengalami kemajuan pesat setelah (yang disebut) Api Unggun Pengendalian³ dicabut oleh Ludwig Erhard pada suatu hari Minggu pagi tahun 1948 - sementara Jerman Timur, di sisi seberang tembok Berlin yang terkenal, menjadi lebih suram. Hal yang sama terjadi diantara dua Korea ketika semenanjung tersebut terpisah antara bagian yang bebas dan komunis. Lebih banyak penduduk dunia yang terdidik dan tercerahkan menyadari bahwa militerisme bukanlah perlindungan tetapi ancaman terhadap ekonomi yang saling berketergantungan.

Kebijakan ekonomi pasca-perang juga menunjukkan kelemahannya. Kebijakan ekonomi ekspansionis oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes (1883 - 1946), yang dirancang untuk masa depresi, merubah keuntungan yang diciptakan oleh perdamaian menjadi kesempatan memperbesar pemerintah dan merebaknya inflasi - dan yang tidak bisa dijelaskan oleh

³ Istilah yang dipakai pada waktu itu untuk menyebut pengendalian yang berlebihan oleh pemerintahan di Eropa pasca perang dunia II terhadap harga dan produksi

Keynesian, terjadi bersamaan dengan pengangguran dan stagnansi ekonomi.

Kelahiran Kembali Liberalisme Klasik

Bagi liberal klasik, semua ini bukanlah hal yang membingungkan. Sebagaimana yang Hayek jelaskan, hal ini menunjukkan sebuah 'kesombongan berbahaya' untuk membayangkan bahwa kita bisa memanipulasi keteraturan spontan dari kehidupan sosial dan ekonomi samaunya kita.

Walaupun tercerai-berai diantara rimba intelektual, liberal klasik berkumpul lagi untuk menyiapkan peluru ide dan memikirkan kembali ide mereka sehingga bisa relevan pada masa modern ini. Serangan balasan ini dimulai pada April 1947, ketika Hayek mengumpulkan kelompok kecil pemikir Liberal Klasik dari Eropa dan Amerika di tepi Danau Jenewa, pada pertemuan pertama dari apa yang nantinya disebut sebagai Masyarakat Mont Pelerin (*Mont Pelerin Society*). Para anggotanya akan kembali ketempat asalnya dan mendirikan berbagai *think tank* (lembaga pemikir) seperti *Institute of Economic Affairs*, yang nantinya menghasilkan lebih banyak lagi kelompok sejenis.

Beberapa anggotanya, termasuk Hayek sendiri, akan menerima Hadiah Nobel untuk kontribusi mereka terhadap kebangkitan kembali ekonomi liberal klasik: penerima antara lain antara lain George Stigler (1911 - 91), Milton Friedman (1912 - 2006) dan Gary Becker (1930 - 2014) contohnya, akan menjadi pemikir terkemuka dari apa yang disebut Aliran Ekonomi Chicago, yang menekankan pada perlunya mata uang yang sehat, pembatasan pemerintah, dan kebebasan pasar; sementara penerima Nobel lainnya akan menjadi perintis Aliran Pilihan

Publik yang menentang apa yang dianggap sebagai rasionalitas pembuatan keputusan pemerintah. Pada akhir abad ke dua puluh, ide-ide mereka menjadi acuan banyak pemimpin dunia.

Arti dari Liberalisme Klasik

Satu hal yang liberalisme klasik gagal lakukan adalah mencari nama yang tepat untuk pemikiran mereka. Yang dikatakan sebagai 'klasik' diartikan jauh ke belakang ke zaman Locke dan Smith; dan walaupun ada banyak kebijaksanaan dalam ide mereka, dunia telah berubah, dan liberal klasik kontemporer telah mengembangkan pemikiran mereka dalam banyak hal agar menyesuaikan dengan perkembangan dan argumen termutakhir.

Sayangnya bagi mereka, kata 'liberal' telah dicaplok (paling tidak di Amerika, walaupun dari sinilah kerancuan ini menyebar kemana-mana) oleh mereka yang mendukung hak sipil dan kebebasan sipil, tetapi menaruh curiga pada kebebasan ekonomi dan kepemilikan pribadi, dan percaya bahwa negara memainkan peran besar dalam memperbaiki kesalahan masa lalu dan memajukan kesetaraan. Kata 'liberal baru' dan 'liberal modern' juga telah diambil.

Kata 'neo-liberal' mungkin bisa, tetapi kata ini sebelumnya telah dipakai sebagai kata hinaan oleh para pengekritik liberalisme klasik kontemporer. Kata ini berasal dari para pendukung 'Ordo-liberal' sistem ekonomi pasar sosialnya Jerman Barat pasca perang. Tetapi akhir-akhir ini kata ini sering dijadikan sebagai sindirian, di mana liberal klasik digambarkan sebagai ekonom fanatik berpikiran sempit, tanpa nurani sosial atau memikirkan mereka yang berkekurangan, membela setiap aktifitas bisnis, dan membela kebijakan *laissez-faire* dan – walaupun ada - peran

negara sebagai penjaga malam. Posisi *straw man* (orang-orangan sawah, istilah dalam argumentasi yang menggambarkan kesalahan penyederhanaan sebuah kelompok sosial atau pemikiran) sangat mudah untuk diserang, tetapi sebagaimana yang kita telah lihat, semua penggambaran ini sangatlah jauh dari apa yang sebenarnya dipercaya oleh liberal klasik.

Spektrum Liberal Klasik

Akan tetapi, liberalisme klasik bukanlah suatu tatanan ideologi, melainkan, sebagaimana yang telah kita lihat, adalah sebuah rentang spektrum dari pendekatan yang menjawab pertanyaan tentang masalah kebebasan sosial, ekonomi, dan politik. Di ujung yang satu ada anarkis (dan beberapa libertarian), yang sama sekali menolak adanya kebutuhan akan lembaga pemerintah. Di ujung yang satunya ada konservatif, yang percaya bahwa negara memiliki peran yang kuat, bukan hanya dalam membela hak-hak dasar, tetapi juga dalam menjaga nilai moral atau politis tertentu.

Liberal klasik lebih menekankan pada pemerintah perwakilan, berbudaya dan aturan-aturan yang mendukung terciptanya keteraturan sosial dan ekonomi secara spontan, dibandingkan libertarian; walaupun mereka lebih kurang rela dibandingkan konservatif, untuk mengorbankan kebebasan demi kebaikan sosial, walaupun banyak diantara mereka yang menekankan pentingnya kebaikan sosial.

Tetapi, sekali lagi, perbedaan dalam liberal klasik dimotivasi oleh perbedaan dalam prinsip inti mereka. Bagi beberapa, contohnya Friedman, kebebasan itu penting, tetapi akibat dari kebebasan yang lebih penting; mereka menginginkan deregulasi, privatisasi dan pajak rendah bukan hanya karena mereka

memajukan kebebasan, tetapi juga keuntungan sosial yang dihasilkan. Yang lain, seperti Hayek, melihat tindakan bebas, dengan dikekang oleh peraturan legal dan moral tertentu, adalah fondasi penting dari keteraturan spontan. Sementara yang lain, seperti Nozick, menekankan bahwa semua manusia memiliki hak alamiah yang tak bisa diganggu gugat, kecuali untuk mencegah ketidakadilan.

Tetapi walaupun dengan pandangan yang majemuk, liberal klasik bersetuju dalam prinsip dasarnya. Mereka percaya bahwa tujuan utama negara adalah untuk *mengamankan hak* kita untuk hidup, kebebasan, kepemilikan, dan mengejar kebahagiaan. Karena fungsi ini sangat penting, negara mungkin tidak menjadi kecil, tetapi agar kita dapat melindungi kebebasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, negara harus dibatasi dalam cakupan kekuasaannya. Liberal klasik percaya bahwa *pertukaran sukarela* adalah cara terbaik untuk meningkatkan dan menyebarkan nilai, memperluas semangat kreativitas dan mendukung keberagaman dan ekspresi-diri. Mereka memiliki *antipati terhadap absolutisme (kemutlakan)* dalam kehidupan politik, ekonomi, atau sosial, tetapi mempertahankan bahwa kita memerlukan beberapa aturan moral dan legal untuk menjaga kelancaran operasi keteraturan spontan ekonomi dan sosial.

Mereka percaya bahwa individu seharusnya *mengambil tanggung jawab* atas setiap tindakan mereka; sementara kita bebas dan memang sering membantu orang lain, tidak ada yang punya *hak* untuk menuntut bantuan dari orang lain. Tetapi mereka percaya setiap individu manusia memiliki *status moral yang setara*, dan *kesetaraan perlakuan dihadapan hukum*.

Internasionalisme Liberal Klasik

Dalam hal kepercayaan mereka liberal klasik adalah internasionalis, mengakui bahwa seluruh umat manusia memiliki hak dan kebebasan dasar. Tetapi mereka tidak mendukung sebuah ide Utopis tentang pemerintahan dunia, atau bahkan masyarakat sipil global. Secara realistis, mereka menerima bahwa setiap warga negara sangat terikat pada kebangsaannya; mereka hanya ingin untuk mendidik mereka dan mencegah konflik antar negara. Dalam hal inilah, hubungan transportasi dan saling ketergantungan ekonomi antar negara bisa sangat membantu – menyebarkan ide, kesempatan, pilihan dan kebebasan pada saat bersamaan.

Liberal klasik percaya bahwa prinsip-prinsip kebebasan yang diaplikasikan di negara mana saja pada prinsipnya bisa saling dipadukan secara internasional, seperti kebebasan lintas batas dari perdagangan, arus modal dan migrasi, dan non-diskriminasi terhadap orang asing maupun produk, jasa, dan properti mereka. Tetapi, sebagaimana pernyataan ordo-liberal Jerman Wilhelm Ropke (1899 – 1966), internasionalisme dimulai dari rumah. Jika kita menjaga keadilan hukum, kebebasan dan supremasi hukum dalam negara kita sendiri, paling tidak ada kemungkinan prinsip yang sama akan kita jadikan pertimbangan dalam melakukan perjanjian dan perlembagaan internasional. Liberal klasik dalam ide mereka tidak ada sama sekali ambisi imperialistis; menciptakan imperium bukanlah cara untuk memenangkan pikiran orang lain, walaupun sering bisa memaksakan pemikiran orang lain. Liberal klasik menerima baik kemajemukan antar budaya dan negara sebagaimana juga antar komunitas, keluarga dan individu.

Berurusan dengan Kelompok Illiberal

Satu permasalahan yang menarik bagi liberal klasik bagaimana mereka berurusan dengan kelompok atau bangsa yang sangat tidak liberal (*illiberal*). Permasalahannya menjadi lebih mendesak. Sejak dulu sering saja ada kelompok fundamentalis agama dan politik yang menolak setiap ide kebebasan politik, sosial dan ekonomi dan akan dengan senang hati menghancurkan kebebasan kita jika mereka mampu melakukannya. Tetapi saat ini, dengan kemudahan melakukan perjalanan dan teknologi merusak dengan mudah didapatkan, ancaman potensial menjadi lebih berbahaya.

Liberal klasik pada umumnya menyukai toleransi dari pada intervensi, yang mereka lihat bertentangan dengan hak orang untuk menentukan hidupnya. Tetapi jika ada suatu kelompok atau negara yang telah menetapkan tujuan untuk menghancurkan kebebasan dan toleransi itu sendiri, pertanyaannya adalah seberapa besar toleransi yang bisa ditoleransi oleh liberal klasik? Mill, menulis pada abad sembilan belas, berargumen bahwa kita semua berhak untuk mengintervensi setiap negara 'barbar', tetapi tidak untuk yang beradab, karena hanya bangsa 'beradab' yang punya nilai moral sejajar dengan kita; dan, dalam keadaan apapun, hampir tidak mungkin intervensi dari negara 'beradab' bisa mengubah mereka. Lebih kekinian, John Rawls menggunakan argumen yang sama, bahwa kita bisa bertoleransi dengan negara yang 'baik-baik' tetapi tidak dengan negara 'kriminal'.

Dengan cara tipikalnya, liberal klasik memiliki pandangan beragam dalam isu seperti ini, beberapa menekankan hak menentukan hidup, ketangguhan masyarakat bebas terhadap serangan illiberal, dan tidak bergunannya usaha untuk mencoba merubah pandangan agama orang lain; yang lain berargumen

bahwa kita harus melakukan intervensi untuk membela diri. Strategi terakhir di atas memunculkan pertanyaan lain, tentang bagaimana mengidentifikasi ketika kelompok atau bangsa memang benar illiberal dan seberapa besar ancamannya. Tiongkok, sebagai contoh, tanpa kebebasan politik dan sedikit kebebasan sosial, tetapi dengan cukup banyak kebebasan ekonomi; sementara kekuatan ekonomi dan militernya menakutkan banyak orang. Apakah hal itu berarti ancaman bagi bangsa-bangsa liberal?

Liberalisme di Dalam Negeri

Isu yang sama muncul mengenai bagaimana berurusan dengan kelompok illiberal di dalam negeri. Liberal klasik khawatir bahwa intervensi (seperti melarang kelompok agama atau politik tertentu) bertentangan dengan prinsip inti mereka, dan melemahkan otonomi dan kebebasan berekspresi orang lain. Mereka cenderung bertoleransi dengan kelompok agama atau politik tertentu, walaupun dalam kasus-kasus tertentu (kebangkitan Nasional Sosialisme di Jerman, contohnya) mereka menyesalinya.

Di sisi lain, banyak liberal klasik akan berpikir bahwa adalah tindakan yang benar untuk mencegah pelarangan anak wanita mendapat pendidikan, contohnya, atau sunat wanita dan pernikahan yang dipaksakan. Hal-hal di atas mereka dilihat perlu dilarang karena adalah pelanggaran hak dan kebebasan yang dimiliki setiap manusia.

Liberal klasik tidak punya jawaban atas semua pertanyaan. Tetapi pada umumnya mereka mengambil sikap bahwa tindakan negara haruslah se-minim mungkin. Beberapa berpandangan

bahwa kita hidup dalam zaman pluralisme, dan cukup dewasa untuk bertoleransi dengan tata kelakuan dan adat istiadat yang berbeda, sehingga intervensi pada umumnya tidak bisa dibenarkan kecuali ada kasus 'publik' yang luar biasa untuk mendukungnya. Beberapa menekankan bahwa, dalam jangka panjang, perdebatan dan ajakan adalah lebih efektif dalam merubah pemikiran orang. Hukum melarang sunat perempuan, contohnya, mungkin kurang efektif mengakhiri praktek-praktek ini dibandingkan jika wanita yang telah mengalaminya menghentikan untuk dilakukan kepada anak-anak mereka. Dan kebebasan tersebutlah yang harus dilindungi oleh hukum.

Sekali lagi, apa yang liberal klasik lakukan jika kelompok illiberal menjadi berkuasa dan menggunakan kekuasaan politiknya untuk mencabut hak dan kebebasan rakyat? Bagi beberapa orang, seperti Paine, hal tersebut sudah cukup menjadi pembenaran untuk bangkit dan menggulingkan pemerintahan tersebut. Tetapi secara realistis, liberal klasik tahu bahwa keadaan haruslah sangat buruk sampai hal seperti itu bisa terjadi.

Impian Liberal Klasik

Liberal klasik tidak menghayalkan apapun tentang dunia. Manusia tidaklah sempurna; dunia mereka tidak bisa dijelaskan hanya dengan prinsip, ataupun diatur dengan perhitungan sederhana. Sebuah kejadian merupakan hasil dari berbagai tindakan yang biasanya tidak bisa diprediksi, dan sering tidak sengaja dirancang, oleh manusia-manusia yang sering kali tidak rasional dan jauh dari menguntungkan. Kebijakan terbaik adalah mengakui semua hal ini, dan mendaya gunakan kekurangan manusia dalam cara yang menghasilkan keuntungan bagi manusia, seperti pasar bebas.

Liberalisme klasik, sebagaimana yang bisa kita lihat dari sejak awal, adalah ide manusiawi. Dia menerima manusia sebagai makhluk yang majemuk. Liberalisme klasik berusaha untuk memaksimalkan ruang dan kesempatan bagi mereka untuk mengejar tujuan mereka yang berbeda-beda. Dan mencari cara di mana warga negara yang begitu berbeda-beda di seluruh dunia bisa bekerja sama dalam damai.

Liberal klasik menginginkan perdamaian dunia, dengan pemaksaan yang minimum (dan bahwa pemaksaan dilakukan hanya oleh pemerintah perwakilan dan sah). Mereka ingin dunia menikmati kesejahteraan yang dihasilkan oleh pertukaran sukarela dalam tatanan ekonomi bebas, dan menginginkan sistem hukum yang melindungi hak setiap umat manusia dan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan dengan damai terhadap ambisi masing-masing orang.

Mereka mendambakan pembatasan kekuasaan, melihat kekuasaan pemerintah sebagai penyebab konflik antar negara dan penindasan dalam negeri. Mereka menginginkan supremasi hukum yang menghapuskan kekuasaan sepihak dan membuat penguasa kita dikuasai hukum yang sama seperti rakyat biasa. Mereka mendukung kebebasan bagi setiap orang untuk berpikir, berbicara, bekerja dan mengejar tujuan masing-masing, selama mereka tidak saling melukai yang lain dalam prosesnya, dan mereka menekankan pentingnya sistem peradilan yang independen untuk menjaga keteraturan. Mereka mendukung kebebasan orang-orang untuk mencapai tujuan pribadinya dengan caranya sendiri, bahkan jika ini adalah usaha menghancurkan diri, dan tidak ingin siapapun untuk harus meminta izin penguasa sebelum melakukan sesuatu. Dan, yang lebih penting lagi, mereka

ingin merancang sebuah ruang pribadi dimana penguasa politik tidak punya hak untuk turut campur sama sekali dalamnya.

Liberal klasik percaya terhadap keteraturan ekonomi bebas. Mereka percaya bahwa meluasnya kebebasan ekonomi yang menciptakan di seluruh dunia pendidikan yang lebih baik, angka harapan hidup yang lebih tinggi, umur panjang yang meluas, terbebasnya orang-orang dari penyakit dan lebih banyak kesempatan, lebih khusus bagi yang paling miskin. Hal-hal ini telah terjadi jauh sebelum adanya sosialisme dan intervensi menjadi umum, dan bahkan sekarang ini negara yang paling miskin dan paling terkebelakang berkembang adalah yang yang paling terakhir membuka diri bagi ide pasar bebas dan perdagangan internasional – memungkinkan orang-orang di mana saja untuk menjual hasil kerjanya di pasar yang lebih jauh, meningkatkan jumlah spekulasi dan efisiensi dari produsen di negara-negara yang berbeda, menciptakan dan menyebarkan nilai. Dengan sistem harga yang mendorong orang-orang untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan, liberal klasik percaya bahwa tidak ada batasan dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Inovasi, perbaikan, dan usaha dari setiap orang untuk memperbaiki keadaannya akan selalu sama, tetap dan tidak terganggu selama legislator dan regulator mengijinkannya.

Dunia Liberal Klasik?

Apakah kita sudah hidup dalam dunia seperti ini? Masih jauh; dalam zaman penuh kerumitan, ketidakstabilan, ketidakpastian, dan keberagaman, banyak orang tetap berpaling pada pemerintah untuk perlindungan dan keamanan ekonomi. Dan ketika pemerintah menjadi lebih besar, masalah pilihan publik pun

membesar. Lebih banyak sumber daya yang dikendalikan pemerintah, lebih menarik bagi kelompok kepentingan untuk meminta bantuan dari pemerintah, dan menjadi lebih penting mereka untuk disenangkan oleh para politisi.

Negara-negara mungkin akan menyadari, pada akhirnya, tentang kegagalan kepemilikan bersama dan menswastanisasi industri negara mereka; tetapi hak kepemilikan telah dibebankan dengan berbagai aturan. Mungkin para politisi yang berkuasa bukan lagi dari sekelompok kecil penguasa, tetapi bukan berarti mereka tidak lagi semena-mena, dengan mengeluarkan berbagai hukum yang menurutnya untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri.

Liberal klasik tetap tidak berhasil dalam membuat mereka yang berkuasa mengerti batasan kekuasaan mereka yang sah; dan lagipula mengapa yang berkuasa ingin membatasi kekuasaan mereka? Tetapi tidak diragukan lagi bahwa dukungan terhadap kebebasan ekonomi, politik dan sosial sedang menyebar ke seluruh dunia, terima kasih pada meningkatnya perjalanan antar bangsa, pendidikan dan komunikasi. Liberalisme klasik mungkin sebagian berakar pada warisan dari Locke, tetapi salah satu kehebatannya adalah dia tidak berusaha memaksakan manusia untuk menuruti sebuah model asing; melainkan, dia berjuang untuk meluaskan optimisme dan kemampuan beradaptasi dari umat manusia di seluruh dunia.

PARA PEMIKIR UTAMA LIBERAL KLASIK

John Locke (1632 – 1704), Filsuf dari Inggris

Banyak orang menganggap Locke sebagai pendiri liberalisme klasik. Setelah pengasingan di Perancis karena permusuhan dengan wangsa Stuart, dia menulis bukunya *Two Treatises of Civil Government* (Dua Risalah Tentang Pemerintahan Sipil) (1690), membenarkan penggulingan James II, mencemooh ‘hak ilahi’ para raja dan menjelaskan bahwa kekuasaan sah pemerintah didasarkan pada kontrak dengan rakyat, bukan ‘paksaan dan kekerasan’. Dalam keadaan alamiah, dia berspekulasi, setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan hidup, kesehatan dan kepemilikannya – yang mereka dapatkan dengan ‘menggabungkan kerja mereka’ dengan sumber daya alam – dari perampasan oleh orang lain. Untuk melindungi *hak alamiah* ini secara damai, mereka membuat kontrak untuk mendirikan sebuah pemerintah; jika pemerintah ini gagal untuk melindungi hak mereka, mereka dibenarkan untuk menggulingkannya. Pemikiran ini memberi pengaruh besar sehingga terciptanya revolusi Amerika dan Perancis dan pemikir konstitusional seperti Thomas Jefferson (1743 – 1826).

Bernard Mandeville (1670 – 1733), Satiris Kebangsaan Inggris-Belanda

Puisi satirikal karya Mandeville *The Grumbling Hive* (Sarang Lebah Yang Ribut) (1705) diterbitkan kembali dengan judul *The*

Fable of the Bees (1714), mengejutkan para pembaca dengan menyarankan bahwa mementingkan diri memajukan industri, perdagangan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Dalam sarang lebah hayalannya, lebah hanya mementingkan diri mereka sendiri, tetapi dengan memuaskan hasrat mereka, murni untuk kepuasan diri, mereka secara tidak sengaja memperkaya orang lain dan menyebarkan kekayaan keseluruhan koloni. Ide tentang keteraturan ekonomi spontan didasarkan atas kepentingan diri ini didukung oleh model 'tangan tak nampak' Adam Smith (1723 – 90) dan nantinya dielaborasi oleh Friedrich Hayek (1899 – 1992).

Voltaire [François-Marie Arouet] (1694 – 1778), Penulis Dari Perancis

Diasingkan dari Perancis oleh hukum kebangsawanan, Voltaire pergi ke Inggris dan tertarik dengan kebebasan sipil dan pemerintahan konstitusionalnya, dan pemikiran liberal klasik-nya. Dia memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk mendukung kebebasan dasar, toleransi, kebebasan berbicara dan perdagangan bebas. Bukunya *Philosophical Letters on the English* (1734) mengkritisi iliberalisme Perancis; dia mendorong penggulingan kekuasaan aristokratis dan mengkritisi intoleransi dari Gereja. Walaupun dipenjarakan di Bastille, dia terus menyuarakan perlawanan terhadap represi yang merajalela di Eropa daratan.

Adam Ferguson (1723 – 1816), Teoritikus sosial dari Skotlandia

Ferguson berargumen bahwa dengan mengejar kebahagiaannya sendiri, orang-orang menghasilkan dunia dengan keberagaman

kreatifitas, efisiensi yang dibentuk oleh pembagian kerja, dan inovasi, yang mendorong kemajuan. Dia menjelaskan tentang spontanitas alamiah dari lembaga sosial, dengan menulis: 'bangsa-bangsa secara tidak sengaja mendirikan lembaga-lembaga, yang tentu saja hasil tindakan manusia, tetapi sama sekali bukan hasil rancangan manusia'. Ide ini menjadi dasar bagi pemikir se-jamannya Adam Smith (1723 – 90).

Adam Smith (1723 – 1790), Filsuf dan Ekonom Skotlandia

Adam Smith menyebut 'tangan tak nampak' hanya sekali dalam bukunya *The Wealth of Nations* (Kesejahteraan Bangsa-Bangsa) (1776), tetapi ide berpengaruhnya ini merasuk seluruh bukunya. Sebagaimana pemikir sezaman dengan Adam Ferguson (1723 – 1816), lembaga-lembaga manusia bisa tumbuh tanpa direncanakan oleh siapapun. Smith tidak berpikir bahwa orang-orang secara alamiah egois atau tidak peduli dengan sesamanya, sebagaimana mereka juga menginginkan orang lain peduli dengan mereka; tetapi mereka mementingkan diri, punya kepentingan yang kuat (tetapi sah-sah saja) akan keuntungan mereka sendiri. Tanpa adanya pemaksaan, mereka bisa mendapatkan kepentingan diri ini dengan melayani kepentingan orang lain; sehingga untuk menolong diri mereka, mereka harus menolong orang lain. Pertukaran yang suka rela seperti ini, Smith tunjukkan, menciptakan nilai bagi *kedua-belah* pihak; jika tidak, mereka tidak akan saling berdagang. Dia menekankan bahwa spesialisasi dan *pembagian kerja*, yang dimungkinkan dengan proses pertukaran, sebagai pendorong utama terciptanya efisiensi dan kesejahteraan, baik di dalam maupun antar negara; argumennya yang

berpengaruh membantu terciptanya era besar perdagangan bebas pada abad Sembilan-belas.

Thomas Jefferson (1743 – 1826), pemimpin revolusioner Amerika

Jefferson percaya bahwa Tuhan telah menganugerahkan bagi kita semua hak alamiah dan hak ‘tak terpisahkan’, termasuk ‘hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan’. Dia percaya bahwa rakyat secara alamiah, merdeka untuk bertindak sekehendak mereka, asalkan mereka tidak melanggar kebebasan yang sama yang dimiliki orang lain. Dipengaruhi oleh ide-ide John Locke (1623 – 1704), dia percaya bahwa legitimasi pemerintah bersandar pada kontrak antara rakyat dan perwakilan yang mereka pilih. Dia menaruh curiga terhadap pemusatan kekuasaan, entah dalam pemerintahan maupun dunia usaha. Dia sangat menolak intoleransi agama, sebagaimana juga terhadap absolutisme (kemutlakan) politis.

Frédéric Bastiat (1801 – 50), Teoritikus politik Perancis

Pada zaman pembatasan perdagangan oleh ‘Sistem Kontinental’-nya Napoleon, Bastiat berargumen mendukung kebebasan individu dan pasar bebas. Dia menganggap pemerintah tidak bisa diharapkan, inefisien, dan mudah terjebak dalam kepentingan pebisnis, menjadikannya sebagai ‘fiksi besar dimana setiap orang berusaha untuk hidup dengan dibiayai oleh orang lain’. Satir terkenalnya yang menyinggung proteksionisme dengan petisi fiksi oleh para pembuat lilin, menuntut pemerintah untuk bertindak membantu mereka menghadapi persaingan melawan matahari. Pemerintah, dia percaya, ada untuk mempertahankan kebebasan

dan kepemilikan – hak yang ada sudah ada sebelum pemerintah. Menjadi pengantar sebelum munculnya ekonom aliran Austria seperti F. A. Hayek (1899 – 1992), dia membela pasar, yang dituntut oleh mementingkan diri, mengatur kegiatan ekonomi dan menuntun sumber daya ke arah penggunaan yang paling bernilai.

Richard Cobden (1804 – 1865), Pengusaha dan politisi Inggris

Bersama John Bright (1811 – 89), Cobden adalah tokoh utama aliran Manchester, yang – sebagaimana Adam Smith (1723 – 90) – mempertahankan bahwa pasar bebas akan membuat barang pokok menjadi tersedia bagi semua orang dan menciptakan masyarakat yang lebih setera. Pada 1838, mereka mendirikan Liga *Anti Corn-Law* (undang-undang yang membatasi impor gandum di Inggris), menuntut penghapusan (dan nantinya berhasil mereka lakukan) tarif proteksionis terhadap impor gandum, yang menaikkan harga roti dan menyebabkan sering terjadinya kelangkaan. Mereka juga mengampanyekan perlunya pengertian dan perdamaian antar negara, yang mereka percaya bisa dimajukan dengan perdagangan bebas. Sebagai negarawan, Cobden membantu sehingga lebih terbukanya perdagangan antara Inggris dan Perancis.

John Stuart Mill (1806 – 73), Filsuf dan reformis Inggris

Buku Mill; *On Liberty* (Tentang Kebebasan) (1859) dianggap sebagai buku klasik libertarian, walaupun pembelaannya terhadap kebebasan didasarkan pada kebaikan yang dihasilkan, bukan pada teori hak alamiah yang abstrak. Walaupun mengkritisi pemerintahan yang besar, dia berargumen mendukung campur

tangan pemerintah dalam banyak aspek, bukan hanya dalam peran melindungi kebebasan. Mengikuti mentor utilitarian-nya; Jeremy Bentham (1784 – 1832), Mill menganggap bahwa kebaikan adalah apa yang menghasilkan kebahagiaan dengan jumlah terbesar, walaupun dia juga percaya bahwa kesenangan yang lebih tinggi lebih baik dari yang rendah. Individu harus bebas mengikuti hasratnya sendiri, selama mereka tidak melukai orang lain untuk mencapainya. Satu-satunya penggunaan kekuasaan pemerintah yang sah guna mencegah pencederaan fisik atau ancamannya, dan sekedar ketidaksetujuan kita terhadap tindakan orang lain, atau demi kebaikan fisik dan moral mereka, bukanlah jaminan yang cukup untuk mengekang tindakan mereka. Mill sangat mendukung kebebasan berbicara, menganggap bahwa opini yang dipendam bisa saja benar, dan bahkan jika salah, bisa menjadi sanggahan yang berguna bagi opini yang berlaku.

Herbert Spencer (1820 – 1903), Antropolog dan filsuf Inggris

Spencer ingin mengaplikasikan teori evolusi ke dalam ranah sosial dan politik. Dia percaya bahwa masyarakat manusia, awalnya sederhana dan militeristik, telah berevolusi menjadi masyarakat industri yang kompleks, yang meluas karena masyarakat kini lebih stabil dan sejahtera. Walaupun dilabeli sebagai “Darwinis Sosial’, dia menganggap bahwa umat manusia berevolusi kearah makhluk yang lebih baik hati. Dia berargumen mendukung kebebasan bagi masing-masing, dibatasi oleh kebebasan semua orang’, dan mendukung pemerintahan yang kecil, *laissez-faire* dan kebebasan untuk mengikat kontrak, menentang regulasi perdagangan. Dia merasa bahwa kebebasan memajukan keberagaman dan inovasi,

yang akan memampukan masyarakat untuk berevolusi lebih cepat dan lebih lebih berguna.

Friederich A. Hayek (1899 – 1992), ilmuwan politik Anglo-Austria

Karya ekonomi Hayek pada 1930-an, meneliti bersama mentor-nya Ludwig von Mises, menunjukkan bagaimana siklus gelembung (*boom*) dan kempis (*bust*) ekonomi yang dimunculkan dari ketidakcakapan manipulasi pemerintah atas kredit; dan dia menjadi pengkritik utama kolektifisme, perencanaan terpusat dan intervensi ekspansionis-nya John Maynard Keynes (1883 – 1946), dia berargumen bahwa kebijakan ini nantinya menuntun pada inflasi dan disalokasi ekonomi. Perang Dunia II mengalihkan perhatiannya kepada ilmu politik, dan buku laris-nya *The Road to Serfdom* (1944) menyelidiki akar dari totalitarianism, berargumen bahwa perencanaan terpusat, karena kontra-produktif, membutuhkan lebih banyak pemaksaan untuk menjaganya. Dalam *The Constitution of Liberty* (1960), dia menjelaskan ide tentang bagaimana keteraturan sosial dan ekonomi bebas. Dia memperbarui ide liberal klasik tentang keteraturan diri, keteraturan sosial spontan, menunjukkan bagaimana hal-hal ini muncul dari perilaku sehari-hari (atau ‘aturan’) yang diikuti oleh individu-individu. Dia berargumen bahwa keteraturan ini, walaupun tidak direncanakan, bisa menghasilkan pengetahuan dengan jumlah yang begitu besar – yang dimiliki oleh individu tetapi tersebar luas, dimiliki secara terpisah-pisah, bersifat pribadi dan sering bersifat sementara – jumlah pengetahuan yang lebih banyak dari apa yang bisa diproses oleh satu agen perencana pun, bahkan jika agen ini bisa memilikinya, belum tentu bisa dia proses.

Dalam *The Fatal Conceit* (1988), dia berargumen bahwa sia-sia saja membayangkan bahwa kita bisa mengatur keteraturan yang begitu kompleks ini menggunakan perangkat ilmu fisik, dan bahwa usaha sadar untuk merancang ulang hanya akan mendestabilisasi dan menuntun kepada petaka sosial dan ekonomi. Hayek juga mendirikan *Mont Pelerin Society*, yang menjadi forum internasional berpengaruh dalam pemikiran liberal klasik.

Ayn Rand (1905 – 82), Novelis dan moralis Kebangsaan Rusia-Amerika

Menjelaskan pemikirannya kebanyakan lewat novel-novelnya, Rand mendukung individualisme radikal, bertengger pada ujung libertarian dalam spektrum liberal klasik. Dia melihat hidup dan aktualisasi-diri sebagai standar moral. Akal, yang menjadi dasarnya, harus menjadi penuntun setiap tindakan, dan orang harus berfokus pada kepentingan-diri rasional dan jangka-panjang. Individu berhak atas buah dari tindakannya, tidak ada yang boleh dirampas dari mereka dengan pemaksaan, yang adalah penyangkalan terhadap pikiran rasional. Tetapi diantara para individu mementingkan-diri rasional pada faktanya tidak akan ada konflik, dan tidak diperlukan pengorbanan-diri, karena orang-orang akan melihat pentingnya nilai, bagi diri mereka sendiri, usaha penghormatan atas hak orang lain. Jika ada peran dari pemerintah, dan aturan atas kegiatan pasar, maka itu hanyalah untuk melindungi hak-hak ini.

Isaiah Berlin (1909 – 97), Filsuf kebangsaan Latvia-Inggris

Berlin adalah filsuf pembela pluralisme dan toleransi terkemuka pada abad dua-puluh. Tidak ada satu model, argumen-nya, yang bisa menjelaskan dengan tepat betapa luasnya keberagaman dan dinamisme dari berbagai ide, nilai dan sejarah umat manusia. Tidak ada satupun prinsip moral, tidak ada standar baku yang atasnya tindakan bisa dihakimi: hidup adalah kompromi permanen antara berbagai nilai yang berbeda dan sering saling bertentangan, seperti kebebasan dan kesetaraan. Dia juga membedakan dua jenis kebebasan. Kebebasan negatif, yang telah dijelaskan sebelumnya dalam karya John Stuart Mill (1806 – 73), menjaga hak orang untuk bertindak tanpa kekangan. Kebebasan positif, yaitu percaya bahwa orang-orang tidak bisa bebas kecuali jika mereka bisa membentuk takdirnya dan mencapai aktualisasi diri. Walaupun ada kebaikan di kedua konsep ini, Berlin takut bahwa ide kebebasan positif digunakan oleh para ideolog untuk mengesampingkan, bukan menggantikan, kebebasan negative yang menjadi dasar liberalisme klasik.

Milton Friedman (1912 – 2006), Ekonom Amerika

Dalam karyanya *Studies in the Quantity Theory of Money* (1956), Friedman memunculkan lagi ide bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai mata uang tetap stabil. Dia berargumen bahwa pemerintah yang mencoba untuk membuka lapangan pekerjaan dengan membiarkan inflasi meningkat akan menciptakan keduanya; inflasi dan pengangguran. Inflasi seperti narkoba, memberikan dorongan jangka pendek tetapi mengakibatkan masalah jangka panjang. Oleh karenanya dia

mengampanyekan ide ‘aturan moneter’ untuk mencegah inflasi, dan untuk menghentikan belanja defisit. Bersama istrinya Rose D. Friedman (1910 – 2009) dia menulis buku larisnya *Capitalism and Freedom* (1962), yang didalamnya dia berargumen mendukung yang pada saat itu dianggap radikal, ide tentang pasar bebas, nilai tukar mengambang, pajak pendapatan negatif, voucher pendidikan dan privatisasi dana pensiun. Dia percaya bahwa satu-satunya yang diuntungkan dari regulasi pemerintah terhadap satu profesi hanyalah mereka yang berprofesi pada pekerjaan tersebut, dan bukannya pelanggannya. Buku dan serial TV terkenalnya *Free to Choose* (1980) menyajikan argumennya kepada audiens yang lebih luas. Dalamnya dia menulis: ‘berharap pada kebebasan orang-orang untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri berdasar nilai mereka sendiri adalah cara yang paling pasti untuk mencapai potensi penuh dari sebuah masyarakat yang maju’.

James M. Buchanan (1919 – 2013), Ekonom Amerika

James Buchanan dan Gordon Tullock (1922 – 2014) adalah tokoh utama dari Aliran Pilihan Publik, bersama mereka menulis *The Calculus of Consent* (1962). Mereka memberikan berbagai bukti atas keraguan terhadap rasionalitas keputusan demokratis, menjelaskan bahwa kepentingan dari pemilih tertentu, kelompok kepentingan, politisi dan pejabat, semuanya mengacaukan proses demokratis ini. Sementara para ekonom ‘kesejahteraan’ menunjuk kepada *kegagalan pasar*, pada kenyataannya ada juga yang disebut sebagai *kegagalan pemerintah*. Lebih khusus kekhawatiran mereka tunjukan adalah kemampuan mayoritas – atau bahkan koalisi dari berbagai kelompok kepentingan – untuk menggunakan kekuasaan negara untuk mengeksploitasi

minoritas, seperti membebankan pajak atas beberapa kelompok masyarakat. Buchanan percaya bahwa cara terbaik untuk melawan ini adalah lewat penetapan aturan konstitusional yang akan mengatur aturan yang menjadi dasar pengambilan keputusan politis. Ideal-nya, aturan konstitusional harus diputuskan dengan suara mutlak (persetujuan semua pihak) sehingga tidak ada yang rentan atas eksploitasi, dari hasil keputusan hukum dan regulasi, oleh tirani mayoritas.

Robert Nozick (1938 – 2002), Filsuf Amerika

Karya Nozick *Anarchy, State, and Utopia* (1974) menyajikan pembelaan moral yang mendetail terhadap kebebasan. Karyanya dimulai dengan ‘kebutuhan kategorisasi’-nya Immanuel Kant (1742 – 1804), bahwa kita harus memperlakukan orang lain sebagai tujuan dalam diri orang itu sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita; dan oleh karenanya kita harus bertindak dalam kerangka bahwa kita menginginkan agar dasar tindakan tersebut menjadi prinsip universal. Umat manusia, selidik Nozick, adalah pemilik tubuh, talenta dan kerja mereka sendiri, yang mana tidak ada orang lain yang berhak mengambilnya secara paksa. Pajak redistributif (pajak untuk pemerataan pendapatan) oleh karenanya tidak bisa dibenarkan. Pada kenyataannya, kekayaan tidak tercipta agar bisa dibahagikan ‘secara merata’ melainkan dia harus diciptakan lewat talenta, kewirausahaan dan usaha individu. Jika kekayaan didapatkan dan dibahagikan secara adil, tanpa pemaksaan, hasil distribusi kekayaan diantara para individu haruslah juga adil, walaupun hasilnya terbagi tidak setara. Peran negara hanyalah untuk melindungi individu dari pemaksaan, pencurian, penipuan dan

pelanggaran kontrak. Tetapi itu berarti membebaskan orang-orang untuk bebas mengejar ambisi dan tujuan mereka sendiri. Negara penjaga malam seperti ini tidak akan menuntun kepada anarki – sebagaimana banyak orang, setelah Revolusi Perancis, takutkan – karena orang-orang akan berkumpul bersama secara sukarela untuk melindungi hak-hak mereka, sebagai contoh, dengan menciptakan berbagai agensi swasta untuk penyelesaian perselisihan.

KUTIPAN LIBERAL KLASIK

Magna Carta

Kita juga telah memberikan bagi setiap orang merdeka di kerajaan kita, bagi kita dan keturunan kita selanjutnya, semua kebebasan berikut, untuk dimiliki oleh mereka dan keturunan mereka, bagi kita dan keturunan kita ... Tidak ada pajak atau bantuan yang dibebankan di kerajaan kita, kecuali berdasarkan pertimbangan umum dalam kerajaan kita... Tidak ada orang merdeka yang boleh ditangkap atau (dan) dipenjarakan atau disita tanahnya atau diasingkan atau dalam cara apapun juga dihancurkan, atau kita pergi dan menimpakan kepadanya, kecuali berdasarkan peradilan yang sah oleh sesamanya atau (dan) berdasarkan hukum negeri ... Tidak kepada siapapun kita boleh menjual dan tidak boleh kepada siapapun kita menolak atau menunda, hak atau keadilan. ... Semua pedagang harus bisa keluar dengan selamat dan aman dari Inggris, dan masuk ke Inggris, dengan hak untuk tinggal disana dan berpindah melalui darat maupun air, untuk membeli dan menjual berdasarkan adat yang benar dan sejak purbakala, dijauhkan dari semua niatan jahat.

Raja John dari Inggris (1166 – 1216) (*dibawah paksaan*)

Hak Alamiah

Hak alamiah ... adalah kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk menggunakan kekuatannya sendiri, sebagaimana kehendaknya sendiri, untuk menjaga keadaannya; yaitu, hidupnya sendiri.

Thomas Hobbes (1588 -1769), *Leviathan*

Keadaan alamiah memiliki hukum alam yang mengaturnya, yang mengatur setiap orang; dan akal, yang mana hukum tersebut mengajarkan setiap orang, yang harus mempertimbangkannya, yang berlaku sama dan independen, tidak ada yang boleh melukai sesamanya dalam hal hidup, kesehatan, kebebasan, atau kepemilikan...

John Locke (1632 – 1704), *Two Treatises of Civil Government*
(Dua Risalah tentang Pemerintahan Sipil)

Kita percaya ini sebagai kebenaran tak-terbantahkan, bahwa setiap manusia diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniakan oleh Pencipta dengan beberapa hak yang tak terpisahkan, diantaranya adalah Hidup, Kebebasan, dan mengejar Kebahagiaan.

Thomas Jefferson (1743 – 1826), *Deklarasi Kemerdekaan Amerika*

Hidup, kebebasan dan kepemilikan tidak muncul karena manusia telah menciptakan hukum. Sebaliknya adalah fakta bahwa hidup, kebebasan dan kepemilikan ada yang pada awalnya menjadi alasan manusia membuat hukum.

Frédéric Bastiat (1801 – 50), *Hukum*

Individu memiliki hak dan ada hal-hal yang tidak ada seorangpun atau satu kelompok yang bisa berbuat terhadap mereka (tanpa melanggar hak mereka). Sebegitu kuat dan luas hak-hak ini sehingga mereka memunculkan pertanyaan tentang apa, jika ada, yang negara atau pejabat boleh untuk berbuat.

Robert Nozick (1938 – 2002), *Anarchy, State, and Utopia*
(Anarki, Negara, dan Utopia)

Pemerintahan Terbatas

Adalah keangkuhan besar dan anggapan tak berdasar dari para raja dan menteri, untuk percaya bahwa mereka sedang mengawasi ekonomi rakyatnya, dan mengekang pengeluaran mereka ... Mereka sendiri selalu, dan tanpa pengecualian, pemboros terbesar dalam masyarakat. Biarlah mereka dulu mengekang diri mereka, sehingga mereka bisa mempercayakan orang biasa untuk pengeluaran mereka. Jika pemborosan mereka tidak merusak negara, demikian pula dengan rakyat mereka.

Adam Smith (1723 – 90), *The Wealth of Nations*

Kekuasaan Pemerintah karena diperlukan maka diberikan kepada beberapa orang; mereka yang dipercayakan memiliki godaan yang besar untuk menyalahgunakannya, dan tak akan berhenti untuk menyalahgunakannya jika mereka tidak dicegah.

James Mill (1773 – 1836), 'The State of Nation' dalam
The London Review

Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak, mutlak korup.

Lord Acton (1834 – 1902), *Surat kepada Uskup Creighton*

Bagaimana kita bisa menjaga pemerintah yang kita ciptakan untuk berubah menjadi Frankenstein yang akan menghancurkan kebebasan yang menjadi alasan kita menciptakan pemerintah? Kebebasan itu tumbuhan langka dan rentan ... Pemerintah diperlukan untuk menjaga kebebasan kita, dia adalah alat yang darinya kita bisa mempraktekan kebebasan kita; tetapi dengan memusatkan kekuasaan di tangan politisi, ini juga menjadi ancaman bagi kebebasan. Walaupun orang-orang yang mendapatkan kekuasaan ini pada awalnya berniat baik Kekuasaan bisa juga menarik dan membentuk manusia dengan sifat buruk.

Milton Friedman (1912 – 2006) bersama Rose D. Friedman
(1910 – 2009), *Kapitalisme dan Kebebasan*
(*Capitalism and Freedom*)

Bagi manusia merdeka, negara adalah kumpulan individu-individu yang membentuknya, bukan sesuatu yang melebihi dan di atas mereka. Dia bangga dengan budaya dan setia pada tradisinya. Tetapi dia menganggap pemerintah sebagai alat, sebuah instrumen, bukannya pemberi kebaikan dan hadiah, bukan juga tuan atau tuhan untuk disembah secara buta dan dilayani.

Milton Friedman (1912 – 2006) bersama
Rose D. Friedman (1910 – 2009),
Kapitalisme dan Kebebasan

Keteraturan Spontan

Setiap langkah dan setiap gerakan dari orang banyak, bahkan yang disebut sebagai zaman tercerahkannya, dibuat dengan ketidaktahuan yang sama akan masa depan; dan bangsa yang nantinya menemukan diri mereka dengan lembaga, yang tentu saja adalah hasil tindakan manusia, dan bukannya hasil dari menjalankan rancangan manusia.

Adam Ferguson (1723 – 1816), *Esay Tentang
Sejarah Masyarakat Sipil*

[Yang kaya] mengkonsumsi sedikit lebih banyak dari pada yang miskin, dan walaupun dengan keegoisan dan ketamakan alamiah mereka ... mereka membagikan dengan yang miskin hasil dari perkembangan mereka. Mereka dituntun oleh tangan tak nampak untuk membuat pendistribusian kebutuhan hidup dengan jumlah yang hampir sama, dengan seperti seandainya bumi dibagi-bagi dengan jumlah luas yang sama kepada semua penghuninya, dan

sehingga tanpa bermaksud demikian, tanpa mereka ketahui, mereka memajukan kepentingan masyarakat, dan memungkinkan terciptanya pertambahan jumlah penduduk.

Adam Smith (1723 – 90), *The Theory of Moral Sentiments*

Tuntunan Kebaikan

Oleh karenanya si bijak berkata, ‘Saya tidak akan berbuat apa-apa (secara sengaja), dan orang-orang akan berubah dengan sendirinya; saya akan bersabar untuk tetap tenang, dan orang-orang akan memperbaiki dirinya dengan sendirinya. Saya tidak akan peduli, dan orang-orang akan menjadi kaya dengan sendirinya; Saya tidak akan menunjukkan suatu ambisi, dan orang-orang akan dengan sendirinya mendapatkan bahkan kebutuhan paling mendasar.’

Lao Tzu (s. 600 BC)

Liberalisme ... mengekang pengendalian terstruktur dari seluruh tatanan masyarakat dan lebih kepada penerapan aturan umum yang diperlukan untuk terbentuknya keteraturan sponta, kerumitan yang tidak bisa kita ramalkan sebelumnya.

F. A. Hayek (1899 – 1992), *Rules and Order*
(Aturan dan Keteraturan)

Dibandingkan dengan Perencanaan dan Pengendalian

Si orang sistem ... cocok dan begitu hebat dalam perencanaannya sendiri; dan sering begitu terpujau dengan anggapan akan keindahan dari skema idealnya akan pemerintahan, sehingga dia tidak mau melihat bahkan adanya sedikit pelencengan dari rencana ini... dia sering berkhayal bahwa dia bisa mengatur berbagai anggota masyarakat yang besar yang berbeda-beda dengan begitu mudah seperti sebuah tangan mengatur berbagai bidak catur. Dia tidak mempertimbangkan bahwa dalam permainan catur yang besar dari masyarakat manusia, setiap bidak masing-masing memiliki prinsipnya sendiri yang tidak pernah tetap, masing-masing berbeda dari apa yang legislator mungkin pilih perbuat terhadapnya.

Adam Smith (1723 – 90), *The Theory of Moral Sentiments*

[Tanpa adanya kekangan terhadap perdagangan] sistem kebebasan alamiah yang pasti dan sederhana menciptakan dengan sendirinya keteraturannya sendiri. Setiap manusia ... dibiarkan sepenuhnya bebas untuk mengejar kepentingannya sendiri dengan caranya sendiri ... Penguasa sepenuhnya dilepaskan dari tugas [yang mana] tidak ada satu kebijaksanaan atau pengetahuan manusia cukup mampu lakukan; tugas untuk mengawasi kerja setiap masing-masing orang, dan mengarahkannya kearah pekerjaan yang paling bisa memenuhi kepentingan masyarakat.

Adam Smith (1723 – 90), *The Wealth of Nations*

Ini bukanlah perdebatan tentang apakah perencanaan akan dilakukan atau tidak. Ini adalah perdebatan tentang apakah perencanaan dilakukan terpusat, oleh satu kekuasaan untuk seluruh sistem ekonomi, atau dibahagikan ke banyak individu-individu.

F. A. Hayek (1899 – 1992), ‘Penggunaan Pengetahuan dalam Masyarakat’

Sebelum kita coba menggunakan kepintaran untuk merancang masyarakat, kita harus mengerti bagaimana dia berfungsi; kita harus sadar bahwa, bahkan ketika kita percaya kita sudah mengerti tentangnya, kita bisa saja salah. Kita harus belajar mengerti bahwa peradaban manusia memiliki hidupnya sendiri, bahwa semua usaha kita untuk memperbaikinya akan bekerja dalam sistemnya secara keseluruhan yang tidak bisa kita kendalikan, dan usaha untuk ranah yang kita coba untuk fasilitasi dan perbaiki hanya sejauh ranah yang bisa kita mengerti saja.

F. A. Hayek (1899 – 1992), *The Constitution of Liberty*

Keadilan dan Supremasi Hukum

Yang tidak adil, bukan hukum, dan yang bukan Hukum, tidak usah ditaati.

Algernon Sidney (1623 – 1683), *Discourse Concerning Government*

Di manapun hukum berakhir, tirani dimulai, jika hukum dilanggar untuk mencederai orang lain; dan siapapun yang berkuasa

melampaui kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh hukum, dan menggunakan pemaksaan yang bisa dia kendalikan ... tidak lagi menjadi hakim; dan, bertindak tanpa otoritas, pasti ditentang, sebagaimana terjadi kepada siapapun, yang dengan pemaksaan melanggar hak orang lain.

John Locke (1632 – 1704), *Two Treatises of Civil Government*

Kebebasan politis dari rakyat adalah ketenangan pikiran yang muncul dari pemikiran masing-masing atas keselamatannya Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif digabungkan pada orang yang sama, atau pada badan peradilan yang sama, maka tidak ada lagi kebebasan, karena kegalauan akan muncul, karena nantinya monarki atau kelompok yang sama bisa membuat hukum tirani, untuk dijalankan dengan cara-cara tirani.

Montesquieu (1689 – 1775), *Spirit of the Laws*

Hal yang sangat penting bagi publik adalah menjaga kebebasan pribadi ini; karena sekali dia diberikan kepada sebuah lembaga peradilan untuk memenjarakan secara sepihak siapapun yang dia atau pejabatnya anggap pantas, (sebagaimana di Perancis adalah hal keseharian dilakukan oleh kerajaan,) akan menjadi akhir bagi semua hak dan imunitas lain.

Sir William Blackstone (1723 – 80), *Commentaries on the Laws of England*

Jika [keadilan] ditiadakan, seluruh struktur besar dan luas dari masyarakat manusia, struktur yang menumbuhkan dan menopang yang jika saya bisa katakan sebagai kesukaan dan kelegaan alam, pasti langsung seketika hancur lebur.

Adam Smith (1723 – 90), *The Theory of Moral Sentiments*

Sarang yang luas dipenuhi lebah,
 Yang hidup mewah dan lega...
 Tanpa budak maupun tirani,
 Juga tidak diperintah oleh liarnya demokrasi;
 Tetapi oleh Raja-raja, yang tidak boleh salah karena,
 Kekuasaan mereka diatur oleh hukum.

Bernard Mandeville (1670 – 1733), *The Fable of the Bees*

Kebebasan Ekonomi

Cara pemerintah selalu pemaksaan dan kewajiban dan sudah pasti adalah kebalikan dari kebebasan. Pemerintah adalah penjamin kebebasan dan hanya sepadan dengan kebebasan jika cakupannya cukup dikekang hanya untuk memelihara apa yang disebut sebagai kebebasan ekonomi. Ketika tidak ada ekonomi pasar, bahkan aturan terbaik dari konstitusi dan hukum sekalipun hanya menjadi huruf tak berarti.

Ludwig von Mises (1881 – 1973), *Human Action*

Dikendalikan dalam usaha ekonomi kita berarti ... dikendalikan dalam segala hal.

F. A. Hayek (1899 – 1992), *The Road to Serfdom*

Di manapun kita temukan adanya unsur yang besar dari kebebasan ekonomi, kita temukan adanya kemajuan dari kenyamanan materiil yang bisa didapatkan oleh rakyat biasa, dan meluasnya harapan akan kemajuan di masa depan, dan kita juga bisa temukan bahwa kegiatan ekonomi diatur terutama melalui pasar bebas.

Milton Friedman (1912 – 2006) dan Rose D. Friedman
(1910 – 2009), *Free to Choose*

Hanya sedikit cara yang bisa kita lakukan untuk lebih memajukan perjuangan kebebasan di dalam dan di luar negeri selain dari pada kebebasan perdagangan seutuhnya.

Milton Friedman (1912 – 2006) dan Rose D. Friedman
(1910 – 2009), *Free to Choose*

Kebebasan Pribadi

Tidak ada seorangpun yang berhak untuk memaksaku untuk bahagia dengan suatu cara tertentu yang dia pikir baik bagi kebahagiaan orang lain; melainkan setiap orang berhak untuk mencari kebahagiaannya sendiri dengan cara yang dia pikir terbaik, jika ini tidak bertentangan dengan kebebasan orang lain yang berjuang untuk mencapai hasil yang sama bagi diri mereka sendiri ketika Kebebasan mampu untuk dipadukan dengan Hak

atas Kebebasan bagi orang lain berdasarkan hukum universal yang yang paling mungkin ada.

Immanuel Kant (1724 – 1804), *Principles of Politics*

Mereka yang menyerahkan kebebasan penting untuk mendapatkan sedikit keamanan sementara tidak layak mendapatkan entah kebebasan maupun keamanan.

Benjamin Franklin (1706 – 90) *Dalam Balasan terhadap Gubernur [Pennsylvania]*

Satu-satunya kebebasan yang layak disebut demikian adalah kebebasan mengejar kebaikan kita sendiri, dengan cara kita sendiri, selama kita tidak berusaha mengambil kebebasan dari orang lain, atau menghalangi usaha mereka untuk mendapatkannya.

John Stuart Mill (1806 – 73), *On Freedom (Tentang Kebebasan)*

Satu-satunya tujuan yang bisa membenarkan penggunaan kekuasaan atas anggota masyarakat beradab, melawan kehendaknya, untuk mencegah melukai orang lain. Kebaikannya sendiri, entah fisik atau moral, bukanlah jaminan yang cukup.

John Stuart Mill (1806 – 73), *On Freedom (Tentang Kebebasan)*

Kebebasan terdapat dalam hati setiap manusia; ketika kebebasan mati didalam hati, tidak ada konstitusi, tidak ada hukum, tidak ada pengadilan yang mampu menyelamatkannya...

Hakim Learned Hand (1872 – 1961), *The Spirit of Liberty*, Pidato di New York 1944

Iman kita terhadap kebebasan tidak bersandar pada ramalan akan hasilnya yang menciptakan keadaan tertentu tetapi pada kepercayaan bahwa kebebasan, dalam keadaan yang seimbang, akan melepaskan lebih banyak hal baik dari pada yang jahat.

F. A. Hayek (1899 – 1992), *The Constitution of Liberty*

Masyarakat yang mengedepankan kesetaraan dari pada kebebasan tidak akan mendapatkan keduanya. Masyarakat yang mengedepankan kebebasan di atas kesetaraan akan mendapatkan keduanya dengan berlimpah.

Milton Friedman (1912 – 2006) *Free to Choose*
(Episode Televisi)

Saya mengucapkan “semoga beruntung” bagi para anarkis, karena ke arah itu tampaknya saat ini kita bergerak. Tetapi saya percaya kita membutuhkan pemerintah untuk menetapkan aturan main Kita membutuhkan pemerintah untuk menjaga sistem peradilan yang akan melindungi kontrak dan aturan tentang ganti rugi. Kita membutuhkan pemerintah untuk memastikan keamanan warga negaranya – untuk menyediakan perlindungan kepolisian. Tetapi pemerintah banyak gagal akan hal yang seharusnya dia lakukan,

karena dia terlibat dalam banyak hal yang tidak seharusnya dia lakukan.

Milton Friedman (1912 – 2006), wawancara dengan
majalah *Playboy*

Kebebasan Politik

Para penulis politik telah menjadikannya *maxim*, bahwa, dalam usaha membangun semua sistem pemerintahan, dan mengatur terciptanya saling memeriksa dan mengendalikan (*check and control*) yang konstitusional, setiap orang seharusnya menjadi licik, dan tidak memiliki tujuan lain dalam tindakannya, selain kepentingan pribadi.

David Hume (1711 – 1776), *Essay, Moral, Political, Literary*

Demokrasi dan sosialisme tidak memiliki satu kesamaanpun selain satu kata, kesetaraan. Tetapi perhatikan perbedaannya; sementara demokrasi mengusahakan kesetaraan kebebasan, sosialisme mengusahakan kesetaraan dalam pengekangan dan penghambaan.

Alexis de Tocqueville (1805 – 1859), Pidato di hadapan
Mahkamah, 1848

Pemerintah adalah sebuah fiksi besar dimana setiap orang berusaha hidup dengan dibiayai oleh orang lain.

Frédéric Bastiat (1801–50), *Pemerintah*

Demokrasi pada intinya adalah sebuah cara, alat utilitarian untuk menjaga kedamaian diri dan kebebasan individu. Oleh karenanya tidaklah mungkin dia sempurna atau pasti.

F. A. Hayek (1899 – 1992), *The Road to Serfdom*

KRONOLOGI LIBERALISME KLASIK

- 930 Parlemen pertama di dunia, Althing, didirikan di Islandia
- 973 Raja Anglo-Saxon, Raja Edgar dimahkotai dengan acara sumpah jabatan pertama, bersumpah untuk melindungi negeri, menjunjung hukum, dan memerintah dengan adil.
- 1014 Raja Anglo-Saxon, Aethelred menyetujui untuk menjunjung hukum kuno dan meminta nasihat dari Witan.
- 1066 Kebebasan individu dan pemerintahan terbatasnya Anglo-Saxon berakhir dengan penaklukan oleh Norman atas Inggris dan diperkenalkannya feudalisme.
- 1215 Dibawah tekanan, Raja John menyetujui Magna Carta, menyatakan pengakuan terhadap hak kepemilikan dan pembatasan kekuasaan kerajaan dibawah 'hukum negeri'.
- 1225 Raja Henry II dari Inggris secara sukarela menerbitkan kembali versi terbaru dari Magna Carta; yang menjadi dokumen dasar dari konstitusi Inggris.
- 1265 Simon de Montfort membentuk Parlemen Besar, menjadikan keputusan Raja harus berdasarkan persetujuan dewan, berdasarkan pertimbangan Parlemen.
- 1381 Revolusi Petani menuntut hak-hak lama di Inggris untuk diberlakukan kembali.

- 1517 Martin Luther memantik terjadinya Reformasi Protestan, secara tidak sengaja mempromosikan juga individualism yang lebih besar.
- 1651 Karya Thomas Hobbes *Leviathan* mendukung pemerintahan yang lebih kuat, tetapi berargumen mendukung persemakmuran yang dibangun berdasarkan kontrak sosial dan mendukung 'hak alamiah' rakyat yang tak terpisahkan, untuk mempertahankan dirinya, bahkan terhadap negara.
- 1687 William Penn menerbitkan cetakan pertama Magna Carta di Amerika.
- 1688 Revolusi Gemilang, Raja James II digulingkan dan Parlemen menetapkan aturan bagi penguasa baru, William dan Mary, mengatur batasan kekuasaan kerajaan.
- 1689 Undang-Undang tentang Hak (*Bill of Rights*) Inggris meletakkan dasar tentang sifat kontraktual dari Pemerintahan, menetapkan batasan dari kekuasaan Kerajaan, menjamin kebebasan berbicara di Parlemen, mengatur pemilihan umum dan menyatakan hak untuk mengajukan petisi terhadap pemerintah tanpa takut akan pembalasan.
- 1690 John Locke menerbitkan *Two Treatises on Civil Government (Dua Tulisan tentang Pemerintahan Sipil)*, menyediakan fondasi filosofis untuk ide pemerintahan kontraktual dan membenarkan penggulingan Raja James II.

- 1705 Bernard Mandeville menerbitkan *The Grumbling Hive*, sebuah puisi tentang keuntungan sosial yang dihasilkan oleh kepentingan diri.
- 1720 John Trechard dan Thomas Gordon mulai menerbitkan *Cato's Letters* (Surat-surat Cato), koran esai yang membela kebebasan berbicara dan akal.
- 1734 Voltaire memprotes budaya illiberal Perancis dalam karyanya *Philosophical Letters on the English* (*Tulisan Filosofis tentang Orang Inggris*)
- 1748 Charles de Montesquieu menerbitkan *The Spirit of the Laws* (*Semangat Hukum*) menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan ke dalam cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- 1767 Karya Adam Ferguson *History of Civil Society* (Sejarah Masyarakat Sipil) menjelaskan bagaimana lembaga masyarakat adalah 'hasil dari tindakan manusia, tetapi bukan hasil pelaksanaan rancangan manusia'.
- 1776 Karya Thomas Paine *Common Sense* (*Akal Umum*) menuduh pemerintahan Inggris melanggar kontrak sosialnya dengan Amerika dan memantik revolusi.
- 1776 Adam Smith menerbitkan *The Wealth of Nations* (*Kesejahteraan Bangsa-Bangsa*), menunjukkan bagaimana kepentingan-diri, pertukaran sukarella, perdagangan bebas, dan pembagian kerja semuanya mendorong kemajuan ekonomi.

- 1776 Amerika mendeklarasikan kemerdekaannya dari Pemerintah Inggris karena melanggar ‘hak tak terpisahkan’ dari warganya.
- 1780 Konstitusi Massachusetts karya John Adams memberikan perlindungan khusus kepada pemisahan kekuasaan, ‘dengan tujuan agar bisa menjadi pemerintahan berdasar hukum, dan bukan manusia.’
- 1785 Dalam karyanya *Groundwork for the Metaphysics of Morals* (Membangun Dasar Metafisik Moral), Immanuel Kant menjabarkan ‘kategorisasi imperatif’-nya bahwa setiap orang harus diperlakukan sebagai tujuan dari dirinya sendiri, bukan alat untuk mencapai tujuan.
- 1789 Pemerintahan Revolusioner Perancis menerbitkan *Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara*, menekankan aturan pelarangan kekerasan, proses hukum yang benar, hak kepemilikan dan kebebasan nurani – tetapi prinsip-prinsip ini segera diabaikan.
- 1791 Undang-Undang tentang Hak (*Bill of Rights*) Amerika Serikat disahkan, menjabarkan hak dasar seperti kebebasan beragama, berbicara, berserikat dan berkumpul, kebebasan pers, dan hak memegang senjata, dan kebebasan dari penahanan dan penyitaan yang tidak adil.
- 1833 Aktifis liberal klasik memimpin penghapusan perbudakan di sebagian besar wilayah Imperium Inggris

- 1838 Richard Cobden dan John Bright membentuk Liga Anti-Undang Undang-Gandum (*Anti Corn Law League*) bertujuan untuk mengapus tarif impor mudarat dan proteksionis untuk gandum.
- 1843 *The Economist* (majalah), didirikan oleh James Wilson, menjadi suara dukungan terhadap pasar bebas pemerintahan *laissez faire*.
- 1843 Perbudakan dihapuskan di seluruh Imperium Inggris Raya.
- 1846 Hukum Gandum (*Corn Law*) dicabut.
- 1849 Karya Frédéric Bastiat's *The Law (Hukum)* menekankan tentang hak ilahi individu untuk mempertahankan diri, kebebasan dan kepemilikan dan berargumen bahwa pemerintah dan hukum tidaklah sah jika melanggar hak-hak ini.
- 1851 Karya Herbert Spencer *Social Static*, mengajukan argumen yang dikaitkan dengan evolusi bahwa pemerintahan terbatas untuk melindungi pribadi dan hak kepemilikan setiap individu.
- 1859 John Stuart Mill menerbitkan karya klasiknya yang membela kebebasan *On Liberty*
- 1927 Ludwig von Mises menjelaskan kembali prinsip-prinsip liberal klasik dalam karyawan *Liberalismus*, walaupun buku ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Inggris sampai tahun 1962.

- 1943 Ayn Rand menerbitkan novel filsafatnya *The Fountainhead*, sebuah pembelaan yang kuat terhadap pemenuhan-diri.
- 1944 F. A. Hayek menerbitkan *The Road to Serfdom (Ancaman Kolektifisme)*, menunjukkan bagaimana totalitarianisme berakar pada perencanaan terpusat dan pemaksaan yang diperlukan untuk mendukungnya.
- 1945 Dalam *The Open Society and Its Enemies* (Masyarakat terbuka dan musuhnya), Karl Popper mengajukan penentangannya terhadap perancangan sosial Utopis dan menjabarkan ide tentang masyarakat terbuka, dengan berbagai opini yang berbeda-beda dan perubahan secara gradual.
- 1947 Para cendekiawan Liberal Klasik dari Eropa dan Amerika berkumpul di Swis untuk pertemuan pertama *The Mont Pelerin Society (Komunitas Mont Pelerin)*.
- 1957 Ayn Rand menerbitkan karya yang sangat berpengaruh *Atlas Shrugged*, menjelaskan tentang pentingnya usaha individu untuk menciptakan kesejahteraan.
- 1958 Dalam *Two Concepts of Liberty*, Isiah Berlin membedakan antara kebebasan negatif dan positif, menyatakan bahwa kebebasan positif berpeluang bagi penyalahgunaan oleh para ideolog.
- 1960 F. A. Hayek menerbitkan *The Constitution of Liberty*, menjabarkan akar, prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga masyarakat liberal klasik.

- 1962 *The Calculus of Consent* oleh James M. Buchanan dan Gordon Tullock menjelaskan masalah dari kepentingan diri dalam pengambilan keputusan politis.
- 1962 Milton Friedman menerbitkan *Capitalism and Freedom*, yang mendukung pasar bebas, nilai tukar mengambang, pajak penghasilan negatif, voucher pendidikan dan ide lainnya yang dianggap radikal pada saat itu.
- 1973 Karya Murray Rothbard *For a New Liberty*, di dalamnya dia menggunakan kembali secara meyakinkan, tradisi hak alamiah dalam membahas isu-isu sosial dan politis modern.
- 1974 Karya Robert Nozick *Anarchy, State, and Utopia*, sebuah pembelaan yang meyakinkan terhadap kebebasan, menentang pajak redistributif sebagai penyerangan terhadap kepemilikan pribadi.
- 1980 Serial TV besutan Milton Friedman membawa argumen liberal klasik kepada khalayak pemirsa yang lebih luas dan baru.
- 1988 F. A. Hayek menerbitkan *The Fatal Conceit*, menjelaskan bahwa keteraturan spontan dari masyarakat manusia adalah begitu kompleks sehingga tidak ada perencanaan individu yang bisa mengerti dan mengarahkannya.
- 1989 Runtuhnya Tembok Berlin menunjukkan keterbelakangan ekonomi dan masalah sosial dari perencanaan terpusatnya blok Soviet.

BACAAN LEBIH LANJUT

Pengenalan

- Ashford, N. (2013) *Principles for a Free Society*. Stockholm: Jarl Hjalmarson Foundation. Penjelasan singkat dan menyeluruh tentang bagaimana masyarakat dan pasar bebas dibangun. Edisi Bahasa Indonesia: (2010) *Prinsip-Prinsip Masyarakat Merdeka*. Jakarta: Freedom Institute
- Butler, E. (2011) *The Condensed Wealth of Nations*. London: Adam Smith Institute. Ringkasan tentang ekonomi dan etika Liberal Klasik-nya Adam Smith.
- Butler, E. (2013) *Foundations of a Free Society*. London: Institute of Economic Affairs. Penjelasan ringan tentang prinsip-prinsip inti yang mendasari masyarakat bebas, seperti kebebasan, hak-hak, toleransi, supremasi hukum dan pemerintahan terbatas.
- Frideman, M. bersama Friedman, R. D. (1962) *Capitalism and Freedom*. Chicago, IL: University of Chicago Press. Karya klasik yang mendukung masyarakat bebas dan ekonomi bebas, dengan resep kebijakan radikal.
- Friedman, M. dan Friedman, R. D. (1980) *Free to Choose*. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Pembelaan memikat tentang masyarakat bebas, didasarkan pada serial televisi dengan judul yang sama.
- Hannan, D. (2013) *How We Invented Freedom and Why It Matters*. London: Head of Zeus. Penyelidikan luar biasa

tentang ide liberal klasik dari Zaman Anglo-Saxon hingga saat ini.

- Palmer, T. G. (2011) *The Morality of Capitalism*. Arlington, VA: Students for Liberty dan Atlas Foundation. Kumpulan esai singkat tentang moralitas, kerja sama, kemajuan, globalisasi dan budaya liberal klasik.
- Palmer, T. G. (ed.) (2013) *Why Liberty*. Arlington, VA: Students for Liberty dan Atlas Foundation. Koleksi esai tentang tema-tema libertarian dan liberal klasik.
- Palmer, T. G. (ed.) (2013) *Peace, Love, and Liberty*. Ottawa, IL: Jameson Books. Kumpulan esai-esai singkat tetapi dengan cakupan luas yang menunjukkan bagaimana kebebasan sosial dan ekonomi memajukan perdamaian internasional.
- Pirie, M. (2008) *Freedom 101*. London: Adam Smith Institute. Seratus satu argumen menentang kebebasan ekonomi dan masyarakat bebas, dibantah di setiap lembar halaman.
- Wellings, R. (ed.) (2009) *A Beginner's Guide to Liberty*. London: Adam Smith Institute. Penjelasan lugas tentang pasar, hak kepemilikan, kebebasan, kegagalan pemerintah, pelarangan (bahan terlarang) dan kesejahteraan tanpa peran negara.

Penjelasan Umum

- Butler, E. (2011) *Milton Friedman: A Concise Guide to the Ideas and Influence of the Free-Market Economist*. Petersfield: Hariman House. Pengenalan ringan tentang ide ekonomi dan sosial dari sang ekonom liberal klasik terkenal.
- Butler, E. (2012) *Friedrich Hayek: The Ideas and Influence of the Libertarian Economist*. Petersfield: Harriman House. Pengenalan ringan tentang ilmuwan politik liberal klasik

yang mengembangkan banyak pemikiran modern tentang masyarakat spontan.

Butler, E. (2012) *Public Choice – A Primer*. London: Institute of Economic Affairs. Penjelasan sederhana tentang kegagalan pemerintah, masalah kepentingan-diri dalam sistem demokratis dan dukungan terhadap pengekangan konstitusional.

Cranston, M. (1967) Liberalism. Dalam *The Encyclopaedia of Philosophy* (ed. P. Edwards. hh. 458 – 461. New York: Macmillan and the Free Press.

Kukathas, C. (2003) *The Liberal Archipelago*. Oxford University Press. Pembelaan yang meyakinkan terhadap keberagaman, multikulturalisme dan hak minoritas.

Meadowcroft, J. (ed) (2008) *Prohibitions*. London: Institute of Economic Affairs. Sebuah argument yang begitu kuat menentang pengendalian pemerintah atas berbagai pilihan gaya hidup yang berbeda-beda.

Smith, G. H. (2013) *The System of Liberty: Themes in the History of Classical Liberalism*. Cambridge University Press. Menjabarkan tentang sejarah dan berbagai pandangan yang berbeda dari liberal klasik tentang isu-isu penting seperti keteraturan, keadilan, hak-hak, anarki dan peran negara.

Karya Klasik

Bastiat, F. (2001) *Bastiat's 'The Law'*. London: Institute of Economic Affairs. Karya klasik tentang ide-ide liberal klasik dari sang penulis dan politisi berkebangsaan Perancis. Bahasa Indonesia: *Hukum: Rancangan Klasik untuk*

- Membangun Masyarakat Merdeka* (2010). Jakarta: Freedom Institute.
- Berlin, I. (1969) Two concepts of Liberty. Dalam *Four Essays on Liberty*. Oxford University Press. Artikel dimana dia membedakan kebebasan positif dan negatif.
- Hayek, F. A. (1944) *The Road to Serfdom*. London: Routledge. Karya klasik singkat yang diterbitkan pada masa perang dunia yang menjelaskan tentang bahaya perencanaan terpusat dan pemerintah yang tak dibatasi. Bahasa Indonesia: *Ancaman Kolektivisme* (2011). Jakarta: Freedom Insitute.
- Hayek, F. A. (1960) *The Constitution of Liberty*. London: Routledge. Buku tebal yang menyelidiki asal mula ide liberal dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar masyarakat merdeka.
- Hayek, F. A. (1988) *The Fatal Conceit* (3 volume). Chicago, IL: University of Chicago Press. Berisi pernyataan tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar keteraturan spontan dalam aspek sosial dan ekonomi, dan argument menentang usaha untuk perencanaan terpusat.
- Hazlitt, H. (1946) *Economics in One Lesson*. New York, NY: Harper & Brothers. Masih dianggap oleh banyak orang sebagai buku pengenalan terbaik tentang ekonomi liberal klasik.
- Locke, J. (1960) [1689] *The Second Treatise of Government*. Dalam *Two Treatises of Government* (ed. P. Laslett). H. 283 – 446. Cambridge University Press. Pembelaan filosofis atas ide pemerintahan kontraktual dan terbatas, dan tentang hak rakyat untuk menggulingkan pemerintah yang melanggar kontrak tersebut.

Mill, J. S. (2008) [1859] *On Liberty*. Dalam *On Liberty and Other Essays* (ed. J. S. Mill). Oxford University Press. Buku klasik tentang pembelaan kebebasan, prinsip tanpa-kekerasan, kebebasan berekspresi, pemerintahan terbatas, keadilan alamiah dan toleransi.

Popper, K. (1945) *The Open Society and Its Enemies*. London: Routledge. Pembelaan filosofis dari masyarakat merdeka dan kritik ampuh terhadap usaha perancangan ulang masyarakat secara keseluruhan.

Tautan Laman Pilihan

Blog Adam Smith Institute – blog yang sangat dinamis tentang sudut pandang liberal klasik terhadap isu-isu politik, sosial dan ekonomi saat ini: <http://www.adamsmith.org/blog/>

Cato Institute – Think tank Washington terkemuka berkomitmen untuk menyebarkan pemikiran filsafat kebebasan melalui penelitian dan komentar media: <http://www.cato.org>

IEA TV – video-video singkat dari Institute of Economic Affairs tentang isu saat ini, penelitian, buku-buku, even-even dan isu-isu: <http://www.iea.org.uk/tv>

Learn Liberty - Video singkat dari Institute for Humane Studies, dengan pandangan liberal klasik tentang ekonomi, politik, hukum, sejarah dan filsafat: <http://www.learnliberty.org/videos/>

Liberty League – Mempromosikan ide-ide pro-kebebasan diantara para mahasiswa dan profesional muda di Inggris, dan mengadakan konferensi tahunan tentang pasar bebas yang terbesar di Inggris: <http://uklibertyleague.org>

Mercatus Center – usaha mereka untuk menutup kesenjangan antara akademisi dan isu nyata dengan melatih mahasiswa dan siswa, menerbitkan penelitian, dan menghasilkan solusi bagi masalah sosial: <http://mercatus.org>

Online Library of Liberty – Sumber pustaka yang sangat banyak dari Liberty Fund, berisi buku-buku dan tulisan-tulisan penting dari para liberal klasik dari berbagai zaman: <http://oll.libertyfund.org>

Reason Foundation – Lembaga penelitian AS terkemuka yang menerbitkan majalah terkenal tentang ide pasar dan riset kebijakan: <http://reason.org>

Students for Liberty – sebuah jaringan kelompok mahasiswa pro-kebebasan, mewakili lebih dari 100,000 mahasiswa dari lebih 1,350 kelompok di seluruh dunia: <http://studentsforliberty.org>

TENTANG IEA

Institut ini merupakan lembaga penelitian dan pendidikan nirlaba (No. CC235 351). Dengan misi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pelembagaan masyarakat bebas dengan menganalisa dan menjelaskan peran pasar dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi.

IEA berjuang mencapai misinya melalui:

- Program penerbitan yang berkualitas tinggi
- Konferensi, seminar, kuliah dan even lainnya
- Program kepada siswa sekolah dan mahasiswa
- Melobi untuk menjangkau media dan bisa muncul di media.

IEA, yang didirikan pada tahun 1955 oleh almarhum Sir Antony Fisher, adalah lembaga nirlaba pendidikan, bukan organisasi politik. Dia independen dari partai politik apapun atau kelompok dan tidak melakukan kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi dukungan terhadap partai politik manapun atau kandidat dalam pemilihan atau referendum manapun, atau pada saat apapun. Dia dibiayai oleh hasil penjualan terbitan, iuran konferensi dan donasi sukarela.

Selain terbitan utamanya IEA juga menerbitkan jurnal triwulan, *Economic Affairs*.

IEA dibantu oleh hasil kerja Dewan Pembina Akademik Internasional yang para anggotanya dari latar belakang yang terhormat, dan anggota panel dari Anggota Kehormatan. Bersama dengan akademisi lain, mereka meninjau bahan publikasi IEA,

komentar mereka diserahkan kembali kepada pengarang tanpa menuliskan nama. Semua makalah IEA oleh karenanya melewati proses seleksi independen yang sama ketat sebagaimana jurnal akademis terkemuka.

Publikasi IEA digunakan secara luas di berbagai kelas dan diadopsi di berbagai sekolah dan universitas. Publikasi ini juga terjual diseluruh dunia dan sering diterjemahkan/dicetak ulang.

Sejak 1974 IEA telah membantu menciptakan jaringan internasional 100 institusi jenis yang sama di lebih dari 70 negara. Semua organisasi ini independen tetapi dengan misi yang sama dengan IEA.

Pandangan yang dijelaskan dalam publikasi IEA adalah milik penulis, bukan institut (yang tidak memiliki pandangan organisasi), Dewan Pelaksana, Anggota Dewan Pertimbangan Akademis atau staff senior.

Anggota Dewan Pertimbangan Akedemis, Anggota Kehormatan, Pelaksana, dan Staff adalah pada daftar berikut ini. Institut ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan finansial untuk program publikasi dan pekerjaan lain berupa sumbangan yang murah hati dari almarhum Professor Ronald Coase.

Director General & Ralph Harris Fellow

Mark Littlewood

Editorial Director

Professor Philip Booth

Managing Trustees (Dewan Pengurus)

Ketua: Neil Record

Kevin Bell

Professor Mark Pennington

Robert Boyd

Bruno Prior

Michael Fisher

Professor Martin Ricketts

Sir Michael Hintze

Linda Whetstone

Professor Patrick Minford

Dewan Pertimbangan Akademis

Ketua: Professor Martin Ricketts

Dr Andrew Lilico

Graham Bannock

Professor Stephen C Littlechild

Dr Roger Bate

Professor Theodore Roosevelt Malloch

Professor Alberto Benegas-Lynch, Jr

Dr Eileen Marshall

Professor Christian Bjornskov

Professor Antonio Martino

Professor Donald J Boudreaux

Dr John Meadowcroft

Professor John Burton

Dr Anja Merz

Professor Forrest Capie

Professor Julian Morris

Professor Steven N S Cheung

Professor Alan Morrison

Professor Tim Congdon

Professor D R Myddelton

Professor Christopher Coyne

Paul Ormerod

Professor N F R Crafts

Professor David Parker

Professor David de Meza

Professor Victoria Curzon Price

Professor Kevin Dowd

Professor Colin Robinson

Professor David Greenaway

Professor Pascal Salin

Dr Ingrid A Gregg

Dr Razeen Sally

Dr Samuel Gregg

Professor Pedro Schwartz

Walter E Grinder

Professor J R Shackleton

Professor Steve H Hanke

Jane S Shaw

Professor Keith Hartley
Professor David Henderson
Professor Peter M Jackson
Dr Jerry Jordan
Dr Lynne Kiesling
Professor Daniel B Klein
Dr Mark Koyama
Professor Chandran Kukathas
Dr Tim Leunig

Professor W Stanley Siebert
Dr Elaine Sternberg
Professor James Tooley
Professor Nicola Tynan
Professor Roland Vaubel
Dr Cento Veljanovski
Professor Lawrence H White
Professor Walter E Williams
Professor Geoffrey E Wood

Anggota Kehormatan

Professor Michael Beenstock
Sir Samuel Brittan
Professor Richard A Epstein
Professor David Laidler

Professor Deirdre McCloskey
Professor Chiaki Nishiyama
Professor Vernon L Smith
Professor Basil S Yamey

TENTANG FNF

Friedrich-Naumann-Stiftung Untuk Kebebasan (FNF) adalah sebuah Yayasan Politik Jerman. Di Jerman dan di 60 negara di seluruh dunia, FNF bersama dengan mitra-mitra kerjanya mempromosikan kebebasan, liberalisme, demokrasi, hak azasi manusia, pluralisme, toleransi, ekonomi pasar dan negara hukum.

FNF memiliki hubungan dekat dengan partai politik Jerman Partai Demokrat Bebas (FDP). Kami didirikan pada 1958 oleh Presiden pertama Jerman, Theodor Heuss, dan telah bekerja di Asia sejak 1979, dan di Indonesia sejak 1969. FNF beroperasi dengan dana publik dan berkantor pusat di Potsdam, Jerman.

FNF memberikan konsultasi kepada para pembuat keputusan di Berlin dan menerbitkan berbagai laporan. Kami memfasilitasi dialog, menyelenggarakan konferensi dan mengundang orang-orang muda dari Asia dan berbagai wilayah lain untuk mengikuti seminar di Jerman.

Alamat:

Jl. Kertanegara 51, Jakarta Selatan 12110

Telp: (62-21) 7256012/13

Fax: (62-21) 72799539

Email: jakarta@fnst.org

<https://indonesia.fnst.org/>

Liberalisme Klasik: Perkenalan Singkat

Liberalisme klasik tidak lain dari filsafat politik dan sosial yang terpenting. Tentu saja, kumpulan ide ini demikian penting dalam mewujudkan terciptanya dunia modern. Liberalisme klasik memajukan iklim politik di mana ekonomi bisa bebas untuk berkembang dan aktor-aktor selain pemerintah dapat pula berkembang. Hal ini merupakan kondisi penting bagi terciptanya peningkatan luar biasa dari standar hidup yang kita lihat dalam dua abad terakhir.

Namun, walaupun dengan kontribusinya yang luar biasa, liberalisme klasik saat ini seringkali sulit untuk dipahami dan sering disalahartikan. Pemikirannya acapkali pula terabaikan di tengah intervensi kekuasaan yang masih mengemuka di berbagai negara.

Oleh karena itu, buku pengantar karya Eamonn Butler ini sangat disambut baik. Isinya jelas dan memaparkan dengan baik alur pemikiran liberalisme klasik. Karya ini sangat cocok untuk pelajar ilmu sosial maupun masyarakat umum dan menjadikannya sumbangsih bernilai bagi pemahaman yang lebih baik bagi aliran pandangan yang sedang mengalami kebangkitan kembali yang sudah terlalu lama tertunda.



Friedrich Naumann Foundation Indonesia

Jl. Kertanegara 51, Jakarta Selatan 12110

Telp: (62-21) 7256012/13

Fax: (62-21) 72799539

Email: jakarta@fnst.org

<https://indonesia.fnst.org/>

ISBN 978-979-1157-50-6



 FNF Indonesia

 @FNFIndonesia

 fnf.indonesia



**FRIEDRICH NAUMANN
FOUNDATION** For Freedom.
Indonesia



**Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**